



PANDUAN PELAKSANAAN

# LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Provinsi Sulawesi Selatan

2021





# PANDUAN PELAKSANAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU

## **Tim Penyusun:**

Rukmini, S.Pd, M.Pd – Kabid. Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan  
H. Sawir, S.Pd, M.Pd – Pengawas SD wilayah Liukang Tupabiring Utara (LTU)  
Sukri Darmawan, S.Pd – Kepala Sekolah SDN 23 Pulau Sakuala, Kec. LTU  
Dharmawaty, MT, S.Pd – Guru SDN 23 Pulau Sakuala, Kec. LTU  
Dr. Made Amin, M.Pd, S.Pd – Guru SDN 41 Pulau Sabangko, Kec. LTU  
Adamang, S.Pd – Guru SDN 4 Pulau Salemo, Kec. LTU  
Satmalania, S.Pd, M.Pd – Tim Fasilitator Kabupaten  
Dra. Hj. Nursiah, S.Pd – Tim Fasilitator Kabupaten  
Irmawati, S.Pd – Tim Fasilitator Kabupaten  
Hasnah Abubakar, S.Pd, M.Pd – Tim Fasilitator Kabupaten  
Asir, S.Pd, M.Pd – Tim Fasilitator Kabupaten

## **Pengkaji Panduan Kelas Perahu:**

Dr. Ngadirin, M.Ed – Kepala Seksi Penilaian, Subdit Kurikulum, Direktorat PPK, Kemendikbud  
Dr. Supriadi Torro – Dosen Universitas Negeri Makassar (UNM)

## **Tim Riviewer Panduan Kelas Perahu:**

Eko Cahyono, M.KPd – Konsultan Pendidikan KOMPAK  
Nurman Siagian, M.A – Education Manager KOMPAK  
Ahmar Djalil – Provincial Manager KOMPAK  
Siti Rohani – Frontline Coordinator KOMPAK  
Nastain Gasba – District Coordinator KOMPAK  
Hasriadi Masalam, PhD - Konsultan KOMPAK

# SAMBUTAN

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

### (Periode 2010-2021)

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki topografi yang bersifat tiga dimensi karena meliputi daratan, kepulauan, dan pegunungan. Wilayah kabupaten terdiri atas 13 kecamatan dengan dua kecamatan pegunungan, tujuh kecamatan daratan dan empat kecamatan kepulauan. Sebanyak 115 pulau di kecamatan kepulauan berada di gugusan Kepulauan Spermonde. Kabupaten Pangkep memiliki luas 12.362 km<sup>2</sup> yang terdiri atas luas daratan 898 km<sup>2</sup> dan laut 11.464 km. Kondisi geografis ini mempengaruhi layanan pendidikan terutama untuk anak-anak yang berada di daerah kepulauan. Lingkungan budaya masyarakat kepulauan yang hidup dengan bertumpu pada laut menyebabkan akses ke pendidikan formal relatif sulit.

Penduduk yang mendiami daerah kepulauan umumnya memiliki mata pencaharian nelayan atau buruh nelayan yang bekerja menangkap ikan di laut atau mengolah hasil laut. Sebagian orang tua saat melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kerap mengikutsertakan anak-anaknya. Keterlibatan anak melaut, yang waktunya bersamaan dengan jam belajar di sekolah, membuat mereka kerap harus meninggalkan pembelajaran di sekolah. Kondisi ini lambat laun membuat anak usia sekolah malu atau enggan kembali masuk sekolah. Karena tidak pernah datang ke sekolah lagi, anak-anak yang melaut ini pun sangat berpotensi putus sekolah. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah di tingkat SD maupun SMP.

Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada KOMPAK yang telah membantu penurunan angka putus sekolah melalui dukungan pada layanan pendidikan Kelas Perahu. Layanan ini dikembangkan pertama kali oleh inovator Kelas Perahu, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep di Liukang Tupabiring Utara, salah satu kecamatan kepulauan. Keberhasilan program rintisan ini mendorong kami mendukung replikasi model layanan pendidikan Kelas Perahu ke daerah lain yang memiliki kondisi serupa atau sejenis. Kami berharap model ini dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta mengurangi, bahkan menghapuskan, angka putus sekolah di kepulauan. Dukungan semua pihak sangat kami harapkan agar model layanan pendidikan Kelas Perahu dapat diterapkan. Tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pangkajene, 29 Agustus 2019

Bupati Pangkep,



H Syamsuddin A Hamid, SE

# SAMBUTAN

## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

### (Periode 2021-2026)

Inovasi Kelas Perahu sebagai layanan bagi siswa yang melaut membantu orang tuanya, dengan pendekatan belajar mandiri melalui Lembar Kerja Siswa (LKS), adalah perwujudan kehadiran Pemerintah Pangkep di tengah permasalahan pendidikan di daerah kepulauan.

Dampak penerapan layanan Kelas Perahu telah membantu Pemerintah Pangkep dalam mencapai target dalam upaya menurunkan angka putus sekolah dari siswa melaut, yang mencapai 44% pada tahun 2015, hingga turun menjadi 11% pada 2021. Pendekatan ini terbukti efektif tidak hanya dalam membantu siswa lebih percaya diri untuk kembali ke sekolah lagi setelah melaut. Guru juga sangat terbantu dalam mendorong kemauan belajar siswa dan memiliki data kemajuan hasil belajar siswa. Bahkan, orang tua pun lebih terdorong berkolaborasi dengan guru mengontrol dan mendampingi anak belajar di sela-sela melaut.

Dampak positif ini juga menginspirasi pemerintah Kabupaten Pangkep untuk terus mendukung strategi keberlanjutan layanan Kelas Perahu, antara lain: mendorong replikasi di empat kecamatan kepulauan (Kec. Liukang Tupabbiring Utara, Kec. Liukang Tupabbiring, Kec. Liukang Kalmas, Kec. Liukang Tangaya), enam kecamatan pesisir dan satu kecamatan pegunungan; pelatihan ToT bagi pengawas, kepala sekolah dan guru di empat kecamatan kepulauan dan pesisir. Selain itu, Pemerintah Pangkep telah mengeluarkan dan menjalankan Peraturan Bupati Pangkep No. 31/2019 tentang layanan Pendidikan Kelas Perahu dan merevisi buku panduan pelaksanaan berdasarkan pengalaman tim pengelola menerapkan strategi replikasi tersebut. Juga menyediakan anggaran insentif bagi guru-guru yang melaksanakan pendampingan melalui DPA Dinas Pendidikan Pangkep. Sebagai bupati yang baru dilantik tahun ini, RPJMD 2021-2026 pun sudah mendukung kegiatan inovasi Kelas Perahu.

Perbaikan secara berkesinambungan terhadap tata kelola Kelas Perahu juga telah terbukti efektif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19 ini. Selama pandemi, siswa, baik yang melaut maupun tidak, mendapatkan pelayanan yang sama, yaitu dengan diberikan LKS. Saat ini masih terdapat sekitar 700 siswa yang aktif melaut dan tetap mengikuti pembelajaran dengan LKS, dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kunjungan guru ke rumah untuk memeriksa LKS dan pendampingan langsung kepada siswa pun sudah dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Dengan demikian, mengingat tidak semua wilayah punya jaringan internet, bahkan telepon sekalipun, keberadaan inovasi Kelas Perahu sangat relevan dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 ini.

Semua capaian ini tentunya tak lepas dari kerja keras tim manajemen Kelas Perahu dengan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, serta dukungan dari pihak KOMPAK untuk membangun sistem tata kelola yang lebih efektif.

Pangkajene, 24 Agustus 2021  
Bupati Pangkep,



H Muhammad Yusran Lalogau S.Pi, M.Si

# KATA PENGANTAR

Kelas Perahu merupakan pendekatan yang mencoba menjembatani antara realitas dan kebijakan pendidikan. Pendekatan ini merupakan solusi kreatif untuk jenis Pendidikan Layanan Khusus bagi sekelompok anak yang hidup di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep.

Sebelum layanan Kelas Perahu dimulai, pencegahan terhadap siswa putus sekolah sangat sulit diatasi khususnya di daerah kepulauan. Namun setelah uji coba model ini dan berhasil menurunkan angka putus sekolah dalam kurung waktu 2 tahun, maka disepakati agar model ini direplikasi ke kecamatan lainnya oleh Pemda Kab. Pangkep kerjasama dengan KOMPAK. Penguatan tata Kelola dilakukan melalui penguatan regulasi, pelibatan multi sektor yang dipimpin oleh Bappeda untuk koordinasi kebijakan dan Dinas Pendidikan untuk teknis pelaksanaannya, bahkan memastikan adanya alokasi anggaran secara reguler untuk mendukung replikasi, dan pengembangan mekanisme pelaksanaan Kelas Perahu dengan cakupan yang lebih luas mengacu pada buku panduan pelaksanaan.

Buku Panduan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu ini adalah revisi dari versi sebelumnya yang diterbitkan dengan dukungan KOMPAK pada tahun 2019. Revisi ini dilakukan untuk memasukkan pembelajaran berharga yang diperoleh selama masa replikasi dua tahun terakhir, terutama terkait dinamika tata kelola layanan Kelas Perahu. Seiring terjadinya suksesi kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Pangkep dari Bupati H. Syamsuddin A Hamid, SE., ke Bupati H. Muhammad Yusran Lalogau S.Pi., M.Si., revisi buku ini pun memuat dua kata sambutan untuk merefleksikan perubahan tata pemerintahan tersebut. Buku Panduan Pelaksanaan Kelas Perahu ini memberikan penjelasan tentang latar belakang geografis Pangkep, yang melahirkan model layanan pendidikan Kelas Perahu dan memaparkan proses pembelajaran yang terjadi di Kelas Perahu. Buku panduan ini bertujuan membantu semua pemangku kepentingan terkait mengembangkan model layanan Kelas Perahu di kecamatan lain di Kabupaten Pangkep. Juga, untuk kabupaten lain yang secara geografis memiliki kesamaan karakteristik baik dari segi wilayah kepulauan maupun konteks kehidupan masyarakat nelayan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan Panduan ini, khususnya kepada Konsulat Jenderal Australia di Makassar yang terlibat sejak inisiasi layanan Kelas Perahu di tahun 2016 dan Program INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia), program kemitraan Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia yang mendukung pengembangan LKS kontekstual. Semoga panduan ini menjadi acuan semua pihak berkepentingan untuk melakukan replikasi model layanan pendidikan Kelas Perahu di wilayah yang tepat.

Pangkajene, 29 Agustus 2019  
KOMPAK



Theodore Weohau  
Direktur Implementasi KOMPAK

# DAFTAR ISI

Sambutan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Periode 2010-2021) .....	ii
Sambutan Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Periode 2021-2026) .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Singkatan .....	ix
<b>BAGIAN 1: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan Panduan.....	1
1.2 Tujuan Penyusunan Panduan.....	1
1.3 Ruang Lingkup Panduan .....	2
<b>BAGIAN 2: KONSEP KUNCI .....</b>	<b>3</b>
2.1 Pendidikan Inklusif.....	3
2.2 Anak Bekerja dan Pekerja Anak .....	3
2.3 <i>Bridging Education</i> (Pendidikan Transisi) .....	6
2.4 Prinsip Tata Kelola yang Baik .....	6
<b>BAGIAN 3: LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN MODEL KELAS PERAHU .....</b>	<b>9</b>
3.1 Profil Wilayah dan Siswa Melaut.....	9
3.2 Inisiatif Pengembangan Model .....	13
3.3 Definisi dan Tujuan Pengembangan Model Kelas Perahu .....	14
3.4 Kegiatan Pengembangan Model Kelas Perahu .....	14
<b>BAGIAN 4: PELAKSANAAN REPLIKASI KELAS PERAHU.....</b>	<b>17</b>
4.1 Skema Replikasi Model Kelas Perahu .....	17
4.2 Alur Pelaksanaan Kelas Perahu pada Satuan Pendidikan .....	23
4.3 Tantangan Pelaksanaan Kelas Perahu .....	30
4.4 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pengembangan Kelas Perahu .....	32
<b>BAGIAN 5: PELEMBAGAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU.....</b>	<b>35</b>
5.1 Struktur Organisasi: Dukungan dari Berbagai Pihak.....	35
5.2 Tugas dan Peran Anggota Organisasi Kelas Perahu.....	37
5.3 Komponen Pembiayaan Pelaksanaan Kelas Perahu .....	38
5.4 Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa untuk Mendukung Layanan Pendidikan Kelas Perahu.....	40

<b>BAGIAN 6: MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU .....</b>	<b>43</b>
6.1 Teori Perubahan Penerapan Kelas Perahu.....	43
6.2 Indikator Keberhasilan.....	44
6.3 Pelaksanaan MONEV .....	49
<b>BAGIAN 7: DAMPAK PELAKSANAAN KELAS PERAHU .....</b>	<b>51</b>
Referensi .....	54
Lampiran-Lampiran .....	55
Lampiran I: Contoh LKS Siswa KP.....	56
Lampiran II: Format Identifikasi Siswa KP dan ABK .....	66
Lampiran III: Hasil Diskusi Kelompok Kegiatan Analisis Situasi Kelas Perahu dengan metode PMI ( <i>Plus Minus Interesting</i> ) (November 2018) .....	79
Lampiran IV: Format Penilaian K13 .....	81
Lampiran V: Kerangka Pengukuran Kinerja.....	84
Lampiran VI. Komponen Pembiayaan Kelas Perahu Kegiatan dalam Permendagri 90/2019 jo Kepmendagri 050/3708/2020.....	86
Lampiran VII. Biaya per Paket SBU Pangkep .....	91



# DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ketentuan Anak Bekerja vs Pekerja Anak.....	4
Tabel 2.	Karakteristik Pekerja Anak dan Strategi Pengurangan Dampak Negatif Pekerja Anak.....	5
Tabel 3.	Jumlah Siswa, Anak Putus Sekolah dan Jumlah Siswa Melaut Per Kecamatan Pendidikan Dasar.....	10
Tabel 4.	Data Siswa Kecamatan Kepulauan Kabupaten Pangkep Tahun Pelajaran 2020-2021.....	12
Tabel 5.	Langkah-langkah Penetapan Perbup KP.....	18
Tabel 6.	Daftar Pertanyaan untuk Memandu Pelaksanaan Monitoring Kelas Perahu.....	21
Tabel 7.	Kelebihan dan Kekurangan LKS.....	31
Tabel 8.	Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan dalam Struktur Tim Manajemen KP.....	37
Tabel 9.	Nama Kegiatan/Sub-Kegiatan sesuai Nomenklatur yang Dapat Digunakan untuk Mendukung Pendanaan Pelayanan Kelas Perahu melalui APBD Dinas Pendidikan.....	38
Tabel 10.	Contoh Ilustrasi Belanja Operasional pada APBD Dinas Pendidikan.....	39
Tabel 11.	Contoh Ilustrasi pada Belanja APBDesa (Permendagri 20/2018).....	40
Tabel 12.	Indikator Capaian <i>Outcome</i> /Target Pelaksanaan Kelas Perahu.....	46
Tabel 13.	Indikator Kompetensi Pendampingan Siswa KP.....	47
Tabel 14.	Indikator Kandungan Lokal Bahan Ajar.....	48
Tabel 15.	Indikator Kejelasan Langkah Pembelajaran Mandiri.....	48
Tabel 16.	Indikator Meningkatnya Dukungan Pemerintah Desa.....	49
Tabel 17.	Capaian Kelas Perahu dalam Menahan Anak Rentan di dalam Sistem Persekolahan.....	51

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Jumlah siswa melaut berdasarkan gender per kecamatan kepulauan.....	13
Grafik 2.	Proporsi gender Siswa Putus Sekolah Per Kecamatan.....	13
Grafik 3.	Rasio Jumlah Anak Melaut terhadap Jumlah Anak Putus Sekolah.....	14

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Gugus Kepulauan Spermonde, Tiga Sekolah Model Terletak di Pulau Sakuala dan Salemo.....	9
Gambar 2.	Siswa Kelas Perahu Belajar di Atas Perahu.....	10
Gambar 3.	Rukmini, Inovator Kelas Perahu bersama Siswa Melaut .....	13
Gambar 4.	Rakkang, Perangkap Rajungan .....	15
Gambar 5.	Tahapan Replikasi Kelas Perahu.....	17
Gambar 6.	Langkah-langkah Penulisan Buku Panduan Pelaksanaan.....	19
Gambar 7.	Alur Pelaksanaan Kelas Perahu di Sekolah.....	23
Gambar 8.	Pendataan Siswa Layanan Kelas Perahu .....	24
Gambar 9.	Menyesuaikan Waktu Siswa Melaut dengan Program Pembelajaran d Kelas Perahu .....	25
Gambar 10.	Guru Memberikan LKS Kepada Siswa dan Bimbingan Awal Sebelum Melaut .....	28
Gambar 11.	Siswa Mengerjakan LKS di Sela-Sela Melaut .....	28
Gambar 12.	Diagram Alur Pendampingan Siswa KP .....	29
Gambar 13.	Memberikan Penilaian dan Tindak Lanjut Hasil Belajar LKS Siswa .....	30
Gambar 14.	Struktur Organisasi Kelas Perahu .....	36
Gambar 15.	Rangkaian Teori Perubahan .....	43
Gambar 16.	Hubungan Hasil dan Keluaran .....	44

# DAFTAR SINGKATAN

<b>ABK</b>	Anak Berkebutuhan Khusus
<b>AnPS</b>	Anak Putus Sekolah
<b>APS</b>	Angka Partisipasi Sekolah
<b>APtS</b>	Angka Putus Sekolah
<b>BDT</b>	Basis Data Terpadu
<b>BLT</b>	Bantuan Langsung Tunai
<b>CSR</b>	<i>Corporate Social Responsibility</i>
<b>DAK Non-fisik</b>	Dana alokasi khusus Non-fisik
<b>Dapodik</b>	Data Pokok Pendidikan
<b>DID</b>	Dana Insentif Daerah
<b>Dispermasdes</b>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>DPA</b>	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
<b>DPMD</b>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
<b>EMIS</b>	<i>Education Management Information System</i>
<b>INOVASI</b>	<i>Innovation for Indonesia's School Children</i>
<b>KBM</b>	Kegiatan Belajar Mengajar
<b>KD</b>	Kompetensi Dasar
<b>KI</b>	Kompetensi Inti
<b>KIPP</b>	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
<b>KKG</b>	Kelompok Kerja Guru
<b>KKKS</b>	Kelompok Kerja Kepala Sekolah
<b>KOMPAK</b>	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
<b>KP</b>	Kelas Perahu
<b>LKS</b>	Lembar Kerja
<b>MA</b>	Madrasah Aliyah
<b>MI</b>	Madrasah Ibtidaiyah
<b>MTs</b>	Madrasah Tsanawiyah
<b>Musrenbang</b>	Musyawahar Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat
<b>Perbup</b>	Peraturan Bupati
<b>PGRI</b>	Persatuan Guru Republik Indonesia
<b>RKAS</b>	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
<b>RKJM</b>	Rencana Kerja Jangka Menengah
<b>RKP</b>	Rencana Kegiatan Pembelajaran RKAS
<b>RKPD</b>	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
<b>RPJMD</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
<b>SD</b>	Sekolah Dasar
<b>SIPD</b>	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
<b>SMA</b>	Sekolah Menengah Atas
<b>SMP</b>	Sekolah Menengah Pertama
<b>SPM</b>	Standar Pelayanan Minimal
<b>TAPEM</b>	Tata Pemerintahan
<b>TOT</b>	<i>Training of Trainer</i> (Pelatihan untuk Pelatih)



*Inovasi “Kelas Perahu” merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk semakin meningkatkan layanan publik di bidang pendidikan. Melalui inovasi ini Penuntasan Wajib Belajar 12 tahun dapat terlaksana dan Angka Partisipasi Sekolah meningkat. Inovasi ini telah berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pangkep menurunnya Angka Putus Sekolah terutama pada daerah kepulauan dan meningkatnya angka melanjutkan pendidikan dari semua tingkatan pendidikan.*

**(Bupati Pangkajene dan Kepulauan, H Muhammad Yusran Lalogau, S.Pi., M.Si.)**



*Salah satu bagian dari konsep Merdeka Belajar adalah belajar sesuai kebutuhan. Konsep Kelas Perahu bisa memberikan pengetahuan yang menjadi kebutuhan masyarakat di di daerah pesisir dan pulau, dengan metode yang relevan. Berkat keberhasilan pelaksanaan Kelas Perahu, ada beberapa daerah yang sudah melakukan studi banding ke Pangkajene dan Kepulauan.*

*Dinas Pendidikan tentu tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai keberhasilan tersebut. Harus ada kerja sama dengan semua sektor terutama aparat di tingkat desa atau kelurahan yang menjadi wilayah sasaran. Juga perlu ada dukungan dari pihak swasta, misalnya PT. Semen Tonasa. Dalam implementasi Kelas Perahu, Dinas Pendidikan, juga bekerja sama dengan OPD dan Bappeda, salah satunya untuk memastikan alokasi dana yang memadai.*

**(Kepala Dinas Pendidikan Pangkajene dan Kepulauan, Dr. Sabrun Jamil, S.Pi., MP)**



*Suatu saat, saya mengunjungi sekolah di pulau , saya mendapati siswa masih banyak di perahu saat pembelajaran berlangsung. Saya bertanya pada salah satu anak, “pukul berapa ke sekolah nak?” Orang tuanya menjawab, “Berhenti sekolah Bu, tidak ada yang bantu saya ketika melaut”. Kemudian saya bertanya ke gurunya, “Ada beberapa siswa berhenti sekolah karena melaut Bu?” Dari situ saya berpikir bagaimana kondisi seperti ini bisa diatasi? Data yang ada di empat kecamatan kepulauan, untuk APS berkisar 2% di SD dan 4% di SMP atau rata-rata 2% untuk APS pendidikan dasar, atau kurang lebih 52 siswa dari 2303 siswa di kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (data tahun 2017/2018). Sejak adanya Kelas Perahu sudah dapat diturunkan Sampai 1%. Saya berharap dapat mencapai 0 untuk angka putus sekolah.*

**(Rukmini-INOVATOR, Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan)**



## BAGIAN 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penyusunan Panduan

Inisiatif Kelas Perahu merupakan solusi untuk Pendidikan Layanan Khusus bagi sekelompok anak yang hidup di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Mereka adalah peserta didik yang melaut dengan menggunakan sistem belajar mandiri dengan orang tua atau keluarga membantu proses belajar menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media belajar utama. Kelas Perahu berfokus pada fleksibilitas waktu dan cara belajar siswa yang bisa tetap ikut kegiatan belajar menggunakan LKS yang telah disiapkan, baik secara mandiri atau didampingi keluarga atau teman.

Pelaksanaan inisiatif Kelas Perahu telah membantu Pemerintah Pangkep mencapai target menurunkan angka putus sekolah dari siswa melaut, dari 44% pada tahun 2015 dan turun menjadi 11% pada tahun 2021. Pendekatan ini tidak hanya dalam membantu siswa lebih percaya diri untuk kembali ke sekolah lagi setelah melaut, tapi sekaligus membantu para guru dalam mendorong kemauan belajar dan melakukan pendataan kemajuan hasil belajar siswa. Secara umum, terdapat kecenderungan orang tua menjadi lebih terdorong untuk bekerja sama dengan pihak guru dalam mengontrol dan mendampingi proses belajar siswa di sela-sela kegiatan melaut.

Pemerintah Kabupaten Pangkep mendukung strategi keberlanjutan layanan Kelas Perahu antara lain melalui (i) dukungan replikasi di 4 kecamatan kepulauan (Liukang Tupabbiring Utara, Liukang Tupabbiring, Liukang Kalmas, Liukang Tangaya), dan di 6 kecamatan pesisir serta 1 kecamatan pegunungan; (ii) pelatihan ToT bagi pengawas, kepala sekolah dan guru di empat kecamatan kepulauan dan pesisir; (iii) mengeluarkan Peraturan Bupati Pangkep No. 31/2019 tentang layanan Pendidikan Kelas Perahu dan; (iv) merevisi buku panduan pelaksanaan berdasarkan pengalaman tim pengelola replikasi; termasuk juga (v) menyediakan anggaran insentif bagi guru-guru yang melaksanakan pendampingan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pangkep.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Pangkep tersebut juga yang mendorong untuk membagikan pengalaman pengembangan model Kelas Perahu melalui pembuatan buku panduan pelaksanaan yang berguna untuk berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Provinsi, pemerintah kecamatan dan desa, serta Lembaga-lembaga Pendidikan dan lainnya yang memiliki masalah akses pendidikan dasar dan menengah di wilayah-wilayah kepulauan serta berupaya menurunkan jumlah anak putus sekolah.

## 1.2 Tujuan Penyusunan Panduan

Panduan pelaksanaan ini ditujukan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan fasilitator replikasi layanan Kelas Perahu dengan menyampaikan ringkasan tentang:

1. Pelaksanaan percontohan layanan pendidikan Kelas Perahu yang dirintis di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya model yang dikembangkan di tiga sekolah;
2. Praktik yang baik (promising practices) pengembangan layanan pendidikan Kelas Perahu di wilayah kepulauan;
3. Dasar acuan bagi semua pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan lain untuk mengembangkan model layanan pendidikan Kelas Perahu ke wilayah lain;

### 1.3 Ruang Lingkup Panduan

Panduan ini mencakup informasi terkait tahapan dan proses pengembangan dan pelaksanaan model layanan pendidikan Kelas Perahu. Ruang lingkup panduan terdiri dari enam bagian, sebagai berikut:

1. Bagian pertama adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang perlunya panduan untuk replikasi model layanan pendidikan Kelas Perahu, tujuan serta ruang lingkup panduan.
2. Bagian kedua berisi konsep kunci yang digunakan dalam panduan serta profil siswa Kelas Perahu.
3. Bagian ketiga membahas latar belakang pengembangan Kelas Perahu, dimulai dengan profil wilayah dan siswa Kelas Perahu dengan menyajikan analisis kondisi wilayah geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan. Bab ini juga memaparkan secara ringkas inisiatif awal, tujuan dan sejumlah kegiatan rintisan pengembangan model Kelas Perahu, antara lain: pendataan awal profil siswa, identifikasi siswa, pengembangan LKS, dan pendampingan siswa Kelas Perahu.
4. Bagian keempat menguraikan pelaksanaan replikasi dengan membahas delapan langkah replikasi model Kelas Perahu, yaitu: 1) penyusunan regulasi; 2) sosialisasi dan edukasi; 3) penyediaan buku panduan pelaksanaan; 4) peningkatan kapasitas tim fasilitator; 5) pelaksanaan Kelas Perahu di satuan pendidikan; 6) penyusunan instrumen monitoring bersama para pihak; 7) advokasi anggaran; dan 8) monitoring layanan Kelas Perahu. Selanjutnya, bagian ini juga memaparkan alur pelaksanaan Kelas Perahu pada satuan pendidikan dengan aktivitas sebagai berikut: identifikasi siswa, penyesuaian kurikulum dan penilaian, sosialisasi, penyusunan LKS dan bahan ajar, penyesuaian strategi pembelajaran dengan lingkungan anak, serta penilaian hasil belajar anak. Bagian Empat ditutup dengan diskusi tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan Kelas Perahu, serta tantangan pembelajaran dan penilaian.
5. Bagian kelima memaparkan kelembagaan layanan pendidikan Kelas Perahu, terkait struktur organisasi, tugas dan peran anggota Organisasi Kelas Perahu, komponen pembiayaan Kelas Perahu, serta tata kelola pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung layanan pendidikan Kelas Perahu.
6. Bagian keenam menjabarkan tahap monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan Kelas Perahu, serta memuat instrumen yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
7. Bagian ketujuh menyajikan dampak pelaksanaan Kelas Perahu di sekolah, dan pada aspek tata kelola pencegahan ATS di Kabupaten Pangkep.

## BAGIAN 2

# KONSEP KUNCI

## 2.1 Pendidikan Inklusif

Teori tentang kecerdasan ganda (Gardner, 2006) menimbulkan tiga implikasi serius untuk sektor pendidikan yaitu (i) mendesaknya pendekatan belajar berpusat pada anak – *student centered learning approach*, (ii) Penentuan prioritas tujuan pendidikan sesuai dengan kecerdasan ganda yang dimiliki anak dan (iii) penggunaan beberapa pendekatan pembelajaran dari topik atau tema dalam kurikulum (konsep-konsep kunci).

Selain cara belajar yang banyak dipengaruhi oleh kecerdasan ganda, terdapat faktor-faktor lain seperti konstruksi sosial, budaya dan kebijakan pendidikan. Interaksi kompleks atas berbagai faktor tersebut menuntut formulasi tujuan pendidikan yang seimbang di antara faktor-faktor tersebut agar setiap upaya (inovasi pendidikan) yang dilaksanakan relevan dan efektif.

Kemampuan siswa memahami prinsip-prinsip pengetahuan (kecakapan) pada hakekatnya jauh lebih penting daripada pencapaian siswa dalam sistem penilaian apapun. Karena pemahaman prinsip-prinsip pengetahuan merupakan dasar bagi siswa untuk mengembangkan diri sepanjang hidupnya (*learning to learn*, Gardner 2006). Di dalam sistem pendidikan yang menekankan penguasaan prinsip-prinsip pengetahuan sekalipun, siswa hanya dapat meraihnya jika pendidik fokus pada sejumlah konsep yang mampu diampu dan melakukan eksplorasi secara mendalam. Hal ini menuntut terselenggaranya layanan pendidikan yang inklusif dan mampu menyeimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan pemerintah dan masyarakat (*supply*) dan kebutuhan layanan (*demand*) serta faktor pendukung dan atau penghambat dalam aspek budaya, ekonomi, dan sosial. Karena aktivitas sosial ekonominya, siswa yang dilayani dalam kelas perahu membutuhkan metode dan bahan ajar yang berbeda dengan teman sebayanya yang berfokus pada pendekatan pendidikan inklusif yang memungkinkan mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sejalan dengan kegiatan melautnya.

## 2.2 Anak Bekerja dan Pekerja Anak

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak termasuk anak. Permasalahan dalam dunia Pendidikan anak adalah kondisi lingkungan yang masih kurang mendukung untuk mereka bisa melanjutkan Pendidikan baik dari lingkungan keluarga, sekolah, bahkan lingkungan yang lebih besar seperti negara sebagai pemangku kepentingan. Salah satu kondisi yang sering dialami oleh anak adalah fungsi anak yang juga harus terlibat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tentunya bekerja tidak selalu berkonotasi negatif bagi anak, jika pekerjaan yang diampu anak ringan dan tidak mengganggu kesehatan dan tahap tumbuh kembang anak, bahkan bekerja bisa menyehatkan dan mendorong pembentukan karakter. Kondisi ini disebut dengan istilah anak bekerja.

Namun sebaliknya apabila pekerjaan yang diampu anak berat dan atau berlebihan dan mengganggu kesehatan dan tahap tumbuh kembang anak maka bekerja dapat berkonotasi negatif bahkan berbahaya. Kondisi pekerjaan yang berat dan mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak ini disebut dengan istilah pekerja anak (ILO 2018). Lalu bagaimana cara menentukan apakah anak bekerja atau pekerja anak? Tabel 1 menyajikan ketentuan untuk masing-masing istilah (anak bekerja dan pekerja anak) sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.

Tabel 1. **Ketentuan Anak Bekerja vs Pekerja Anak**

Anak Bekerja	Pekerja Anak
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pekerjaan ringan untuk anak usia di atas 13 tahun (maksimum 15 jam/minggu)</li> <li>▪ Tidak membahayakan kesehatan dan tumbuh kembang anak</li> <li>▪ Menyumbang atau setidaknya menghambat pendidikan/ pelatihan kecakapan</li> <li>▪ Lingkungan kerja tidak berbahaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bekerja secara teratur melebihi 40 jam/minggu untuk anak usia 15-17, atau 15 jam/minggu untuk anak usia di bawah 15</li> <li>▪ Membahayakan mental dan fisik anak</li> <li>▪ Menghalangi proses pendidikan dan mental dan atau tumbuh kembang</li> <li>▪ Lingkungan kerja berbahaya</li> </ul>

Melihat ketentuan tersebut perlu dipertimbangkan klasifikasi penentuan apakah anak-anak yang mendapat layanan pendidikan kelas perahu masuk kategori Anak Bekerja atau Pekerja Anak. Pekerja anak cenderung berasal dari keluarga miskin atau kelompok marginal (ILO, 2011) dan memiliki pendidikan formal yang rendah. Pada umumnya pekerja anak memiliki kecakapan akademik yang rendah, namun pekerja anak bisa lebih bijaksana dan memiliki kecakapan khusus yang didapat dari tempat atau lingkungan mereka bekerja.

Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menemukan cara yang kreatif dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran karena pekerja anak mengalami dampak negatif dalam pekerjaan mereka dan menjadi tantangan (ILO, 2011). Tantangan tersebut antara lain:

- Pekerja anak (terlebih anak yang ikut serta kelas perahu) dalam kasus pulau terluar seperti Kepulauan di Kecamatan Kalukuang Masalima bekerja melebihi ketentuan dalam definisi dan aturan. Ditambah lagi saat pekerja anak selesai melaut masih terlibat aktivitas bekerja dalam lingkungan keluarga (domestik) sehingga hanya memiliki waktu sedikit untuk mengerjakan hal lain (sekolah, pelatihan, bermain, dst).
- Pekerja anak memiliki kebebasan yang terbatas, khususnya ketika anak bekerja untuk orang lain (Punggawa-Sawi). Karena mereka terikat memenuhi target waktu dan hasil yang dibebankan oleh pemberi kerja.
- Orang tua bisa menjadi faktor penghambat apabila memiliki pikiran bahwa bersekolah (dan atau pelatihan) hanya buang waktu dan mengurangi pendapatan mereka.

Pekerja anak mengalami dampak negatif pada kesehatan, tumbuh kembang, kepribadian dan percaya diri. Dampak negatif ini bisa bertahan lama hingga masa dewasa mereka. Tabel 2 berikut (ILO, 2011) menjelaskan secara lengkap karakteristik pekerja anak dan pilihan atau strategi kebijakan yang diperlukan (kurikulum, metode belajar, sistem penilaian, dst) untuk mengakomodasi kebutuhan pekerja anak dan mengurangi dampak negatifnya.



Tabel 2. Karakteristik Pekerja Anak &amp; Strategi Pengurangan Dampak Negatif Pekerja Anak

Faktor	Karakteristik Pekerja Anak	Peluang penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan sesuai karakteristik anak
Fisik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki tingkat kesehatan yang rendah dan kemungkinan trauma</li> <li>▪ Kelelahan fisik yang berlebihan</li> <li>▪ Menghambat pertumbuhan</li> <li>▪ Berpotensi sebagai korban eksploitasi pekerja dan sex</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bekerja sama dengan layanan/pekerja medis (Puskesmas) untuk memeriksa kondisi kesehatan anak secara teratur.</li> <li>▪ Memasukkan kegiatan olahraga, permainan dan rekreasi ke dalam program pembelajaran.</li> <li>▪ Pemberian makanan tambahan saat anak masuk sekolah.</li> </ul>
Kognitif/ Mental	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memiliki kreativitas rendah</li> <li>▪ Memiliki kecakapan kognitif dan analisis yang rendah</li> <li>▪ Kelelahan mental</li> <li>▪ Pertumbuhan kognitif yang terhambat/terlambat</li> <li>▪ Kecakapan berkomunikasi yang kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penghargaan terhadap kecakapan yang diperoleh saat bekerja</li> <li>▪ Menstimulasi kreativitas anak dengan menyediakan berbagai metode/kegiatan belajar yang berkesesuaian dengan kebutuhan anak</li> <li>▪ Alokasikan lebih banyak waktu kerja kelompok dan mendorong bantuan teman sebaya (yang bukan ikut bekerja)</li> <li>▪ Menyediakan waktu/program khusus (<i>bridging course</i>) sebelum anak mulai masuk kelas (sekolah) dan menyediakan materi dan tutorial yang memadai untuk mengembangkan kecakapan menulis dan berkomunikasi</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengucilan sosial dan kekurangan kecakapan sosial</li> <li>▪ Konstruksi sosial pembagian tugas tertentu pada jenis kelamin tertentu</li> <li>▪ Peluang untuk berkenalan dengan aktivitas anti sosial seperti obat-obatan dan narkoba, dan perilaku yang belum sesuai dengan usia (minum alkohol, sex dan judi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fokus pada pengembangan kecakapan hidup termasuk kecakapan pribadi dan sosial seperti kerjasama dalam tim (lebih dikenal dengan istilah <i>soft skills</i> atau <i>transferable skills</i>)</li> <li>▪ Menyelenggarakan sosialisasi atau kegiatan lain untuk meningkatkan persamaan gender dan persamaan hak baik laki-laki maupun perempuan dalam mengakses pendidikan.</li> <li>▪ Meningkatkan peran serta siswa dalam pembelajaran (kegiatan) di luar pembagian tugas tradisional laki-laki dan perempuan.</li> <li>▪ Mendorong keterlibatan anak dalam berbagai kegiatan sosial seperti ekskul, olahraga dan kegiatan kelompok masyarakat (misalnya bersih desa).</li> </ul>
Emosional	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rasa percaya diri dan harga diri yang rendah</li> <li>▪ Mengalami stress dan depresi</li> <li>▪ Perasaan terisolasi (tersingkir) dan tidak berdaya.</li> <li>▪ Emosi yang tidak stabil berpotensi pada menyakiti diri sendiri</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyediakan waktu/kesempatan untuk siswa baik secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan konsultasi khusus dengan guru BK atau guru kelas.</li> <li>▪ Mendorong penggunaan kerja sama dalam kelompok dan dukungan teman sebaya.</li> <li>▪ Menggunakan berbagai metode belajar dan stimulasi untuk tetap menjaga ketertarikan anak untuk sekolah.</li> <li>▪ Fokus pada kegiatan belajar yang dapat menggunakan/ memanfaatkan pengalaman kerja mereka dan mengakui atau menghargai kecakapan yang mereka peroleh selama bekerja (di luar kelas).</li> </ul>
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kesulitan membayar biaya tidak langsung</li> <li>▪ Keterbatasan dukungan belajar di rumah (pendamping, listrik, dsb)</li> <li>▪ Tidak cukup waktu untuk mengerjakan PR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memastikan bahan ajar terjangkau khususnya untuk anak yang bekerja</li> <li>▪ Bekerja sama dengan Dinas Sosial atau lainnya agar orang tua mendapatkan dukungan yang dibutuhkan</li> <li>▪ Sediakan cukup waktu baik sebelum dan sesudah jam belajar, jika memungkinkan bantuan untuk mengerjakan PR</li> </ul>

Dalam pelaksanaan layanan Pendidikan Kelas Perahu, khususnya pada fase replikasi, sangat diharapkan untuk juga memperhatikan strategi pengurangan dampak negatif untuk anak yang harus bekerja sesuai dengan faktor-faktor yang dikelompokkan. Misalnya pada kondisi layanan Pendidikan Kelas Perahu, dimana faktor ekonomi menjadi alasan paling sering sehingga anak harus ikut melaut, maka pihak sekolah dan orang tua perlu memperhatikan agar proses pembelajaran di rumah dan di sekolah juga mendapat perhatian. Adanya LKS yang disediakan oleh pihak sekolah termasuk bahan bacaan yang diperbanyak untuk siswa yang melaut merupakan solusi yang terbaik sehingga siswa tetap dapat mengikuti pelajaran dan tidak harus mengeluarkan dana tambahan untuk dia bisa mendapatkan LKS. Partisipasi orang tua dapat dilakukan dengan memberikan motivasi kepada anak yang ikut melaut untuk mengerjakan LKS yang mereka bawa saat melaut, baik diselesaikan saat di kapal atau di rumah.

## 2.3 Bridging Education (Pendidikan Transisi)

Anak bekerja dan atau pekerja anak ketika melaut dalam waktu lama memiliki waktu senggang terbatas, sehingga peluang siswa Kelas Perahu untuk tidak mengerjakan LKS (belajar) sangat tinggi. Untuk itu sekolah (guru dan Kepsek) wajib memberikan bimbingan tambahan dengan menambah jam pendampingan baik di sekolah maupun di rumah siswa Kelas Perahu. Kegiatan bimbingan tambahan ini tidak semata-mata untuk menutup celah pencapaian belajar siswa Kelas Perahu dengan reguler tetapi juga untuk memahami tantangan belajar siswa Kelas Perahu agar guru dapat menyesuaikan lebih lanjut konten LKS dan metode belajar yang lebih sesuai lagi.

Selain semacam "*warming up*" untuk kembali ke kelas reguler, kegiatan *bridging education* juga dapat dikombinasikan dengan pemberian kecakapan non-akademik seperti kecakapan membaca dan menulis untuk memperlengkapi mereka dengan kebiasaan belajar. Kecakapan non-akademik lain yang esensial untuk pekerja anak meliputi kecakapan belajar untuk belajar (*learning to learn*), kepemimpinan dan kerjasama dalam kelompok, komunikasi efektif secara lisan dan tertulis dan memecahkan masalah.

Kegiatan *bridging education* dilaksanakan pada saat sebelum siswa kelas perahu berangkat melaut dan pada saat siswa kelas perahu kembali dari melaut. Masa *bridging education* juga dapat dikombinasikan dengan berbagai permainan dan kompetisi untuk memotivasi dan meningkatkan minat belajar siswa Kelas Perahu.

## 2.4 Prinsip Tata Kelola yang Baik

Peran tata kelola yang baik (*good governance*) merupakan bagian sehati dari upaya negara menjamin kesejahteraan masyarakat. World Bank mengartikan *governance* sebagai cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat. Sedangkan UNDP (*United Nations Development Programme*) mengartikan *governance* sebagai penggunaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.<sup>1</sup> Senada dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil merumuskannya sebagai pemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam penerapannya, UNDP mengidentifikasi delapan prinsip *good governance* yakni: kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan; ketanggapan atas kebutuhan pemangku kepentingan (*responsiveness*); kemampuan memediasi perbedaan di antara pemangku kepentingan untuk mencapai konsensus bersama, akuntabilitas kepada pemangku kepentingan yang dilayani; transparansi dalam proses pengambilan kebijakan; aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum; memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang

<sup>1</sup> [https://ilmu.lpkn.id/2021/01/28/good-governance-definisi-dan-fungsinya-dalam-sistem-pemerintahan/#\\_ftn2](https://ilmu.lpkn.id/2021/01/28/good-governance-definisi-dan-fungsinya-dalam-sistem-pemerintahan/#_ftn2)

menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi; dan jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

Dalam konteks intervensi KOMPAK untuk pengembangan dan replikasi layanan Kelas Perahu, pengejawantahan keempat prinsip berikut menjadi faktor kunci membangun tata kelola yang baik. Keempat prinsip tersebut adalah (1) regulasi, adanya jaminan kepastian hukum, sehingga kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur; (2) responsif, kepekaan pemerintah merespon kebutuhan masyarakat; (3) efektivitas dan efisiensi, adanya hasil dari proses dan lembaga yang terlibat sesuai target dengan menggunakan sumber daya yang tersedia; (4) berorientasi pada konsensus; dan transparansi. Sebagaimana dibahas lebih rinci dalam panduan ini selanjutnya, penguatan tata kelola Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep dibangun dengan memastikan adanya regulasi yang memastikan jenjang skala kewenangan dari kabupaten hingga ke tingkat desa. Regulasi ini juga mendorong adanya kepastian anggaran, terutama melalui APBD, DID dan dana CSR.



*Nama saya Nurazizah berusia 10 tahun, saya tinggal di Pulau Sakuala, bapak saya bernama Beddu, pekerjaan bapak saya nelayan. Saya bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 23 Sakuala dan duduk di bangku kelas 5. Saya sering membantu ayah saya melaut, sehingga saya tidak dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya seperti teman-teman saya yang lain yang tidak membantu bapaknya pergi melaut. Banyak tugas maupun pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru yang tidak saya kerjakan, sehingga nilaiku rendah. Kadang-kadang guru saya datang ke rumah memanggil untuk masuk belajar di sekolah, tetapi bapakku selalu melarang karena tidak ada yang menemani pergi melaut.*

*Siang itu guruku datang ke rumah bertemu dengan orang tuaku, kemudian memberitahukan bahwa aku bisa tetap sekolah dan membantu bapak di Kelas Perahu. Awalnya orang tuaku tetap melarangku sekolah, tapi lama-kelamaan setelah guruku datang beberapa kali ke rumah, orang tuaku akhirnya mengizinkan aku sekolah lagi. Akhirnya guruku memberikan lembar kerja untuk saya kerjakan apabila saya pergi melaut.*

*Alhamdulillah dengan adanya layanan pendidikan Kelas Perahu ini, pelajaran saya sudah tidak ketinggalan lagi, dan nilaiku juga sudah tidak jelek lagi. Mudah-mudahan layanan pendidikan Kelas Perahu dapat membantu teman-teman yang lain yang materi pelajarannya terlambat karena membantu orang tuanya pergi melaut seperti saya.*

**(NURAZIZAH -10 Thn, Siswa SD Negeri 23 Pulau Sakuala)**



*Saya bernama Beddu berusia sekitar 55 tahun, saya adalah penduduk asli Pulau Sakuala yang bermata pencaharian sebagai nelayan pencari ikan dan kepiting. Kehidupan kami sekeluarga hidup pas-pasan sehingga perlu tambahan ekonomi. Untuk membantu saya melaut memerlukan tambahan tenaga agar hasil yang kami dapatkan bertambah dan dapat menghidupi keluarga kami. Maka saya memilih salah seorang anak saya untuk membantu saya melaut, pilihan saya jatuh pada Nurazizah karena bakatnya sudah tampak sejak kecil senang pada laut.*

*Pada awalnya saya bingung melihat keadaan anak saya dalam hal pendidikan apakah tetap bersekolah atau harus putus sekolah, karena keinginan saya sebagai orang tua mau melihat anak saya berhasil dalam pendidikannya. Saya merasa senang dan bangga atas hadirnya layanan pendidikan Kelas Perahu karena sambil bersekolah tetap dapat membantu orang tua mencari nafkah untuk kelanjutan kehidupan keluarga. Sukses untuk Kelas Perahu.*

**(BEDDU-55 Thn, Orang tua Nurazizah)**



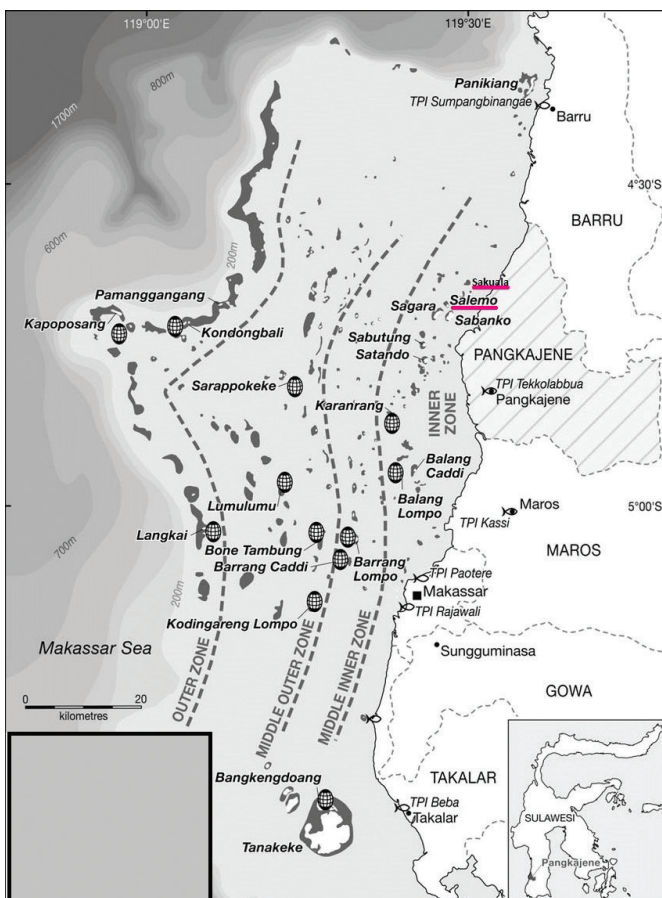
## BAGIAN 3

# LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN MODEL KELAS PERAHU

### 3.1 Profil Wilayah dan Siswa Melaut

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari kepulauan dan pegunungan. Dari 13 kecamatan terdapat 2 kecamatan pegunungan, 7 kecamatan daratan dan 4 kecamatan kepulauan, dengan jumlah pulau sebanyak 115 yang tersebar dalam gugusan Kepulauan Spermonde (lihat gambar 1). Luas keseluruhan Kabupaten adalah 12.362 km<sup>2</sup> dengan perincian luas daratan 898 km<sup>2</sup> dan laut 11.464 km<sup>2</sup> yang berarti wilayah laut lebih besar daripada wilayah daratan.<sup>2</sup>

Gambar 1. Gugus Kepulauan Spermonde, Tiga Sekolah Model Terletak di Pulau Sakuala dan Salemo



Keterangan: Peta disadur dari Jurnal Ocean and Coastal Management 116 (2015) 193-213 halaman 195 ([www.elsevier.com/locate/ocecoaman](http://www.elsevier.com/locate/ocecoaman))

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pangkajene\\_dan\\_Kepulauan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan)

Penduduk yang mendiami daerah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan umumnya memiliki mata pencaharian nelayan. Orang tua saat melaut mengikut sertakan anak-anaknya untuk membantu pekerjaan melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

Keterlibatan anak melaut ini, membuat mereka harus meninggalkan pembelajaran di sekolah yang waktunya bersamaan dengan jam belajar sehingga lambat laun membuat mereka malu atau enggan untuk masuk sekolah kembali. Selanjutnya karena tidak pernah datang ke sekolah lagi, anak-anak yang melaut memiliki potensi tinggi untuk putus sekolah.

Gambar 2. Siswa Kelas Perahu Belajar di Atas Perahu



Keempat kecamatan kepulauan memiliki total siswa sebanyak 12.541 siswa (lihat Tabel 3) pada jenjang pendidikan dasar dan jumlah siswa perempuan lebih banyak daripada laki-laki yaitu sekitar 55% pada tahun ajaran 2018/2019, di Liukang Tupabbiring Utara bahkan mencapai 60%. Dari sisi partisipasi sekolah kesenjangan gender justru terjadi pada laki- laki, hal ini berlawanan dengan tren global (dunia). Kesenjangan gender ini dapat pula dijelaskan dengan dominannya anak laki-laki sebagai pekerja anak (melaut), karena ada persepsi dalam masyarakat bahwa anak laki-laki lebih kuat dalam bekerja. Namun jika dalam keluarga tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan juga diajak bekerja oleh orang tua.

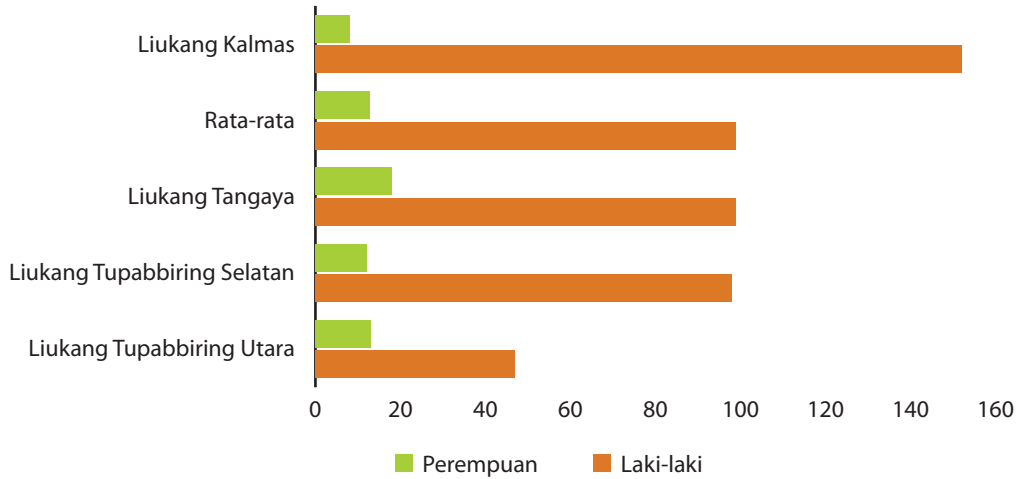
Tabel 3. Jumlah Siswa, Anak Putus Sekolah dan Jumlah Siswa Melaut Per Kecamatan Pendidikan Dasar

Kecamatan / Jenis Kelamin	Jumlah Siswa	Jumlah Siswa Melaut	Jumlah Siswa Putus Sekolah	Jumlah Siswa Putus Sekolah Karena Melaut
<b>Liukang Kalmas</b>	<b>3,013</b>	<b>160</b>	<b>59</b>	<b>28</b>
Laki-laki	1,416	152	49	26
Perempuan	1,597	8	10	2
<b>Liukang Tangaya</b>	<b>4,235</b>	<b>117</b>	<b>63</b>	<b>36</b>
Laki-laki	1,942	99	55	30
Perempuan	2,293	18	8	6
<b>Liukang Tupabbiring Utara</b>	<b>2,384</b>	<b>60</b>	<b>69</b>	<b>36</b>
Laki-laki	953	47	52	33
Perempuan	1,431	13	17	3
<b>Liukang Tupabbiring Selatan</b>	<b>2,909</b>	<b>110</b>	<b>79</b>	<b>42</b>
Laki-laki	1,312	98	62	42
Perempuan	1,597	12	17	0
<b>Total Kecamatan Kepulauan</b>	<b>12.541</b>	<b>447</b>	<b>270</b>	<b>142</b>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

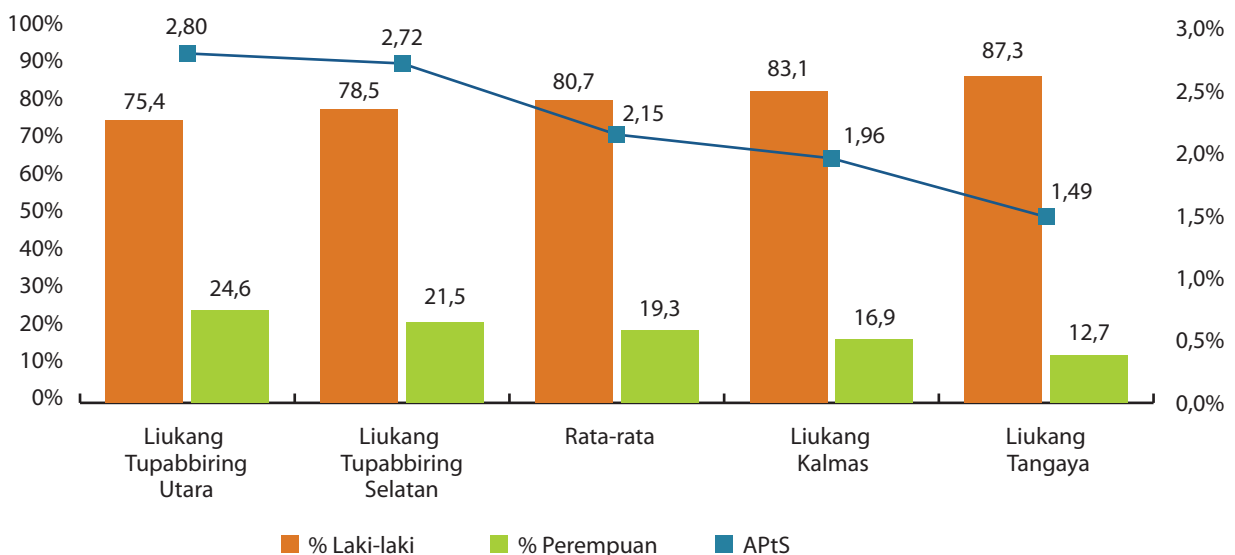
Siswa yang melaut total di empat kecamatan adalah 447 anak atau 3,56%. Grafik 1 memperlihatkan jumlah siswa melaut per kecamatan kepulauan berdasarkan gender. Sebagian besar anak melaut adalah laki-laki dan jumlah anak melaut laki-laki tertinggi terjadi di Liukang Kalmas sekaligus jumlah anak melaut perempuan terendah. Sedangkan jumlah siswa melaut terendah terjadi di Liukang Tupabbiring Utara. Sedangkan nilai rata-rata siswa perempuan melaut 12,7 anak sedangkan rata-rata siswa laki-laki melaut 99 anak.

Grafik 1. Jumlah Siswa Melaut Berdasarkan Gender Per Kecamatan Kepulauan



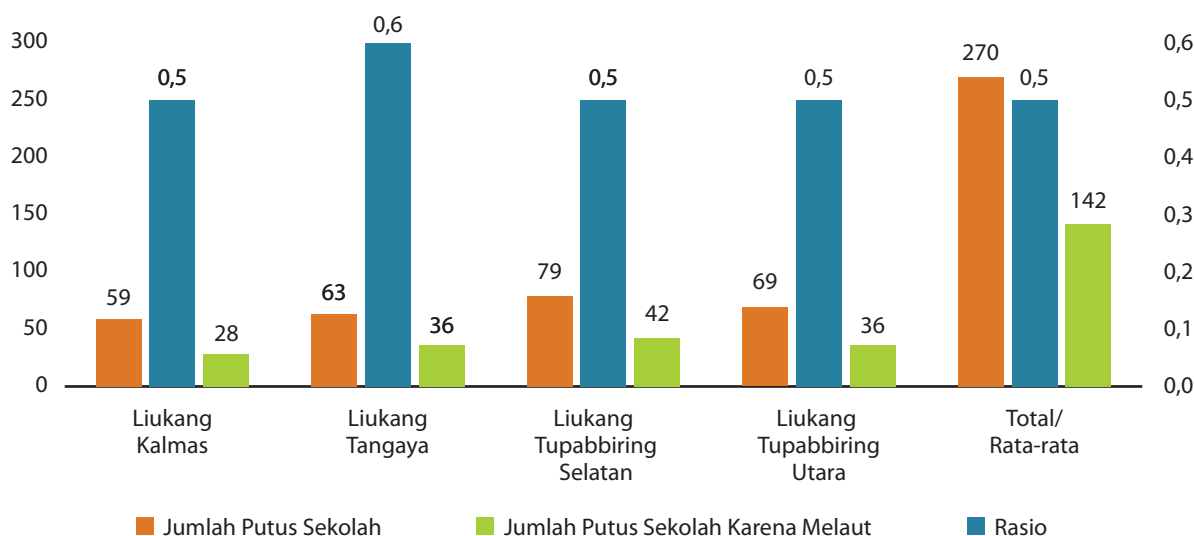
Rata-rata APtS di empat kecamatan sekitar 2,15%, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara memiliki APtS tertinggi dengan 2,89% dan terendah di Liukang Tangaya dengan 1,49%. Grafik 2 menyajikan proporsi gender jumlah siswa putus dan APtS per Kecamatan. Nampak bahwa proporsi laki-laki dominan di semua kecamatan dengan rata-rata 80,7% adalah siswa laki-laki yang putus sekolah dan 19,3% adalah siswa perempuan. Hasil proporsi gender ini semakin mendukung bahwa anak laki-laki mendominasi siswa yang putus sekolah.

Grafik 2. Proporsi Gender Siswa Putus Sekolah Per Kecamatan



Grafik 3 memperlihatkan rasio jumlah anak putus sekolah karena melaut terhadap jumlah anak putus sekolah. Total di empat kecamatan rata-rata rasio adalah 0,5 artinya separuh siswa putus sekolah disebabkan karena melaut. Masih terdapat 50% anak putus sekolah yang belum diketahui sebabnya.

Grafik 3. Rasio Jumlah Anak Melaut terhadap Jumlah Anak Putus Sekolah



Tabel berikut menunjukkan jumlah siswa melaut tahun 2020 berdasarkan gender dan lokasi. Data menunjukkan jumlah siswa SMP yang melaut rata-rata lebih tinggi dari siswa SD, terutama bagi anak laki-laki. Ini bisa jadi berarti anak yang berusia lebih tua dinilai lebih siap secara fisik membantu orang tuanya melaut. Walhasil, karena tuntutan ekonomi, sebagian keluarga memilih mengajak anak mereka ikut membantu mencari nafkah, daripada pergi ke sekolah.

Tabel 4. Data Siswa Kecamatan Kepulauan Kabupaten Pangkep Tahun Pelajaran 2020-2021

Kecamatan	Jenjang Pendidikan	Siswa			Siswa yang Melaut		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Liukang Tupabbiring Utara	SD	842	696	1.538	69	4	73
	SMP	228	305	533	88	0	88
	SD + SMP	1.070	1.001	2.071	157	4	161
Liukang Tupabbiring	SD	1.048	999	2.047	80	0	80
	SMP	374	393	767	101	0	101
	SD + SMP	1.422	1.392	2.814	181	0	181
Liukang Kalmas	SD	1.044	956	2.000	57	0	57
	SMP	399	443	842	124	2	126
	SD + SMP	1.443	1.399	2.842	181	2	183
Liukang Tangaya	SD	1.485	1.347	2.832	82	2	84
	SMP	490	545	1.035	74	0	74
	SD + SMP	1.975	1.892	3.867	156	2	158
<b>Total</b>	SD	<b>4.419</b>	<b>3.998</b>	<b>8.417</b>	<b>288</b>	<b>6</b>	<b>294</b>
	SMP	<b>1.491</b>	<b>1.686</b>	<b>3.177</b>	<b>387</b>	<b>2</b>	<b>389</b>
	SD + SMP	<b>5.910</b>	<b>5.684</b>	<b>11.594</b>	<b>675</b>	<b>8</b>	<b>683</b>



### 3.2 Inisiatif Pengembangan Model

Pencetus awal pendekatan layanan pendidikan Kelas Perahu adalah staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep yang mengikuti Diklat Kepemimpinan IV yang menugaskan peserta membuat proyek perubahan sesuai bidang tugasnya. Beliau disebut inovator karena menjadi pencetus awal untuk dilakukannya bentuk pendekatan layanan Pendidikan Kelas Perahu tersebut. Inovator Kelas Perahu kemudian memilih mengembangkan solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan pendidikan di kepulauan terutama karena tingginya siswa yang berhenti ke sekolah. Inovator membentuk tim kerja yang berasal dari Dinas Pendidikan Kab. Pangkep bekerjasama dengan Dewan Pendidikan, Pengawas, serta guru dan kepala sekolah di sekolah pilot.

Layanan ini selanjutnya disebut dengan Layanan Pendidikan Kelas Perahu yang lebih populer dengan sebutan kelas perahu. Disebut kelas perahu bukan semata-mata *branding* untuk popularitas namun hal ini terkait erat dengan tempat belajar atau kelas siswa yang sesungguhnya yaitu di atas perahu atau kapal dan atau bagan.

**Gambar 3. Rukmini, Inovator Kelas Perahu Bersama Siswa Melaut**



Layanan Pendidikan Kelas Perahu dikembangkan oleh inovator pertama kali di salah satu kecamatan kepulauan yaitu Liukang Tupabbiring Utara di tiga sekolah yaitu: (i) SDN 4 Salemo; (ii) SMP PGRI Salemo dan (iii) SDN 23 Sakuala. Penentuan sekolah mempertimbangkan kemudahan akses dan keterbukaan untuk kerja sama dengan Kepala dan Komite Sekolah.

Kelas Perahu diluncurkan pada 8 November 2016 di dua sekolah di Pulau Salemo, yaitu SDN 4 Salemo dan SMP PGRI, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Acara peluncuran dihadiri Konsulat Jenderal Australia di Makassar, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) LAN di Makassar, Yayasan Bhakti, penerbit buku, media (TVRI, koran), dan Pemerintah Kabupaten Pangkep (Bupati diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep). Setelah dicoba di dua sekolah tersebut di Pulau Salemo, selanjutnya konsep Kelas Perahu dikembangkan pula di SDN 23 Sakuala di Pulau Sakuala.

Media LKS dipilih karena lebih praktis untuk digunakan siswa, lebih mudah dibuat guru, dan tidak membutuhkan banyak waktu siswa dan guru. Selain petunjuk cara belajar mandiri, guru atau kepala sekolah dapat memberikan

*Ide atau konsep dalam penerapan Kelas Perahu merujuk pada proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) yang tidak dapat berjalan sepenuhnya dengan metode tatap muka pada jam tertentu. Karena itu, disusun LKS sebagai pengganti, disertai petunjuk cara belajar mandiri melalui pelatihan pengembangan LKS.*

bimbingan kepada siswa Kelas Perahu dan memberikan konsultasi dengan orang tua atau pendamping (orang yang bertanggung jawab selama melaut) dalam mendukung belajar siswa di atas perahu atau kapal. Dalam kompetensi tertentu, orang tua dan pendamping dapat menjadi narasumber dan penilai dalam pembelajaran di atas perahu atau kapal. Peran orang tua dan pendamping tersebut akan sangat esensial dalam memotivasi dan memfasilitasi proses belajar selama melaut. Pada tahun 2016-2017, LKS yang dilatihkan adalah berdasarkan KTSP dan kurikulum 2013 (K-13). Maka mulai tahun 2018, secara serentak semua sekolah mendapat latihan dengan menggunakan LKS berdasarkan kurikulum 2013.

Pelatihan pengembangan LKS kepada kepala sekolah berdasarkan KTSP dan K-13, diselenggarakan pada tahun 2017 dengan menggunakan dana dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar melalui IKAMA (Ikatan Alumni Mahasiswa Australia). Selanjutnya sejak 2018, hasil yang sangat baik, yang terlihat dari penurunan angka anak putus sekolah di wilayah percontohan, mendorong Dinas Pendidikan menggalang dukungan dari lebih banyak pihak agar pelaksanaan Kelas Perahu bisa lebih meluas.

Dukungan dari KOMPAK dimulai sejak 2017 dengan mendorong agar inovasi ini bisa lebih luas diketahui banyak pihak dan berdampak bukan saja di Kabupaten Pangkep tetapi juga sampai ke tingkat provinsi dan nasional. KOMPAK memfasilitasi dan mendampingi penguatan tata kelola pelaksanaan layanan Pendidikan Kelas Perahu yang merupakan sebagai salah satu langkah strategis untuk penanganan anak tidak sekolah dan hal ini adalah fokus isu pendidikan yang difasilitasi oleh KOMPAK.

### 3.3 Definisi dan Tujuan Pengembangan Model Kelas Perahu

Kelas Perahu didefinisikan sebagai sebuah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang melaut dengan sistem belajar mandiri dan dibantu oleh orang tua atau keluarga lainnya menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) sebagai media belajar utama.

Adapun tujuan dari layanan pendidikan Kelas Perahu adalah:

- Memberikan layanan khusus kepada anak bekerja dan atau pekerja anak agar tetap dapat mengakses pendidikan berkualitas di luar dan di dalam kelas
- Mencegah anak putus sekolah di daerah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Meningkatkan partisipasi sekolah di daerah kepulauan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada jenjang SD, SMP dan SMA dan sederajat

### 3.4 Kegiatan Pengembangan Model Kelas Perahu

#### 3.4.1 Pendataan Awal Profil Siswa Kelas Perahu

Inovator membentuk tim kerja perubahan yang disusun saat Diklat Kepemimpinan IV di PKP2A II LAN Makassar. Inovator bersama tim kerja yang berasal dari Dinas Pendidikan melakukan pendataan dengan mengunjungi setiap pulau di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Kunjungan dilakukan kepada semua jenjang pendidikan formal dari SD hingga SMA dan sederajat dengan beberapa temuan sebagai berikut:

- anak-anak melaut berada pada usia SD hingga SMA sederajat
- anak melaut baik bersama orangtua maupun dengan orang lain (sanak keluarga, tetangga, pemberi kerja)
- jangka waktu melaut ditemukan bervariasi seperti beberapa jam, 3 hari, 1 minggu
- Terdapat 200 siswa yang aktif diajak melaut dari usia SD hingga SMA sederajat
- Banyak anak yang melaut tidak kembali ke kelas untuk mengikuti proses KBM akhirnya mereka menjadi putus sekolah
- Terdapat pulau yang masyarakatnya beranggapan bahwa anak yang tidak bersekolah tidak perlu menjadi beban bahkan dinikahkan di usia dini

### 3.4.2 Identifikasi Siswa Kelas Perahu

Anak yang melaut yang terdaftar pada kelas tertentu pada sekolah dikategorikan sebagai anak yang wajib mendapat layanan khusus Kelas Perahu karena kebutuhan belajar yang khusus dari sisi waktu (jadwal) dan cara belajar (metode). Indikasi yang digunakan oleh guru di tiga sekolah yang terpilih untuk melakukan uji coba pengembangan model Kelas Perahu adalah (i) siswa yang sering tidak mengikuti KBM (absen) dan (ii) yang tidak mengikuti KBM secara penuh (sering terlambat atau izin di tengah proses KBM).

Karakteristik siswa kelas perahu yang melaut paling sering adalah melaut saat subuh (sekitar jam 3 pagi) dan kembali dari melaut sekitar jam 10 dan selanjutnya berangkat ke sekolah. Pada umumnya anak-anak ini adalah pencari kepiting rajungan dengan menggunakan rakkang (alat tangkap/perangkap rajungan tradisional). Apabila mencari ikan yang besar dengan menggunakan jaring, maka anak pergi sore dan besok pagi atau siang baru kembali dari melaut. Dalam kondisi ini biasanya anak tidak kembali lagi ke sekolah.

Gambar 4. Rakkang, Perangkap Rajungan



### 3.4.3 Pengembangan LKS

Sebelum pelatihan penyusunan LKS yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep tahun 2016, satuan Pendidikan di sekolah berinisiatif menyusun LKS untuk siswa kelas perahu dan reguler dengan materi dan format yang sama. Setelah pelatihan, LKS disesuaikan dengan kondisi belajar yaitu menambah materi bacaan dan mengurangi jumlah soal. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan waktu luang untuk menyelesaikan LKS saat siswa melaut.

Pelatihan penyusunan LKS diselenggarakan selama 3 tahun berturut-turut oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep sejak tahun 2016 dengan menggunakan dana sukarela dari masing-masing sekolah, pada tahun 2017 menggunakan dana dari Konsulat Jenderal Australia di Makassar melalui IKAMA (Ikatan Alumni Mahasiswa Australia), dan pada tahun 2018-2019 menggunakan dana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Pada tahun 2016-2017, LKS yang dilatihkan adalah berdasarkan KTSP dan Kurikulum 2013. Selanjutnya pada tahun 2018 maka serentak semua sekolah dilatih membuat dan menggunakan LKS berdasarkan Kurikulum 2013.

### 3.4.4 Pendampingan Siswa Kelas Perahu

Guru yang terlibat dalam model Kelas Perahu adalah guru yang menjadi wali kelas siswa yang teridentifikasi sebagai siswa Kelas Perahu. Pada saat wali kelas tidak hadir di sekolah, sekolah menunjuk guru lain menjadi pengganti untuk mendampingi siswa Kelas Perahu. Pada jenjang SMP, melibatkan semua guru yang mengampu mata pelajaran yang diajarkan pada Kelas Perahu, karena guru pada jenjang SMP menerapkan berdasarkan mata pelajaran.

Dalam proses pendampingan siswa Kelas Perahu, setelah jadwal KBM di sekolah selesai, guru mengunjungi siswa langsung ke rumah untuk memberikan pembimbingan sesuai materi yang diberikan di sekolah sebelum siswa melaut. Guru akan memberikan LKS yang sudah dipersiapkan dan waktu yang diperlukan oleh guru untuk memberikan bimbingan adalah selama 10-15 menit. Pada praktiknya guru mengikutsertakan buku pelajaran sebagai bahan bacaan untuk mengerjakan soal. Karena buku tersebut dibawa saat melaut, buku tersebut mudah basah. Sehingga guru mengusulkan agar hanya membawa LKS dengan disampul plastik.

Setelah anak kembali dari melaut, siswa akan mengantar hasil LKS saat masuk ke kelas apabila siswa pulang melaut sekitar jam 10 pagi. Atau, guru yang menjemput LKS di rumah apabila siswa tiba di rumah jam 11 pagi yang membuat siswa tidak mungkin mengikuti pelajaran di sekolah. Guru akan melakukan pemeriksaan hasil LKS saat yang bersamaan, memberikan nilai dan melakukan umpan balik saat siswa tidak menyelesaikan soal.

Kondisi di masing-masing pulau berbeda. Praktik pendampingan siswa Kelas Perahu lebih mudah dilakukan di Pulau Salemo dibanding pulau lainnya. Seperti di Pulau Sakuala, orang tua tidak mendukung anak untuk kembali bersekolah setelah melaut. Bahkan orang tua bersikeras mengambil anaknya untuk membantu melaut saat sedang belajar di kelas. Perilaku orang tua ini juga mempengaruhi peran guru untuk mendampingi siswa Kelas Perahu. Siswa juga kerap merasa malu saat guru berkunjung ke rumah karena siswa tersebut sudah absen dari sekolah untuk melaut. Di Pulau Sakuala, anak perempuan ikut melaut dibanding pulau lainnya yang umumnya adalah laki-laki.

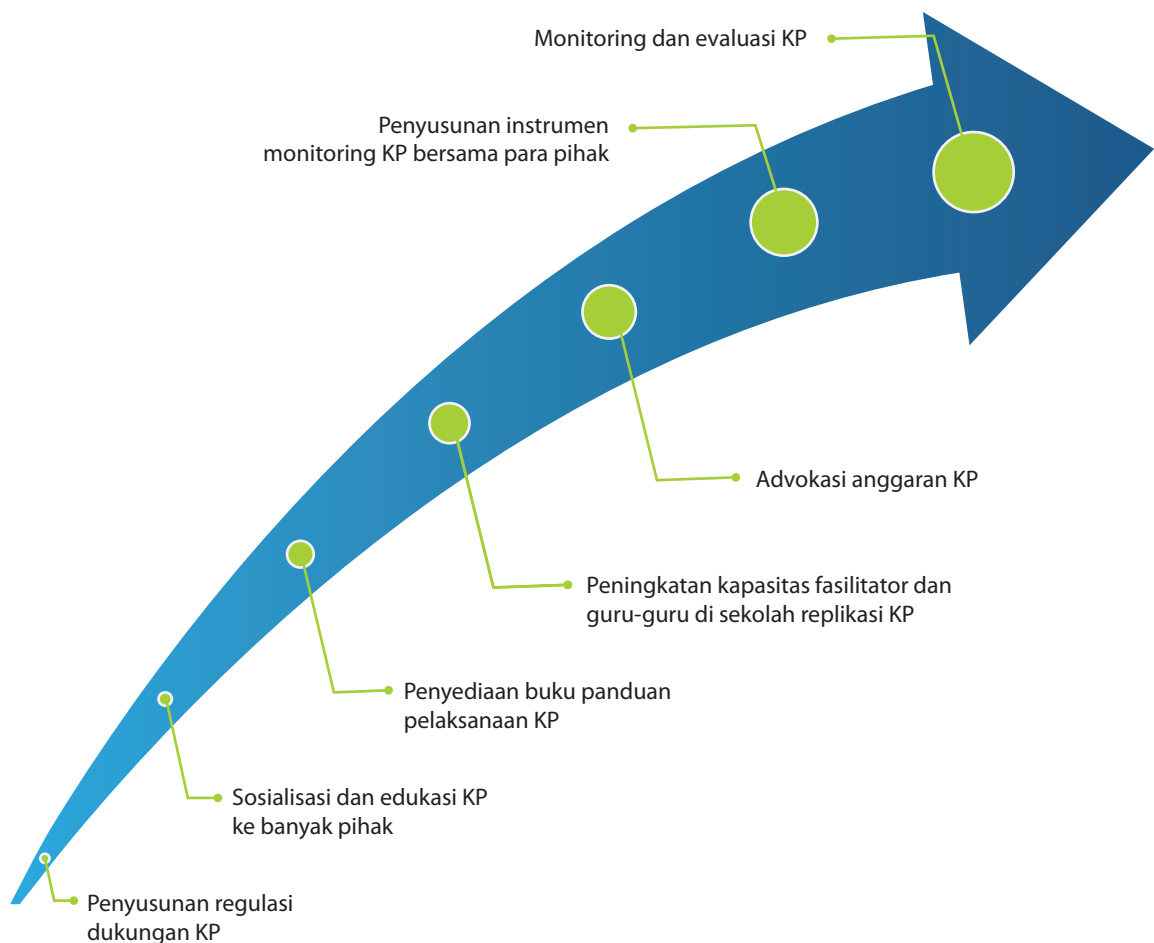
## BAGIAN 4

# PELAKSANAAN REPLIKASI KELAS PERAHU

### 4.1 Skema Replikasi Model Kelas Perahu

Skema replikasi Model Kelas Perahu mencakup berbagai kegiatan dan pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep dengan dukungan dari KOMPAK dan pihak lainnya. Tahapan Replikasi Kelas Perahu tercantum pada gambar di bawah ini.

Gambar 5. Tahapan Replikasi Kelas Perahu



### 4.1.1 Penyusunan Regulasi

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan suatu program adalah dukungan kebijakan dan anggaran. Pemerintah Kabupaten Pangkep menyusun kebijakan agar dapat menjadi payung bagi komitmen-komitmen yang sudah disepakati para pemangku kepentingan KP untuk pelaksanaan replikasi Kelas Perahu.

Kebijakan tersebut bisa berupa Peraturan Bupati yang memuat adanya dukungan anggaran dan insentif bagi guru-guru yang terlibat serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan dalam melaksanakan layanan Pendidikan kelas Perahu. Untuk dukungan yang lebih sistematis dan terstruktur, juga diperlukan adanya peraturan dari Dinas Pendidikan berupa tim kerja yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan Kelas Perahu secara teknis yang dapat digunakan untuk memperluas layanan pendekatan Kelas Perahu.

Adapun langkah-langkah penetapan Perbup KP dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Langkah-langkah Penetapan Perbup KP

Kegiatan	Aktor yang terlibat
1. Pemetaan kendala dan dukungan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kelas Perahu	Inisiator/tim kerja
2. Pembentukan tim fasilitator SK Kepala Dinas	Kepala Dinas Pendidikan
3. Lokakarya penyusunan kebijakan Kelas Perahu	Wakil bupati, Kasi Dinas Pendidikan, tim kerja, perwakilan guru/pengawas kepulauan, Bagian Hukum Pemkab Pangkep
4. FGD penyusunan draft Perbup	Tim fasilitator Kelas Perahu
5. Kajian cepat draft Perbup	Tim kerja
6. Konsultasi publik tentang Perbup	Tim fasilitator, tim kerja
7. Finalisasi Perbup	Tim kerja, perwakilan guru/pengawas kepulauan
8. Mengajukan rancangan Perbup ke Bagian Hukum Kabupaten dilanjutkan ke Provinsi	Tim kerja, perwakilan guru/pengawas kepulauan

### 4.1.2 Sosialisasi dan Edukasi Kelas Perahu

Berbagi informasi tentang tujuan KP sebagai strategi mengurangi angka putus sekolah kepada lebih banyak pihak, antara lain dengan melakukan promosi berupa kegiatan pertemuan, diskusi maupun lokakarya. Sosialisasi dapat dilakukan secara formal dan informal, pada semua tingkatan pemerintahan baik di daerah maupun di pusat.

Pada tahap ini, beberapa kegiatan diinisiasi oleh Pemda Kab. Pangkep yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, seperti sosialisasi kepada perwakilan sekolah-sekolah yang berasal dari 4 kecamatan dengan wilayah kepulauan untuk mendapat pengetahuan yang lebih komprehensif tentang rencana pelaksanaan Kelas Perahu ke lebih banyak sekolah di Pangkep. Sosialisasi tentang Kelas Perahu juga dilakukan oleh Kepsek dan pengawas kepada orang tua/masyarakat di wilayah kerja mereka masing-masing. Di tingkat nasional, Kelas Perahu mengikuti beberapa ajang kompetisi dan mengikuti seminar atau lokakarya yang dapat memperluas pemahaman berbagai pihak tentang layanan pendidikan ini.

### 4.1.3 Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Kelas Perahu

Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Kelas Perahu bertujuan untuk memberikan langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan Kelas Perahu baik yang diselenggarakan di dalam satuan pendidikan, ataupun kegiatan pendukung yang berasal dari ekosistem pendidikan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Penulisan buku panduan pelaksanaan dilakukan langsung oleh aktor-aktor yang berpengalaman dalam percontohan Kelas Perahu berdasarkan pengembangan model sebelumnya di tiga sekolah.

Penulisan buku panduan pelaksanaan dilakukan melalui tiga langkah sebagai berikut.

Gambar 6. Langkah-Langkah Penulisan Buku Panduan Pelaksanaan



### 4.1.4 Peningkatan Kapasitas Tim Fasilitator

Keberadaan LKS dalam Kelas Perahu merupakan salah satu inovasi untuk membantu siswa belajar mandiri. Karena itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi menyusun LKS berdasarkan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan (relevan dan kontekstual). Namun karena beragamnya latar belakang pendidikan guru dan masih banyaknya guru yang memiliki kualifikasi di bawah ketentuan peraturan dan perundangan, maka dilaksanakan pelatihan penyusunan LKS agar para guru KP memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Setelah buku panduan pelaksanaan selesai, buku Panduan Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu edisi pertama pada tahun 2019 ini digunakan sebagai materi untuk melatih fasilitator dan para yang mengikuti pelatihan.

Peningkatan kapasitas guru yang dilakukan dengan beberapa pertemuan seperti:

1. ToT (*training of trainer*) kepada Fasilitator Kelas Perahu, yang diikuti oleh pengawas, kepala sekolah dan guru yang merupakan tim kerja Kelas Perahu berdasarkan SK Dinas Pendidikan, bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan tentang: 1) model layanan Kelas Perahu; 2) pengembangan LKS dan RPP yang kontekstual; 3) penilaian pembelajaran, 4) pembuatan rencana tindak lanjut pelatih untuk melakukan pelatihan ke sekolah-sekolah yang akan mereplikasi.
2. Bimtek teknis replikasi Kelas Perahu kepada guru dan kepala sekolah yang berasal dari sekolah-sekolah di tingkat kecamatan, yang bertujuan untuk (1) memfasilitasi pembahasan rencana kegiatan replikasi Kelas Perahu; (2) menentukan tim penulis buku panduan pelaksanaan Kelas Perahu; (3) membahas rencana anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan replikasi selama 1 tahun
3. Pelatihan Penyusunan LKS berbasis konteks kepulauan kepada perwakilan guru dan kepala sekolah yang berasal dari sekolah-sekolah di tingkat kecamatan. Mengingat bahwa kekuatan Inovasi kelas perahu terletak pada media belajar melalui LKS, maka kapasitas guru dalam menyusun LKS sangat dibutuhkan. KOMPAK bersama dengan INOVASI memfasilitasi pelatihan pengembangan LKS berbasis konteks kepulauan kepada pengawas, fasilitator Kelas Perahu dan guru yang berasal dari kepulauan. Tujuan dari pelatihan penyusunan LKS agar peserta memiliki tambahan pengetahuan dan keterampilan tentang:
  - Konsep LKS sebagai materi belajar bagi KP
  - Kekhususan LKS bagi KP
  - Prinsip penyusunan dan sumber materi LKS
  - Format dan struktur LKS
4. Pendampingan tim fasilitator kepada guru-guru dalam pemanfaatan LKS berdasarkan konteks kepulauan, yang bertujuan untuk memonitor penggunaan LKS dan identifikasi kendala yang dialami saat penggunaan LKS. Dalam masa pendampingan ini, juga terdampak dalam situasi pandemi COVID-19. Dan inovasi Kelas Perahu ini memberikan nilai tambah dan manfaat selama masa pandemi melalui memperbanyak LKS untuk didistribusi ke sekolah-sekolah di pulau, membagikan langsung LKS ke rumah-rumah siswa saat PJJ, dan melakukan kunjungan ke rumah untuk memeriksa LKS yang sudah dikerjakan dan pendampingan langsung ke siswa dengan protokol kesehatan (menggunakan masker, *hand sanitizier*, dll)

#### 4.1.5 Advokasi Anggaran Kelas Perahu

Pada tahapan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan anggaran guna mendukung replikasi Kelas Perahu, antara lain:

- Lobi dan advokasi ke Bappeda untuk usulan nomenklatur dan kebutuhan insentif guru pendamping Kelas Perahu.
- Memastikan adanya daftar kegiatan yang mendukung pada saat pengisian aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) untuk memastikan kebutuhan Kelas Perahu masuk dalam anggaran.
- Meningkatkan pemahaman tentang Kelas Perahu kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk mendorong keterlibatannya dalam pelaksanaan Kelas Perahu di kepulauan termasuk memberikan dukungan alokasi anggaran dana desa sesuai dengan kewenangannya.
- Dalam berbagai kegiatan mendorong agar Kelas Perahu termuat dalam RPJMD sejak dari ranwal sampai ditetapkannya RPJMD, agar membuka ruang penganggaran yang lebih berkelanjutan.
- Memfasilitasi Dinas Pendidikan melakukan advokasi kepada tim Anggaran Pemda dan Tim Penyusun RPJMD untuk memastikan agar di tahun berjalan terdapat penganggaran terkait Kelas Perahu



- Mendorong usulan kebutuhan pelaksanaan Kelas Perahu masuk dalam pemanfaatan DID (Dana Insentif Daerah) melalui pertemuan dengan tim Anggaran Pemda sebelum pengajuan proposal DID dari tingkat daerah ke pemerintah pusat
- Menyusun daftar pembiayaan berdasarkan kebutuhan kegiatan prioritas, terutama terkait insentif guru pendamping dan biaya pelatihan untuk pelaksanaan Kelas Perahu yang dapat didanai oleh APBD dari DPA Dinas Pendidikan, APBDes dan dari sumber lainnya, sehingga dapat menjadi acuan pendanaan untuk pelaksanaan Kelas Perahu.

#### 4.1.6 Penyusunan Instrumen Monitoring KP Bersama Para Pihak

Selain peran penting Dinas Pendidikan dalam proses replikasi Kelas Perahu, peran dari perangkat dinas lainnya juga sangat sentral mengingat proses replikasi layanan Kelas Perahu langsung dilakukan di kepulauan. Peran yang dimaksud adalah dari pihak kecamatan, kepala desa, dan tokoh agama atau masyarakat yang berdomisili sehari-hari di kepulauan tersebut. Karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) perlu dilibatkan untuk penguatan kecamatan dan desa; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk penguatan peran orang tua mendukung anak tetap sekolah walaupun melaut; Dinas Sosial untuk memberikan kemudahan akses agar anak melaut dan keluarganya mendapatkan akses terhadap bantuan-bantuan sosial; Bappeda selaku koordinator perencanaan dan kegiatan yang melibatkan multisektor; dan Dinas Kesehatan untuk memberikan perhatian dan bantuan khusus bagi siswa Kelas Perahu.

Untuk dapat mencapai adanya instrumen kinerja KP sebagai monitoring bersama, dilakukan kegiatan lokakarya yang melibatkan aktor-aktor yang berasal dari multi-sektor seperti dijelaskan di atas. Dari pertemuan dengan berbagai pihak tersebut ditetapkan 5 indikator kinerja pelaksanaan KP dan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja tahun depan, dan melakukan perbaikan mekanisme pendataan siswa melaut (lebih lanjut lihat **Bagian 6: Monitoring dan Evaluasi Kelas Perahu**). Indikator kinerja Kelas Perahu tidak hanya mencakup rencana kerja Dinas Pendidikan, tetapi juga Dinas Sosial, Dukcapil, pemerintahan kecamatan dan desa.

#### 4.1.7 Monitoring Layanan Kelas Perahu

Pada tahap ini, monitoring bertujuan bukan saja untuk melihat perkembangan pelaksanaan Kelas Perahu di satuan Pendidikan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dari lintas sektor lainnya. Kegiatan monitoring ini mengumpulkan masukan dari berbagai pihak seperti Bappeda, antar lintas OPD (DPMD, Dinas Sosial, Dindukcapil), camat, kepala desa, Ormas, bahkan siswa dan orang tua yang mengalami langsung dampak layanan Pendidikan ini.

Daftar pertanyaan untuk memandu pelaksanaan monitoring Kelas Perahu dapat mengikuti kerangka berikut berdasarkan responden yang terlibat.

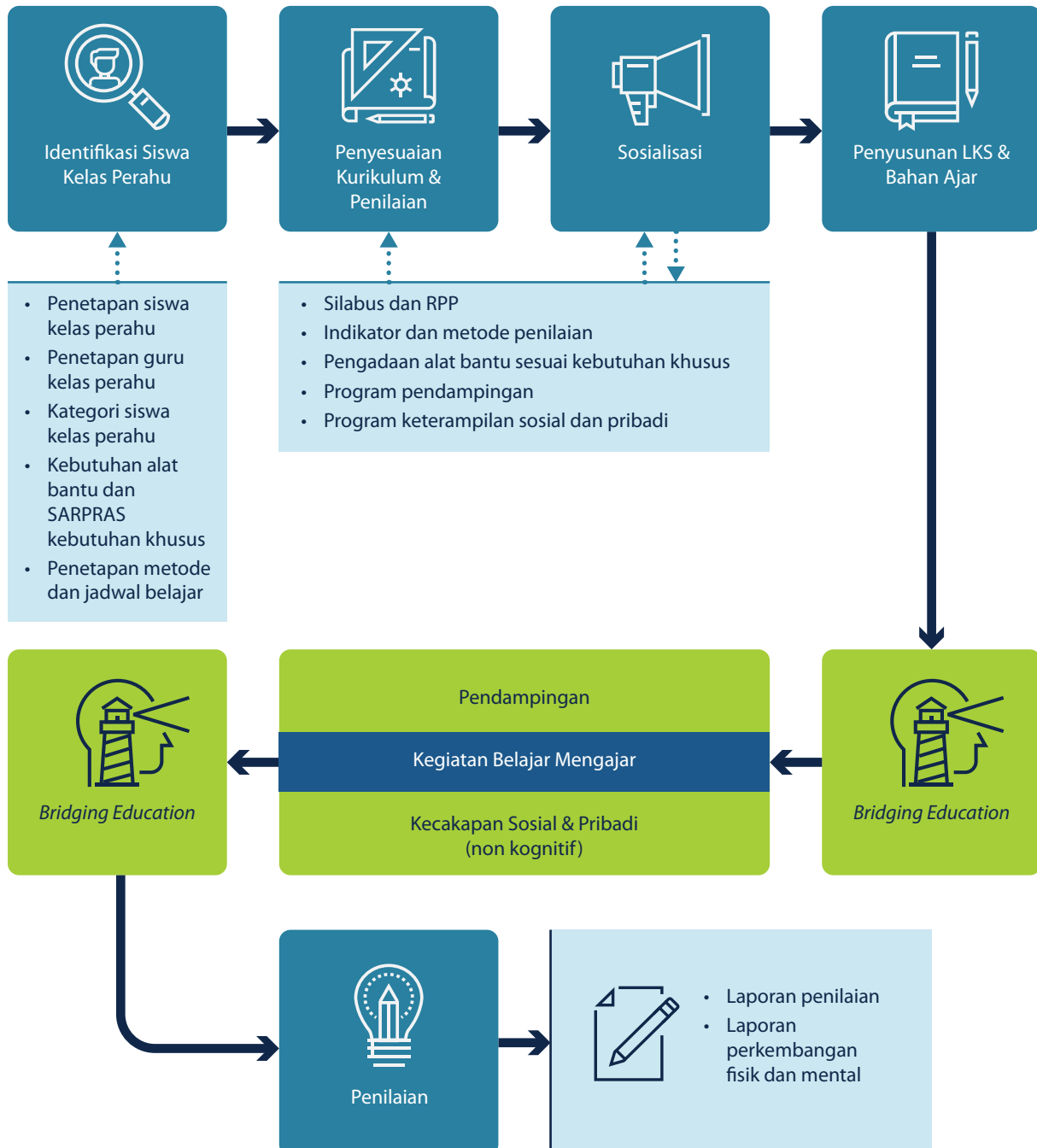
Tabel 6. Daftar Pertanyaan untuk Memandu Pelaksanaan Monitoring Kelas Perahu

Responden	Daftar Pertanyaan
Siswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesudah mendapat layanan KP apakah terjadi perubahan partisipasi anak ke sekolah?</li> <li>2. Apakah hal positif yang kamu dan teman-teman rasakan dalam mengikuti KP?</li> <li>3. Apakah setiap melaut mendapat LKS? Bagaimana cara LKS kamu dan teman-teman dapatkan?</li> <li>4. Apakah setelah melaut LKS diserahkan kepada guru? Jika Tidak mengapa?</li> <li>5. Jika kamu mengalami kesulitan mengerjakan LKS/tugas, apakah guru memberikan bantuan? Bagaimana cara guru memberikan bantuan?</li> <li>6. Apakah LKS terbuat dari bahan tahan air atau dibungkus/dilindungi dengan bahan tahan air? Jika Tidak mengapa?</li> </ol>
Orang tua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah orang tuamu/wali mendampingi belajar di saat melaut? Jika Tidak Mengapa?</li> <li>2. Apakah pernah mendapat sosialisasi dari Sekolah atau pihak lain tentang KP?</li> </ol>
Kepala Sekolah dan Guru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah jumlah anak melaut putus sekolah menurun atau tidak ada?</li> <li>2. Apakah ada penilaian (<i>assessment</i>) awal calon siswa KP?</li> <li>3. Berapa lama waktu pendampingan kepada siswa KP?</li> <li>4. Bagaimana pendampingan kepada siswa KP dilaksanakan?</li> <li>5. Apakah "waktu extra" tersebut mendapatkan kompensasi?</li> <li>6. Apakah mendapat pelatihan penyusunan LKS?</li> <li>7. Apakah mendapat bantuan lanjut dalam penyusunan LKS? Siapa dan Bagaimana?</li> <li>8. Apakah mendapat bantuan pendampingan siswa KP? Siapa dan Bagaimana?</li> <li>9. Apakah jika terdapat siswa yang melaut KP dapat dilaksanakan lagi?</li> <li>10. Setelah satu tahun menjalankan program replikasi KP, apakah pelaksanaan KBM di KP sudah optimal?</li> </ol>
Camat dan Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah anak melaut putus sekolah menurun atau tidak ada?</li> <li>2. Bagaimana dinas mendata siswa KP?</li> <li>3. Berapa sekolah yang menerima program replikasi KP? Berapa jumlah siswanya?</li> <li>4. Sudah berapa kali melaksanakan pelatihan untuk mendukung KP? Pelatihan apa saja dan bagaimana?</li> <li>5. Apakah biaya yang timbul sebagai akibat penerapan KP di satuan pendidikan mendapat dukungan pembiayaan akses -printer, plastik pelindung, dst-, kualitas -pelatihan, pendampingan, dst- dan tata Kelola -pendataan, admin, dst?</li> <li>6. Apakah guru KP mendapat insentif? Jika tidak Mengapa?</li> <li>7. Bagaimana laporan tentang perkembangan replikasi Kelas Perahu ini dikoordinasikan dengan OPD lainnya atau dengan camat/desa ?</li> </ol>
OPD terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulasi apa saja yang sudah disusun untuk mendukung KP? Dan apa lagi yang masih dibutuhkan?</li> <li>2. Apakah sudah tersedia anggaran untuk mendukung KP?</li> <li>3. Apakah Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam pelaksanaan KP? Jika Ya Bagaimana; Jika Tidak Mengapa?</li> <li>4. Apakah ada OPD di luar dinas pendidikan yang memberikan dukungan pelaksanaan KP? Jika Ya Bagaimana; Jika Tidak Mengapa?</li> </ol>

## 4.2 Alur Pelaksanaan Kelas Perahu pada Satuan Pendidikan

Model KP dikembangkan di tiga sekolah di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Hasil penerapan Kelas Perahu yang berhasil menekan angka putus sekolah selama dua tahun penerapan mendorong Pemerintah Kabupaten Pangkep berupaya mereplikasi model Kelas Perahu ke sekolah lain di kepulauan lain di Pangkep. Alur pelaksanaan di bawah ini dimaksudkan sebagai penuntun bagi sekolah yang akan menerapkan dan sekolah dapat mengadaptasi (menyesuaikan dengan tantangan lokal).

Gambar 7. Alur Pelaksanaan Kelas Perahu di Sekolah



### 4.2.1 Identifikasi Siswa Kelas Perahu

Pendataan Awal Profil Siswa Kelas Perahu adalah komponen utama. Ada tidaknya layanan Kelas Perahu ditentukan oleh keberadaan siswa Kelas Perahu. Karena itu proses ini merupakan proses paling awal dari siklus layanan Kelas Perahu. Proses identifikasi siswa Kelas Perahu ini bisa menggunakan data awal dari sistem informasi desa yang sudah ada misalnya BDT, data profil rumah tangga di desa, Dapodik/EMIS dan data lainnya.

Hasil dari verifikasi adalah penentuan apakah siswa masuk kategori (i) anak bekerja atau (ii) pekerja anak. Apabila anak masuk kategori pekerja terdapat dua indikator tambahan untuk melengkapi profil pekerja anak yaitu (i) lama bekerja dalam hari dan (ii) pemberi kerja. Perbedaan kategori mengakibatkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan belajar dan metode untuk KBM. Hasil lain adalah menentukan apakah siswa memiliki kebutuhan khusus sehingga guru dapat menyesuaikan lebih lanjut sumber dan metode serta jenis LKS dalam KBM.

**Gambar 8. Pendataan Siswa Layanan Kelas Perahu**



Selanjutnya sekolah berdasarkan hasil verifikasi tersebut, menetapkan siswa apakah layak mengikuti Kelas Perahu atau tidak. Kepala sekolah menetapkan siswa Kelas Perahu dengan SK yang bersifat rahasia dilampiri hasil verifikasi data termasuk format kebutuhan khusus jika ada.

Kepala sekolah juga menerbitkan surat penunjukan guru Kelas Perahu yang memenuhi kriteria untuk menjadi guru Kelas Perahu. Surat ini memberikan kekuatan hukum menjalankan tugas dan melindungi hak dan kewajiban sebagai guru Kelas Perahu.

Setelah mengetahui profil siswa Kelas Perahu di tiap wilayah, pemerintah daerah di tingkat kabupaten sampai desa, melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kelas Perahu tersebut. Pihak sekolah memberikan laporan ke Pemda khususnya kebutuhan tempat pengaman LKS yang dibawa anak saat melaut, seperti tas/map plastik yang tidak tembus air. Agar sewaktu-waktu hujan atau percikan air laut tidak membasahi LKS yang dibawa oleh siswa ke laut.

Kepala sekolah juga harus berdiskusi dengan guru dan orang tua tentang metode dan jadwal belajar yang akan diselenggarakan dengan kondisi yang ada, misalnya penyesuaian jam belajar dan jam kunjungan guru ke rumah dengan waktu melaut anak-anak tersebut. Perlu disepakati secara bersama agar dalam pelaksanaannya pendekatan ini bukan membuat orang tua menjadi tidak peduli dengan jam sekolah siswa untuk mengikuti aktivitas normal di sekolah. Justru, dengan mengetahui jam belajar di sekolah mereka diharapkan akan mengusahakan agar jadwal melaut anak bisa dikurangi. Sehingga memprioritaskan anak mengikuti pelajaran di sekolah, khususnya pada saat orang tua mengetahui tingkat kemampuan anaknya saat mendampingi belajar di laut.

### 4.2.2 Penyesuaian Kurikulum dan Penilaian

Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab 2.1 mengenai anak bekerja dan pekerja anak, mereka memiliki karakteristik berbeda yang tentunya berakibat pada kebutuhan belajar dan metode belajar yang berbeda pula. Oleh karena itu maka perlu penyesuaian kurikulum terhadap kebutuhan dan konteks siswa Kelas Perahu. Penyesuaian bukan menurunkan standar KD/KI tetapi memastikan kompetensi yang akan dibangun dapat dilaksanakan dengan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah/siswa. Dengan metode belajar sesuai karakteristik anak bekerja dan atau pekerja anak. Apalagi jika dalam proses identifikasi siswa Kelas Perahu ditemukan kebutuhan khusus, maka penyesuaian lebih lanjut terhadap sumber belajar metode belajar perlu dikembangkan. Dalam proses identifikasi

kebutuhan khusus akan tampak kebutuhan khusus terkait alat bantu (*assistive device*) dan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana saat siswa Kelas Perahu pergi dan berada di sekolah.

Sebagai tambahan (suplemen) untuk siswa Kelas Perahu dalam rangka mendukung tumbuh kembang fisik dan mental anak bekerja dan atau pekerja anak, sekolah dapat menyusun program tambahan konseling. Juga program pengembangan kecakapan pribadi dan sosial untuk mengurangi dampak negatif pekerja anak.

Penyesuaian penilaian juga bukan menurunkan standar indikator tetapi menyesuaikan bagaimana pengukuran indikator. Sebagian proses KBM tidak melalui tatap muka sehingga perlu penyesuaian tidak saja metode pengukuran tetapi juga melibatkan aktor non-guru untuk melaksanakan penilaian jika dimungkinkan.

### 4.2.3 Sosialisasi

Orang tua dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan penyelenggaraan inovasi pendidikan seperti layanan Kelas Perahu jika ada rasa memiliki. Setelah proses identifikasi dan penyesuaian kurikulum dan penilaian selesai, sekolah melaksanakan sosialisasi tidak hanya dengan orang tua tetapi pemangku kepentingan lain. Misalnya, dalam identifikasi ditemukan anak bekerja pada orang lain (pengusaha), maka pengusaha juga diundang agar memahami hak dan kewajiban anak dan warga negara dalam layanan pendidikan khususnya Kelas Perahu. Dalam konteks masyarakat pesisir dan kepulauan di Sulawesi Selatan, ini bisa termasuk melibatkan struktur patron klien tradisional *Punggawa-Sawi*, antara pemilik perahu/*punggawa* dan nelayan/*sawi*, untuk mendapatkan dukungan mereka.

Dengan hadirnya pemangku kepentingan lainnya (pengusaha, tenaga medis, tokoh masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda) merupakan kesempatan yang baik untuk mengkonsultasikan RKP (Rencana Kegiatan Pembelajaran) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang telah memasukkan berbagai kebutuhan selama proses identifikasi dan penyesuaian kurikulum & penilaian. Masukan dapat menjadi umpan balik perbaikan RKP dan RKAS termasuk penyesuaian lebih lanjut dokumen yang dihasilkan pada proses penyesuaian kurikulum dan penilaian.

Pada tahap ini juga perlu memberikan edukasi kepada para pihak tentang manfaat penting dari pelaksanaan layanan Pendidikan Kelas Perahu. Beberapa manfaat hal yang perlu disampaikan dalam proses sosialisasi adalah:

1. Memberikan kesempatan siswa tetap sekolah

Inovasi layanan pendidikan Kelas Perahu merupakan layanan khusus bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal dan di ruang kelas. Kekuatan layanan pendidikan khusus ini ada pada Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan siswa di atas perahu selama melaut agar siswa tidak tertinggal pelajaran dan tetap bersekolah.

2. Mengeratkan hubungan orang tua dan anak

Pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah saja, keluargalah paling pertama yang mengenalkan pendidikan dalam nilai-nilai positif pada anak saat melakukan tugas pengasuhan. Bagi masyarakat pesisir dan kepulauan, tugas pengasuhan tidak didominasi di dalam rumah, laut menjadi rumah kedua bagi orang tua dan anak untuk mengeratkan pertalian mereka. Mendampingi anaknya belajar sambil menyelesaikan LKS yang diberikan guru selama melaut menjadi kesan tersendiri bagi orang tua dan anak. Situasi ini mendorong

**Gambar 9. Menyesuaikan Waktu Siswa Melaut dengan Program Pembelajaran di Kelas Perahu**



layanan Kelas Perahu dapat diterima oleh orang tua karena anak tidak tertinggal pelajaran dan tetap dapat membantu mereka melaut.

3. Meningkatkan dukungan orang tua kepada anak

Menguatnya pertalian orang tua dan anak dapat mengubah persepsi orang tua terkait pendidikan dikarenakan:

- Orang tua terlibat aktif membantu anak menyelesaikan LKS di atas kapal
- Orang tua memberikan waktu bagi anak untuk menyelesaikan LKS dan belajar
- Tumbuhnya kesadaran orang tua bahwa pendidikan penting bagi masa depan anak

4. Meningkatkan partisipasi orang tua dalam layanan pendidikan Kelas Perahu

Adanya layanan pendidikan Kelas Perahu mampu meningkatkan intensitas komunikasi orang tua dan guru. Setelah siswa selesai melaut, orang tua akan mendatangi guru untuk menanyakan perkembangan belajar anaknya dan selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan antara sekolah dan orang tua siswa.

5. Meningkatkan kreativitas pemangku kepentingan

Mendorong para guru, kepala sekolah dan pihak Dinas Pendidikan untuk semakin meningkatkan kreativitas dan kualitas dalam penyelenggaraan layanan Kelas Perahu.

Guru menjadi sumber kekuatan layanan Kelas Perahu (Peningkatan Kompetensi Pembelajaran), dibutuhkan kreativitas guru dalam mengembangkan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berkualitas bagi siswa Kelas Perahu. Dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui berbagai pelatihan bagi para guru dan kepala sekolah bertujuan agar guru yang melayani Kelas Perahu dapat mengembangkan media belajar mengajar yang sesuai kebutuhan siswa Kelas Perahu. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengeluarkan Peraturan Bupati dan menganggarkan alokasi dana untuk replikasi layanan pendidikan Kelas Perahu.

#### 4.2.4 Penyusunan LKS dan Bahan Ajar

Dalam pelaksanaan layanan Kelas Perahu, diperlukan LKS untuk membantu siswa agar tetap dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Keberadaan LKS dalam KP merupakan salah satu inovasi untuk membantu siswa belajar mandiri. Karena itu guru dituntut untuk memiliki kompetensi menyusun LKS berdasarkan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan (relevan dan kontekstual). Namun karena beragamnya latar belakang pendidikan guru dan masih banyaknya guru yang memiliki kualifikasi di bawah ketentuan peraturan dan perundangan, maka dilaksanakan pelatihan penyusunan LKS agar para guru KP memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Sebelum pelatihan penyusunan LKS, yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep pada 2016, satuan Pendidikan di sekolah berinisiatif menyusun LKS untuk siswa Kelas Perahu dan reguler dengan materi dan format yang sama. Setelah pelatihan, LKS disesuaikan dengan kondisi belajar yaitu menambah materi bacaan dan mengurangi jumlah soal. Hal ini dilakukan karena mempertimbangkan waktu luang untuk menyelesaikan LKS saat siswa melaut.

Kegiatan penyusunan LKS dan bahan ajar ini adalah inti dari siklus layanan Kelas Perahu. Sifat komunikasi satu arah dari LKS mewajibkan tim menyusun menggunakan bahasa sederhana dan mudah dimengerti, jika perlu dapat menggunakan bahasa ibu untuk menjelaskan langkah belajar. Penggunaan bahan ajar lokal tidak hanya memudahkan dan membantu anak dalam mengingat tetapi juga sekaligus proses reservasi budaya dan bahasa.

Tantangan terberat dalam tahap penyusunan adalah membuat isi dan bahan ajar kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa Kelas Perahu. Pekerja anak tidak memiliki banyak waktu luang sehingga LKS disusun dalam bentuk ringkas, padat dan "menarik", sehingga LKS antara siswa reguler dan siswa Kelas Perahu tidak harus sama, namun secara tujuan (KD) tetaplah sama. Mengingat keterisolasian siswa Kelas Perahu saat melaut, langkah belajar sebaiknya diberikan pilihan (bukan hanya satu langkah belajar), demikian pula dengan sumber ajar (contoh LKS berbasis konteks kepulauan dapat ditemukan pada lampiran 1. Contoh LKS Siswa KP).

Merujuk pada RPP dan atau K13 tuliskan KD dalam bagian pertama LKS. Pencantuman KD dimaksudkan untuk memandu guru dalam mengembangkan bahan dan metode ajar, sedangkan bagi siswa berguna untuk memberikan informasi awal tujuan pembelajaran.<sup>3</sup>

Berdasarkan KD yang dicantumkan di dalam bagian 1 (bab 1), guru mengembangkan tujuan pembelajaran dan metode (cara belajar). Beberapa pertimbangan dalam merumuskan tujuan dan metode belajar adalah sebagai berikut:

- Bahasa yang dipergunakan hendaknya mempertimbangkan pengetahuan dan kecakapan siswa pada kelompok usia sasaran.
- Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dalam bentuk positif.
- Sebagai bagian dari proses kontekstualisasi dan adaptasi kearifan lokal, bahan ajar, metode belajar dan tujuan pembelajaran disesuaikan dengan lingkungan kepulauan dan laut.
- Pemetaan metode dan tujuan pembelajaran terhadap waktu (musim, jadwal melaut, arus laut, migrasi binatang laut, dsb)
- Jika metode melibatkan banyak langkah sebaiknya diuraikan dan perlu penyederhanaan (dekomposisi) jika terlalu kompleks, misalnya dengan memvisualkan metode (langkah).

Materi pembelajaran terdiri dari:

- bahan bacaan dan bahan ajar lainnya
- petunjuk atau langkah belajar mandiri (tugas mandiri) dan
- daftar pertanyaan.

Jika dalam identifikasi ditemukan ABK (anak berkebutuhan khusus), pengembangan LKS wajib memodifikasi LKS untuk mengurangi atau menghilangkan kesulitan belajar dari enam aspek fungsional. Misalnya jika ditemukan ABK dengan gangguan penglihatan, LKS dicetak dengan huruf ukuran lebih besar dan atau kapital dengan warna kontras. Demikian pula jika ditemukan ABK buta warna, LKS dimodifikasi menggunakan warna yang dapat ditangkap oleh mata ABK.

Dengan semakin murahnya perangkat android dan meluasnya layanan komunikasi internet, perlu dipertimbangkan menyusun LKS berbasis android (*mobile app*) untuk mengatasi komunikasi satu arah pada LKS konvensional. LKS berbasis android juga dapat dilengkapi dengan sumber belajar yang beragam dalam bentuk audio visual dan tautan luar (*external link*) untuk mengakses sumber belajar lebih banyak lagi.

#### 4.2.5 Penyesuaian Strategi Pembelajaran dengan Lingkungan Anak (Pendampingan, KBM dan Pengembangan Kecakapan Non-kognitif)

Penyesuaian strategi pembelajaran mencakup penyesuaian kegiatan belajar mengajar (KBM), Pendampingan dan Pengembangan Kecakapan pribadi dan sosial. KBM terbagi menjadi tiga jenis bagi siswa Kelas Perahu yaitu saat di (i) kelas, (ii) laut dan (iii) *bridging*. Untuk bagian (iii) *bridging* telah dibahas sebelumnya.

KBM di kelas merupakan kesempatan guru tatap muka dengan siswa Kelas Perahu dan antara siswa Kelas Perahu dan kelas reguler. Pada kesempatan belajar tatap muka guru dapat melanjutkan proses *bridging education* jika diperlukan seperti memberikan "*ice breaker*" untuk menstimulasi siswa Kelas Perahu bisa terlibat aktif kembali dalam pembelajaran dan mencairkan suasana. Pada kompetensi tertentu di mana siswa Kelas Perahu mempunyai lebih banyak pengetahuan, kecakapan dan sikap dapat menjadi narasumber atau bentuk lain dalam metode belajar yang melibatkan keaktifan siswa sebagai bentuk penghargaan. KBM di laut di mana sebenarnya siswa belajar mandiri,

<sup>3</sup> Contoh-contoh LKS untuk Kelas Perahu dapat dilihat di tautan ini: <https://drive.google.com/drive/folders/1uzhsZUOHKL8Bjf3a3i5naj8S14hpFk-4p?usp=sharing>

hampir dipastikan tidak ada keterlibatan guru, namun dalam beberapa KD yang relevan dan kontekstual, orang tua dan orang dewasa dalam kegiatan melaut dapat menjadi fasilitator dan sumber belajar dan dapat pula menjadi penilai untuk ketiga jenis penilaian K13. Di sinilah peran *bridging education* menjadi strategis, di mana guru dapat memberikan instruksi persiapan KBM (*briefing*) kepada orang tua dan pendamping dewasa selama melaut. Apabila orang tua dan pendamping dewasa dilibatkan dalam pembelajaran sebagai pembimbing, fasilitator, narasumber dan penilai, sekolah dapat melengkapi dengan *log book* untuk menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas.

Gambar 10. Guru Memberikan LKS Kepada Siswa dan Bimbingan Awal Sebelum Melaut



*Bridging education* dilakukan guru dengan mengkoordinasikan dengan peserta didik dan orang tua untuk memastikan berapa lama waktu yang akan digunakan untuk melaut apakah hanya harian, mingguan atau bulanan.

Peserta didik yang sekolah di SD, LKS diberikan disesuaikan dengan jumlah hari efektif berdasarkan jadwal pembelajaran. Misalnya peserta didik melaut harian maka LKS yang diberikan hanya satu LKS. Peserta didik yang melaut mingguan maka diberikan LKS sebanyak enam. Peserta didik yang melaut bulanan maka diberikan LKS sebanyak hari efektif dalam bulan itu.

Peserta didik yang sekolah di SMP, LKS diberikan disesuaikan dengan jumlah hari efektif berdasarkan mata pelajaran dalam jadwal pembelajaran. Misalnya peserta didik melaut harian maka LKS yang diberikan sejumlah mata pelajaran dari jadwal yang ditinggalkan. Peserta didik yang melaut mingguan maka diberikan LKS sejumlah mata pelajaran dan hari efektif yang ditinggalkan. Peserta didik yang melaut bulanan maka diberikan LKS sebanyak hari efektif dalam bulan itu. Pekerja anak pada siswa Kelas Perahu terpapar pada kegiatan melaut yang lama dan keras memiliki pengaruh negatif (lihat sub bab 2.1) terhadap tumbuh kembang anak secara psikis dan fisik. Untuk itu pendampingan guru khusus (BK), guru kelas dan tenaga khusus lainnya (para medis, psikolog, dll) menjadi strategis agar sekolah dapat memahami kondisi pertumbuhan anak. Dalam pendampingan jika ditemukan hambatan dalam tumbuh kembang anak sekolah dapat mencatatnya secara rahasia sebagai bagian dari proses identifikasi dan memberikan layanan tambahan untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun apabila sekolah tidak memiliki kompetensi dapat melibatkan masyarakat dan pihak terkait yang berwenang.

Sedikitnya waktu luang siswa Kelas Perahu baik saat bekerja maupun di rumah, menuntut sekolah untuk dapat memberikan kecakapan non-akademik seperti (i) belajar untuk belajar (*learning to learn*), (ii) percaya diri, (iii)

komunikasi lisan dan tertulis dan (iv) berpikir kritis dan logis dan pemecahan masalah. Kecakapan non-akademik ini bisa dibangun melalui KBM seperti biasa (formal) maupun melalui kegiatan non-formal seperti olahraga, *outbound*, rekreasi, studi belajar dsb.

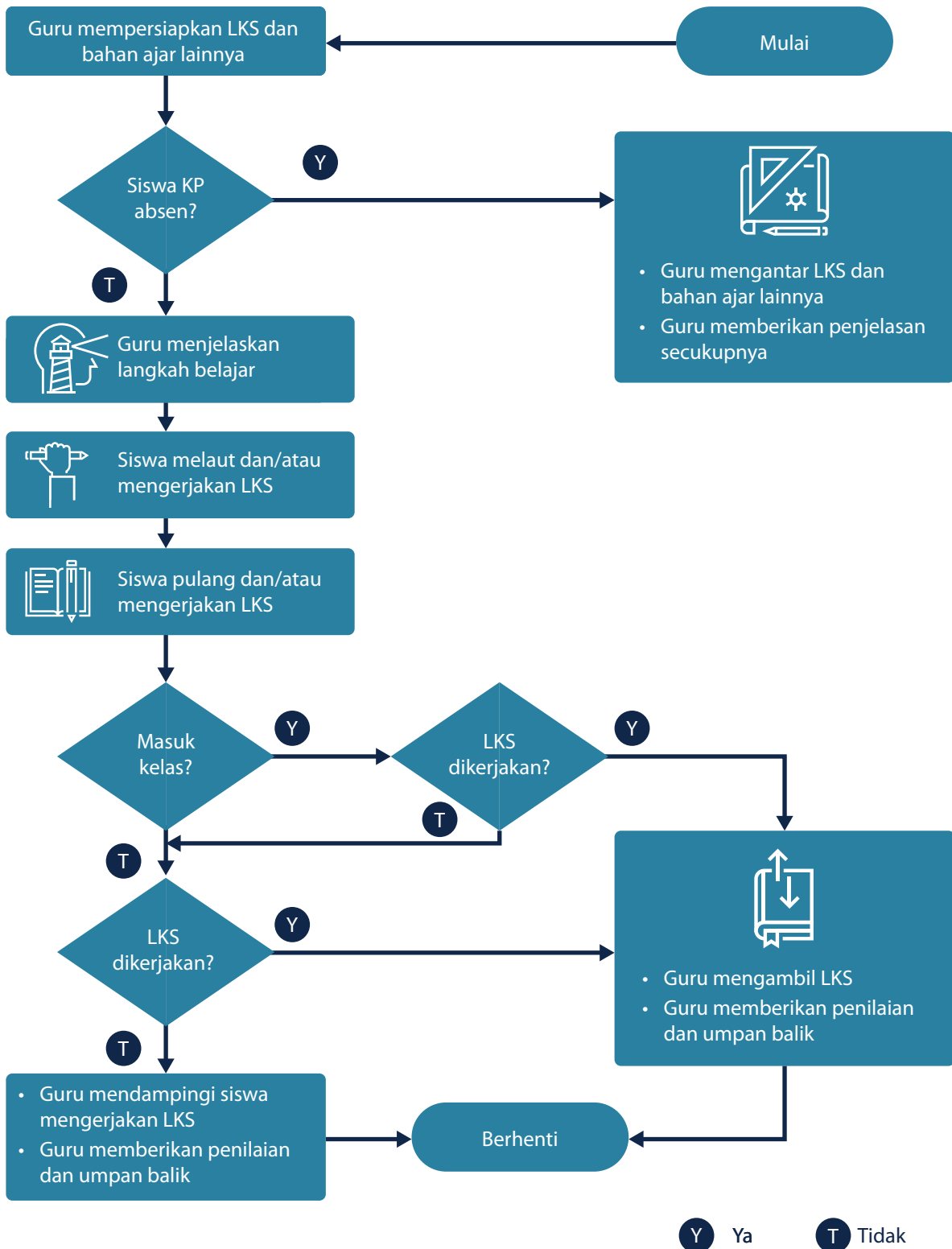
Gambar 11. Siswa Mengerjakan LKS di Sela-Sela Melaut



Gambar 12 adalah diagram yang memperlihatkan proses pendampingan guru terhadap siswa KP. Siswa akan membawa LKS saat melaut dan akan mengerjakan pada saat beristirahat (setelah pasang jaring, menunggu hasil tangkapan). Namun apabila soal pada LKS tidak selesai dikerjakan maka siswa akan menyelesaikannya di rumah.



Gambar 12. Diagram Alur Pendampingan Siswa KP



#### 4.2.6 Penilaian Hasil Belajar Anak Kelas Perahu

Kurikulum 2013 menuntut penilaian holistik dari masukan, proses KBM dan keluaran hingga hasil pada tiga dimensi penilaian yaitu pengetahuan, kecakapan dan sikap. Penilaian bagi siswa Kelas Perahu perlu melibatkan orang tua dan atau pendamping dewasa, mengingat saat melaut sebagian besar waktu siswa dihabiskan dengan mereka. Pelibatan aktor non guru sebagai penilai membutuhkan penyesuaian dan memerlukan *briefing* (pendampingan) kepada mereka. Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial melalui observasi guru dan penilaian antar teman dilakukan pada saat peserta didik berada di kelas, sedangkan pada saat melaut dilakukan oleh orang tua dan atau pendamping dewasa dan dilaporkan ke guru.

Penilaian pengetahuan seperti Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun tetap dilakukan di kelas berdasarkan jadwal. Apabila bertepatan dengan jadwal melaut bagi peserta didik KP maka diberikan dalam bentuk susulan. Penilaian Keterampilan diprioritaskan ke peserta didik KP dalam bentuk penilaian proyek, produk, dan portofolio. Penilaian keterampilan dalam bentuk kinerja dapat diberikan pada saat peserta didik KP kembali ke kelas. Penilaian hasil belajar yang diperoleh peserta didik KP tetap didokumentasikan ke dalam daftar nilai sesuai dengan aspek penilaian yang ada pada pegangan guru kelas atau guru mata pelajaran. Tim pengembang KP telah menyusun format penilaian dan dapat dilihat pada lampiran III.

Gambar 13. Memberikan Penilaian dan Tindak Lanjut Hasil Belajar LKS Siswa



### 4.3 Tantangan Pelaksanaan Kelas Perahu

Berdasarkan pada fase percontohan dan replikasi Kelas Perahu, dalam pelaksanaannya layanan Pendidikan Kelas Perahu juga mempunyai beberapa tantangan baik di dalam satuan Pendidikan maupun dari aspek lainnya yang mempengaruhi implementasi layanan Pendidikan Kelas Perahu, yaitu:

1. Sistem manajemen data siswa melaut

Langkah awal dalam pelaksanaan kelas perahu di satuan Pendidikan adalah identifikasi siswa yang tergolong pada siswa kelas perahu. Namun masih terdapat kesulitan memperoleh data siswa melaut karena sangat tergantung pada ketersediaan guru dan kepala sekolah untuk melapor kepada dinas Pendidikan. Apabila guru dan kepala sekolah sedang tidak berada di pulau maka data yang akurat akan sangat sulit untuk diketahui, apalagi untuk mendapatkan informasi siswa melaut *by name by address*, termasuk kondisi keluarganya. Termasuk dalam menetapkan guru pendamping dan bagaimana menjalankan peran mereka, data siswa melaut yang dapat diperbaharui setiap saat merupakan kebutuhan agar mekanisme pelaksanaan Kelas Perahu di sekolah bisa berjalan lancar.

2. Sosialisasi dan koordinasi antar sektor

Masih terjadi kecemburuan antara siswa yang terdaftar sebagai siswa kelas perahu dan tidak terdaftar sehingga muncul anggapan tidak masalah siswa melaut karena dapat difasilitasi dengan pendekatan Kelas Perahu dan anak bisa selalu keluar untuk melaut. Tentu saja hal ini karena kurangnya kesadaran kepada orang tua tentang konsep dari layanan pendidikan Kelas Perahu ini dimana pendekatan ini mempunyai tujuan utama adalah tidak ada lagi siswa melaut di kepulauan.

Kelas Perahu yang sarat dengan anggapan mendukung pekerja anak juga menjadi kendala yang dapat menimbulkan perdebatan. Pemahaman tentang kecenderungan anak bekerja karena melaut yang dikaitkan dengan aspek pemenuhan hak Pendidikan untuk semua, masih belum dipahami oleh semua pihak apalagi orang tua.

3. Kapasitas Guru dalam Pengembangan LKS dan Pendampingan siswa  
Penggunaan LKS sebagai sumber dan media belajar sebagai pengganti KBM pada kelas reguler memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan tersebut disajikan dalam tabel berikut (Lismawati, 2010)

Tabel 7. Kelebihan dan Kekurangan LKS

Kelebihan	Kekurangan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dari aspek penggunaan: merupakan media yang paling mudah. Dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan alat khusus</li> <li>2. Dari aspek pengajaran: dibandingkan media pembelajaran jenis lain bisa dikatakan lebih unggul. Karena merupakan media yang canggih dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar tentang fakta dan mampu menggali prinsip-prinsip umum dan abstrak dengan menggunakan argumentasi yang realistis.</li> <li>3. Dari aspek kualitas penyampaian pesan pembelajaran yaitu mampu memaparkan kata-kata, angka-angka, notasi musik, gambar dua dimensi, serta diagram dengan proses yang sangat cepat.</li> <li>4. Dari aspek ekonomi: secara ekonomis lebih murah dibandingkan dengan media pembelajaran yang lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak mampu mempresentasikan gerakan, pemaparan materi bersifat linear, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan.</li> <li>2. Sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian-bagian tertentu.</li> <li>3. Sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang kompleks dan mendalam.</li> <li>4. Tidak mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas karena media ini ditulis pada tingkat baca tertentu.</li> <li>5. Memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa dapat memahami materi yang dijelaskan. Siswa yang tidak memenuhi asumsi pengetahuan prasyarat ini akan mengalami kesulitan dalam memahami.</li> <li>6. Cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagian guru yang menuntut siswanya untuk menghafal data, fakta dan angka. Tuntutan ini akan membatasi penggunaan hanya untuk alat menghafal.</li> <li>7. Kadangkala memuat terlalu banyak terminologi dan istilah sehingga dapat menyebabkan beban kognitif yang besar kepada siswa.</li> </ol>

Sehingga diperlukan pengayaan metode dan bahan, sebagai contoh untuk bentuk-bentuk bulan sebagaimana dicantumkan dalam contoh LKS dapat menggunakan metode observasi dan siswa mencatat hasil pengamatan dalam LKS.

Model Pembelajaran dengan menggunakan LKS pada layanan Pendidikan Kelas Perahu sudah dilakukan sejak awal inovasi ini dimulai. Namun seiring dengan pelaksanaan replikasi Kelas Perahu ditemukan bahwa penyusunan LKS yang berbasis kontekstual kepulauan masih sulit karena kreativitas dan kapasitas yang masih kurang dari para guru. Padahal telah diketahui bersama bahwa LKS berbasis kontekstual tersebut akan mendorong anak-anak untuk semangat dan tetap ingin bersekolah karena LKS mendorong mereka untuk lebih rajin belajar dan lebih menarik perhatian mereka untuk ingin selalu hadir ke sekolah. Oleh karena itu pendampingan siswa untuk bisa memahami bahan ajar yang terdapat pada LKS merupakan hal penting yang harus diperhatikan efektivitas dan efisiensinya.

4. Anggaran dan Pengaturan Insentif guru pendamping  
Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung Kelas Perahu juga ditentukan oleh 'political will' dari pemda setempat. Apabila pemda mempunyai tujuan prioritas dalam programnya adalah mengatasi masalah anak tidak sekolah yang didalamnya juga termasuk pencegahan anak putus sekolah, maka kegiatan seperti Kelas Perahu akan mendapat dukungan penuh. Apalagi untuk memastikan Kelas Perahu ini berjalan diperlukan anggaran khusus untuk para guru pendamping karena mereka menjalankan tugas di luar jam mengajar. Selain itu, pemberian insentif kepada guru pendamping harus disertai dengan mekanisme yang adil dan transparan untuk guru-guru yang mendapat insentif tersebut, yang dapat diakses oleh semua pihak.
5. Kondisi geografis yang terletak di kepulauan  
Kondisi geografis ini menjadi pertimbangan dalam mendampingi siswa, apalagi siswa yang tempat tinggalnya di kepulauan terjauh yaitu kecamatan Kalmas dan Tangaya. Faktor cuaca seperti hujan dan kesulitan transportasi merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kepulauan seperti di Pangkep.

#### 4.4 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pengembangan Kelas Perahu

Dalam pelaksanaannya layanan pendidikan Kelas Perahu mempunyai beberapa catatan yang harus diperhatikan khususnya pada aspek perlindungan anak karena dengan melepaskan anak bekerja di laut tentunya penuh risiko dan bahaya yang dapat mempengaruhi keselamatan anak.

Di bawah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar replikasi Kelas Perahu dapat dilakukan lebih baik di wilayah lainnya, yaitu:

1. Melakukan pendataan siswa melaut di tiap sekolah yang terdaftar setiap tahun sebelum tahun ajaran dimulai, dan melakukan pemutakhiran data siswa yang masuk dalam kategori Siswa Kelas Perahu melalui guru pendamping dan kepala sekolah. Kegiatan identifikasi dilaksanakan oleh sekolah (guru dan Kepsek) tidak hanya berdasarkan pengakuan tetapi juga hasil verifikasi dan pengamatan langsung terhadap calon siswa Kelas Perahu dengan mengunjungi siswa dan mewawancarai orang tua. Lampiran II dapat digunakan sebagai format identifikasi termasuk melakukan uji sederhana untuk mengetahui apakah siswa juga memiliki kebutuhan khusus dengan menggunakan pendekatan fungsional atau model sosial.
2. Perlunya sosialisasi intensif ke semua pemangku kepentingan (pemerintah maupun masyarakat) untuk membangun pemahaman tentang layanan Kelas Perahu, termasuk menyangkut transparansi anggaran dan pembiayaan. Agar tidak terjadi salah paham yang menganggap Kelas Perahu misalnya berarti terkait dengan infrastruktur fisik, seperti pengadaan perahu.
3. Tetap sensitif dengan adanya kecenderungan untuk mempekerjakan anak saat melaut. Memang mayoritas mata pencaharian orang tua siswa perahu adalah nelayan yang sangat bergantung dengan hasil laut sehingga membuat orang tua memutuskan untuk melibatkan anak melaut, namun orang tua tetap sensitif dengan hak-hak dan kebutuhan tumbuh kembang dan kesehatan anak. Orang tua didorong untuk memiliki kemampuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan mengenyam pendidikan dan juga memberikan perlindungan terhadap kesehatan anak mereka. Sehingga mengajak anak ke laut juga memikirkan tentang waktu dan kondisi alam, cuaca dan lainnya.
4. Merencanakan kegiatan dalam sistem yang berkelanjutan  
Umumnya proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka antara guru dan siswa agar intensitas komunikasi dan pengawasan dapat optimal dilakukan oleh guru. Di dalam Konvensi Hak Anak, situasi anak-

anak yang mendapatkan layanan Kelas Perahu merupakan kategori anak-anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan kepastian pemenuhan hak dasar, pendidikan. Oleh karena itu, perlu Menyusun rencana kerja penguatan kapasitas guru pendamping untuk penyesuaian materi sesuai dengan karakteristik siswa melalui dengan memberdayakan kelompok-kelompok guru, kepala sekolah dengan pendampingan intensif dari pengawas sekolah.

5. Mempunyai pengaman bahan belajar seperti materi bacaan dan LKS yang tahan lama (anti air). Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikembangkan oleh para guru berbahan kertas dan tidak ada perlindungan sehingga mudah basah saat siswa mengerjakan saat melaut. Sehingga Pemda perlu memberikan alokasi anggaran untuk penyediaan map atau tas anti air yang bisa melindungi bahan belajar terlindungi dari air.

6. Proses pembelajaran (Metode belajar dan isi LKS) dibuat lebih variatif

Hal lain yang dapat dilaksanakan adalah melengkapi dan atau menambahkan sumber belajar dan metode belajar setelah siswa mengisi LKS dalam bentuk diskusi maupun presentasi dan tanya jawab. Waktu yang berkaitan dengan musim, kondisi laut, pergerakan benda-benda langit menjadi salah satu faktor penting dalam membuat bahan ajar yang kontekstual dan berkearifan lokal. Sebagai contoh dalam LKS Bumiku. Alih-alih membuat bahan ajar gambar bulan sedang mengelilingi bumi (revolusi), guru meminta siswa langsung mengamati gerak bulan dan menjadikan orang tua dan komunitas nelayan sebagai informan sebagai bahan dan sumber ajar. Namun adaptasi kontekstual dan kearifan lokal tanpa memperhitungkan waktu menyebabkan proses belajar mengamati tidak dapat dilaksanakan, misalnya pada musim hujan, di mana penampakan benda langit termasuk bulan tidak jelas atau tidak tampak.

Metode pendampingan disesuaikan dengan lamanya siswa melaut seperti penyesuaian dengan jam atau tugas tambahan untuk kasus anak melaut yang tidak setiap hari melaut (ada jeda), LKS untuk anak yang melaut lebih dari 20 hari, LKS harus sederhana dan menarik minat, LKS anak melaut > 20 hari dibuat untuk membangun kecakapan aritmatika yang dipakai sehari-hari dalam aktivitas melaut (kontekstual dan relevan). Selain itu siswa diminta untuk membuat jurnal perjalanan dan bisa juga diminta membuat puisi berdasarkan pengalaman melaut.

7. Pengembangan LKS Berbasis Kearifan Lokal

Tabel 7 mengungkap beberapa kelemahan LKS disamping kelebihanannya, yaitu komunikasi yang terjadi hanya satu arah (tidak interaktif). Untuk itu LKS hanya efektif dipergunakan pada kelas akhir (Kelas 4,5 dan 6) SD sederajat, di mana siswa sudah memiliki literasi dasar baca tulis. Sehingga petunjuk langkah belajar hendaknya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Perlu dipertimbangkan untuk menggunakan LKS interaktif berbasis android, mengingat harga tablet atau telepon pintar di Indonesia semakin terjangkau. Penggunaan alat android juga dapat mengurangi penggunaan kertas dan murah dalam biaya produksi konten. Pada umumnya siswa lebih cepat mengingat apabila contoh bahan belajar berasal dari lingkungan sendiri yang sudah dikenal baik. Mengingat adalah proses fundamental dalam belajar. Oleh karena itu, LKS yang dikembangkan hendaknya menggunakan bahan ajar yang tersedia di kepulauan.

Inilah tantangan menyusun bahan, metode dan pertanyaan belajar yang relevan dan kontekstual berbasis kearifan lokal. Rumusan metode dan tujuan belajar yang kontekstual membantu dalam menyusun bahan ajar, metode belajar dan daftar pertanyaan yang mengadaptasi kearifan lokal. Contoh LKS yang sudah disusun tim pengembangan model dengan mengadaptasi kearifan lokal dan kontekstual dapat dilihat pada lampiran I.

8. Penilaian pada pembelajaran

Sesuai ketentuan dalam K-13, sistem penilaian siswa meliputi tiga aspek yaitu pengetahuan, kecakapan dan sikap. Namun waktu dan metode belajar siswa KP tidak sebagaimana siswa di kelas pada umumnya. Untuk itu perlu penyesuaian sistem penilaian untuk siswa KP. Pada prinsipnya sistem penilaian tetap sama meliputi tiga aspek namun penyesuaian yang dimaksud adalah dari segi waktu, metode dan pelaksana. Misalnya untuk pengetahuan dan kecakapan, waktu penilaian adalah saat siswa mengerjakan tugas mandiri (di saat melaut)

khususnya untuk pengetahuan, sedangkan untuk kecakapan pada saat guru melaksanakan bimbingan atau saat siswa sedang masuk ke kelas. Sedangkan untuk sikap tetap dilaksanakan penilaian di kelas, karena penilaian ini membutuhkan pengamatan langsung oleh guru. Namun demikian orang tua dan pendamping dewasa dapat dilibatkan dalam ketiga jenis penilaian dengan penyederhanaan indikator dan metode pengukurannya sesuai dengan kemampuan orang tua. Apalagi kompetensi yang terkait dengan kelautan di mana siswa dan orang tua berinteraksi langsung, menjadi peluang tinggi bagi orang tua untuk menjadi penilai dari ketiga aspek penilaian.

9. Mengintegrasikan kecakapan hidup

Salah satu tantangan siswa Kelas Perahu adalah terbatasnya waktu mengembangkan potensi diri, khususnya dalam mengembangkan kecakapan komunikasi, pribadi, sosial dan emosi. Kecakapan sebagaimana dimaksud lebih dikenal dengan istilah kecakapan abad 21. Salah satu cirinya kecakapan ini tidak dapat hanya diajarkan secara kognitif tetapi perlu dilatih dan dibiasakan. Sehingga tambahan di luar jam pelajaran menjadi penting untuk membangun kecakapan abad 21 ini.

10. Harus menggunakan pendekatan holistik lintas sektor

Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan anak bekerja dan pekerja anak bahwa kondisi tersebut melestarikan lingkaran kemiskinan, karena persoalan kemiskinan terkait dengan sektor lain. Karena masa anak (di bawah 18 tahun) masih merupakan masa tumbuh kembang, maka isu kesehatan menjadi isu yang strategis dan perlu diintegrasikan dengan Kelas Perahu seperti melibatkan tenaga medis untuk memeriksa kesehatan siswa secara reguler terutama saat mereka kembali masuk ke kelas reguler. Dan menyelenggarakan program makanan tambahan, pada hari tertentu bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan setempat.

Sedikitnya waktu mereka untuk bermain dan berkumpul dengan teman sebaya, memerlukan sekolah untuk mengintegrasikan permainan, olahraga dan bimbingan konseling secara khusus kepada siswa Kelas Perahu.

Untuk masing-masing prasyarat sekolah menentukan kondisi saat ini dan tujuan yang akan dicapai serta menentukan target semester atau tahunan. Berdasarkan target tersebut diidentifikasi sumber biaya dan pendukung. Terakhir, sekolah dan warga sekolah menentukan skala prioritas.

## BAGIAN 5

# PELEMBAGAAN LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU

Bagian ini membahas manajemen Kelas Perahu dari aspek tata kelola yang perlu dilakukan agar mekanisme pelaksanaan pendidikan Kelas Perahu bisa berjalan dan didukung multi pihak. Bagian 4 telah membahas tahapan replikasi di tingkat satuan pendidikan. Bagian 5 ini akan memaparkan tahapan replikasi di luar satuan pendidikan (dukungan ekosistem pendidikan), yang mencakup advokasi terkait tata kelola/penguatan regulasi di tingkat daerah, tata kelola/penguatan perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah (APBD, CSR) dan pusat (DAK, DID), tata kelola/dukungan kecamatan dan desa untuk Kelas Perahu, dan aktivitas terkait Kelas Perahu untuk pemenuhan SPM Pendidikan di Pangkep, serta mendorong keberlanjutan Kelas Perahu melalui input pada RPJMD.

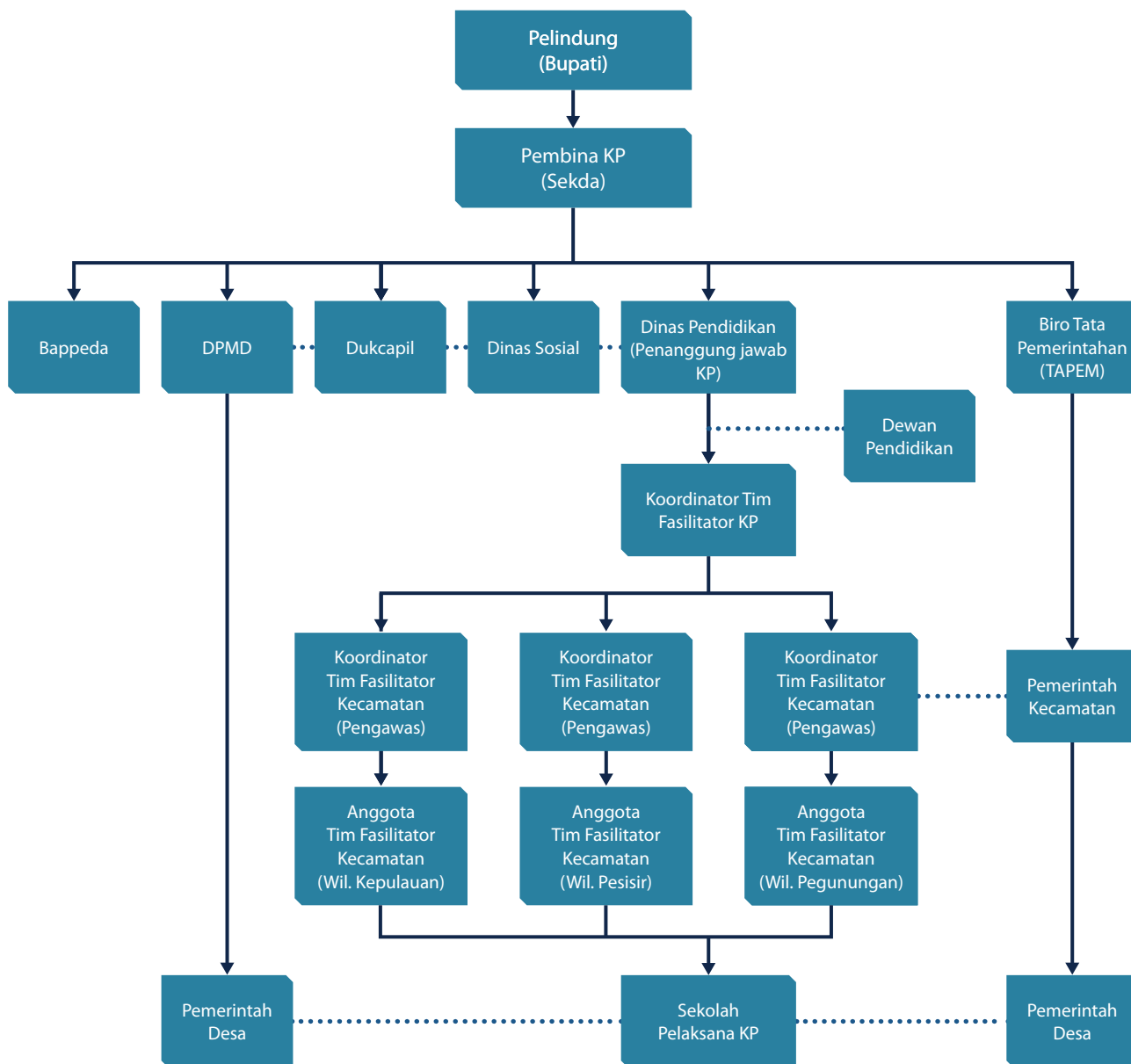
### 5.1 Struktur Organisasi: Dukungan dari Berbagai Pihak

Inovasi layanan khusus Kelas Perahu merupakan upaya penanggulangan siswa putus sekolah dari bawah ke atas (*bottom-up*). Sebagai inovasi pendidikan yang bersifat *bottom-up* di mana inisiatif adalah faktor utama tanpa menunggu kelengkapan instrumen dengan metode *trial-error*, Kelas Perahu mendapatkan pengetahuan sejalan dengan bertambahnya masa dan jumlah sekolah yang menyelenggarakan. Pengetahuan yang diperoleh dari inisiatif dan pelaksanaan di sekolah perlu dikelola dengan baik oleh tim manajemen KP. Struktur Organisasi KP di bawah ini mencerminkan upaya menggalang dukungan berbagai pihak dalam penyelenggaraan layanan pendidikan Kelas Perahu.

Sebagai implikasi dari struktur pada Gambar 14, di tingkat kabupaten berikut sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian:

- Dinas Pendidikan perlu menerbitkan kebijakan berupa regulasi atau program/anggaran yang memberikan kepastian hukum pada keberpihakan anggaran melalui APBD sekaligus peraturan
- berupa PERDA atau PERBUP yang mengatur penyelenggaraan layanan pendidikan Kelas Perahu. Regulasi yang diterbitkan di tingkat kabupaten akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Bappeda dan OPD lain untuk merancang mekanisme kerja bersama dukungan layanan pendidikan Kelas Perahu.
- Dinas Pendidikan perlu mensosialisasikan secara massif fakta-fakta layanan pendidikan Kelas Perahu yang mampu menurunkan Angka Putus Sekolah di jenjang SD-SMP di kepulauan.
- Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Bappeda merancang langkah-langkah strategis kolaboratif yang dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Pangkep serta RENSTRA Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Dinas Sosial guna memastikan layanan pendidikan Kelas Perahu terlaksana dan terukur sebagai program unggulan daerah di bidang pendidikan. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) dimulai dari musyawarah dusun-desa-kecamatan sampai kabupaten.
- Melibatkan Dinas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (DPMPD) dalam kegiatan peningkatan kapasitas aparatur DPMD terkait penyelenggaraan layanan pendidikan Kelas Perahu. Kegiatan peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, lokakarya dan kunjungan lapangan di wilayah Kelas Perahu untuk melakukan pengamatan bagaimana praktik kegiatan belajar mengajar dilakukan di atas perahu.

Gambar 14. Struktur Organisasi Kelas Perahu



→ Garis perintah  
 ..... Garis koordinasi



## 5.2 Tugas dan Peran Anggota Organisasi Kelas Perahu

Tabel 8. Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan dalam Struktur Tim Manajemen KP

Posisi/Jabatan	Fungsi dan Peran
<b>Pelindung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membuat kebijakan tentang layanan pendidikan KP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
<b>Pembina KP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan jaminan terlaksananya KP secara merata di wilayah kepulauan berdasarkan kebijakan pemerintah</li> </ul>
<b>Dinas Sosial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung Kartu Indonesia Sehat dan BLT untuk keluarga pra-sejahtera, termasuk siswa Kelas Perahu</li> </ul>
<b>Dukcapil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung pengadaan dokumen kependudukan bagi siswa Kelas Perahu</li> </ul>
<b>DPMD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong koordinasi pemerintah desa dengan tim manajemen KP dan mendukung pemberian bantuan bagi siswa Kelas Perahu kurang mampu</li> </ul>
<b>Dinas Pendidikan (Penanggung Jawab KP)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rancangan program pelaksanaan KP</li> </ul>
<b>Dewan Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung advokasi ke Pemda dan Dinas Pendidikan untuk mendukung Kelas Perahu</li> </ul>
<b>TAPEM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung Kelas Perahu dalam koordinasi lintas sektor, dalam perannya sebagai pembina kecamatan</li> </ul>
<b>Koordinator Tim Fasilitator Kabupaten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan bantuan teknis dan non teknis penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu di sekolah.</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada tingkat kabupaten.</li> <li>Integrasi K13 dengan Layanan Pendidikan Kelas Perahu</li> <li>Menyusun (menyesuaikan) sistem penilaian ABK Kelas Perahu</li> </ul>
<b>Koordinator Tim Fasilitator Kecamatan (Pengawas)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan pelaksanaan Layanan Pendidikan Kelas Perahu di wilayahnya dengan Koordinator tingkat Kabupaten.</li> <li>Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu di sekolah penyelenggara Layanan Pendidikan Kelas Perahu</li> <li>Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi di wilayah kecamatan</li> <li>Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian tindakan Kelas Perahu di kecamatan (KKG/KKKS)</li> </ul>
<b>Anggota Tim Fasilitator Kecamatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi kepala sekolah dan guru sasaran Layanan Pendidikan Kelas Perahu dalam menyiapkan perangkat pembelajaran</li> <li>Memberikan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru sasaran penyelenggara Layanan Pendidikan Kelas Perahu</li> </ul>
<b>Pemerintah Kecamatan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bimbingan pengawasan (Binwas) kepada pemerintah desa untuk dukungan pembiayaan pendidikan bagi warga desa pra-sejahtera, termasuk siswa Kelas Perahu</li> </ul>
<b>Pemerintah Desa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan informasi kepada masyarakat tentang layanan pendidikan Kelas Perahu melalui pertemuan-pertemuan warga.</li> <li>Memotivasi warga untuk mendukung layanan pendidikan Kelas Perahu.</li> <li>Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang kriteria peserta didik yang dapat dilayani melalui layanan pendidikan Kelas Perahu.</li> </ul>

### 5.3 Komponen Pembiayaan Pelaksanaan Kelas Perahu

Tujuan pembiayaan Kelas Perahu ini salah satunya sebagai dukungan layanan pendidikan Kelas Perahu agar dapat mandiri, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagai salah satu aktivitas konkret yang berkaitan dengan pendidikan, maka diperlukan mekanisme pembiayaan terpadu untuk kesuksesan pelaksanaan pelayanan Kelas Perahu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### 5.3.1 Jenis, sumber dan penanggung jawab pembiayaan pelayanan Kelas Perahu

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembiayaan Kelas Perahu (dengan pendekatan pendekatan PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050/3708/2020), maka beberapa kegiatan dan pembiayaan yang digunakan adalah:

Tabel 9. Nama Kegiatan/Sub-Kegiatan Sesuai Nomenklatur yang Dapat Digunakan untuk Mendukung Pendanaan Pelayanan Kelas Perahu Melalui APBD Dinas Pendidikan

No	Jenis Program	Kode Biaya	Nama kegiatan yang dapat didukung sesuai dengan kode biaya
<b>Belanja Program</b> mendukung pelayanan Kelas Perahu antara lain			
1	1.02.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.02.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Dasar Serta sub kegiatan nomor 23. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dan 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
		1.02.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Serta sub kegiatan nomor 32. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik, dan 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Jenis belanja dan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan Kelas Perahu di bawah ini adalah jenis pembiayaan minimum yang diharapkan yang tersedia untuk mendukung pelayanan Kelas Perahu, sebagian masih memerlukan pengadaan dengan dukungan dari peran lintas sektor. Adapun jenis pembiayaan minimum yang diharapkan mencakup kebutuhan berikut di bawah ini:

**Belanja Operasi pada APBD Dinas Pendidikan**, yang termasuk dalam belanja operasi untuk pelayanan Kelas Perahu ini adalah:

- Belanja untuk Penyusunan Peraturan, Kebijakan dan SOP (Pembuatan regulasi tingkat kabupaten seperti peraturan bupati dan sejenisnya untuk mendukung pelaksanaan Kelas Perahu) terdiri atas: belanja kertas, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, dan honorarium panitia.
- Belanja untuk desain kurikulum Kelas Perahu, terdiri atas: belanja kertas, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, dan honorarium panitia.
- Belanja untuk pembinaan kapasitas pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam mendukung pelaksanaan Kelas Perahu, terdiri atas: belanja alat tulis kantor, cetak, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, honorarium panitia, dan uang saku peserta sosialisasi
- Belanja untuk sosialisasi model layanan pendidikan Kelas Perahu kepada pemerintah desa, dan sekolah lain di wilayah kabupaten, terdiri atas: belanja alat tulis kantor, cetak, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, honorarium panitia dan uang saku peserta sosialisasi.

- Belanja untuk penyusunan RPP dan LKS, terdiri atas: belanja kertas, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, dan honorarium panitia.
- Belanja untuk pelatihan guru/fasilitator, terdiri atas: belanja alat tulis kantor, cetak, makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber/pembahas, honorarium panitia dan uang saku peserta sosialisasi.
- Belanja untuk pelaksanaan kelas Perahu, yang ditanggung APBD Dinas Pendidikan adalah: belanja jasa pendidikan.
- Belanja untuk penyusunan/pendataan/pemutakhiran anak usia sekolah melaut, terdiri atas: belanja alat tulis kantor dan benda pos, cetak/penggandaan, barang konsumsi (makanan dan minuman), honorarium petugas, dan honorarium tim yang melaksanakan kegiatan.

Tabel 10. Contoh Ilustrasi Belanja Operasional pada APBD Dinas Pendidikan

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Total Biaya
	<b>01.01.02.2.01.28</b>	<b>Sub-Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</b>	
1		Penyusunan Peraturan, Kebijakan dan SOP (Pembuatan regulasi tingkat kabupaten seperti peraturan bupati dan sejenisnya untuk mendukung pelaksanaan kelas perahu)	<b>19,562,700</b>
2		Desain Kurikulum Kelas Perahu	<b>17,168,600</b>
3		Pembinaan kapasitas pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam mendukung pelaksanaan kelas perahu	<b>12,417,550</b>
4		Sosialisasi model layanan pendidikan kelas perahu kepada Pemerintah Desa, dan sekolah lain di wilayah kabupaten	<b>13,075,000</b>
5		Penyusunan RPP dan LKS	<b>17,168,600</b>
6		Pelatihan Guru/Fasilitator	<b>10,603,450</b>
	<b>1.01.02.2.01.23</b>	<b>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</b>	
		Pelaksanaan Kelas Perahu (Jasa Tendik)	<b>535,857,760</b>
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa (Pendataan (Penyediaan Data) Anak Usia Sekolah melaut)	<b>52.176.880</b>

**Belanja Operasional dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**, yang termasuk dalam belanja yang berasal dari BOS ini adalah:

- Belanja untuk pelaksanaan Kelas Perahu, yang ditanggung BOS adalah: belanja ATK, kertas, cetak dan belanja makanan dan minuman untuk fasilitas urusan pendidikan.

**Belanja Dari APB Desa**, yang termasuk dalam belanja yang dapat ditanggung oleh APBDesa adalah:

- Belanja untuk sosialisasi ke masyarakat dan orang tua murid (penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat), terdiri atas: belanja alat tulis kantor dan benda pos, cetak/penggandaan, barang konsumsi (makanan dan minuman), honorarium tenaga ahli/narasumber, dan honorarium tim yang melaksanakan kegiatan.

- Belanja untuk pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, diperuntukkan bagi belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa (bagi guru pendamping yang juga melakukan tugas sebagai pendamping dan pembina sanggar seni dan belajar)
- Belanja untuk beasiswa murid (masuk pada klasifikasi beasiswa berprestasi/masyarakat miskin)

Tabel 11. Contoh Ilustrasi pada Belanja APB Desa (Permendagri 20/2018)

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Total Biaya
1	2.1.03	Sosialisasi ke Masyarakat dan Orang Tua Murid (Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat)	56,425,600
2	2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	168,000,000
3	2.1.10	Beasiswa Murid	52,800,000

### Analisis Standar Belanja Penyelenggaraan Kelas Perahu

Untuk pembiayaan keseluruhan penyelenggaraan Kelas Perahu, dapat dikelompokkan menurut komponen yang terdiri atas beberapa kegiatan dan sub-kegiatan dan sumber pendanaan/pembiayaan.

Berdasarkan analisis awal terkait jenis pembiayaan untuk pelayanan Kelas Perahu, lihat Lampiran VII: Komponen Pembiayaan Kelas Perahu untuk contoh pembiayaan pelayanan Kelas Perahu yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut.

### 5.3.2 Sumber Pembiayaan Kelas Perahu melalui pendanaan lainnya

Di samping beberapa skema pendanaan sebagaimana dijelaskan di atas, beberapa pendanaan lain dapat digunakan sebagai pendukung, di antaranya:

1. *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan.
2. Dana Insentif Daerah (DID).
3. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

## 5.4 Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Desa untuk Mendukung Layanan Pendidikan Kelas Perahu

Aturan perundang-undangan di tingkat nasional sudah sejalan dengan advokasi layanan Pendidikan Kelas Perahu dalam tata kelola pemerintahan kecamatan dan desa. Implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memberi peluang baru bagi camat. Camat sebagai aparat pemerintah daerah terdepan dan terdekat dengan masyarakat, dapat memainkan peran lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan. Camat juga memiliki peran sentral dan strategis dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), pemerintah desa dan kelurahan, swasta, dan masyarakat madani di wilayah kerjanya. Camat saat ini merupakan penyelenggara urusan pemerintahan umum sehingga camat bertanggung jawab menciptakan kondisi yang harmonis dan kondusif di wilayah kerjanya. Di samping itu, camat dapat menerima pelimpahan sebagian kewenangan bupati. Dalam konteks Pemerintahan Kabupaten Pangkep, telah lahir Perbup yang mengatur delegasi

kewenangan ke pemerintah kecamatan, termasuk dalam bidang Pendidikan.<sup>4</sup> Sebagai pembina teknis pemerintah desa, peran pemerintah kecamatan sangat penting dalam mengidentifikasi kebutuhan jika ada anak yang tidak bisa sekolah karena melaut di wilayahnya, dan mendorong upaya untuk memastikan mereka tidak putus sekolah.

Pengembangan layanan pendidikan Kelas Perahu tidak semata tanggung jawab Dinas Pendidikan namun perlu adanya kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pangkep mulai dari Bappeda, Dinas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Kerja sama ini dapat diwujudkan dengan membangun mekanisme kerja bersama yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan mulai dari desa sampai kabupaten untuk memastikan siswa yang melaut terpenuhi hak pendidikannya.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Desa mengatur Desa berwenang melaksanakan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang diserahkan Daerah kepada Desa. Desa dapat menjadikan urusan Pendidikan khususnya anak tidak sekolah sebagai kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Desa dan Daerah dapat melimpahkan sebagian urusan pendidikan kepada Desa melalui Peraturan Bupati.<sup>5</sup> Hal ini juga sejalan dengan tujuan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa yang disebutkan dalam Permendagri 2/2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa yaitu dapat mempermudah pelayanan, mempercepat pelayanan, dan menjadikan pelayanan lebih efektif. Pemerintah desa sebagai representasi negara di tingkat desa perlu memastikan bahwa anak-anak di usia sekolah terlayani hak pendidikan tanpa diskriminasi. Layanan pendidikan Kelas Perahu lahir dikarenakan situasi khusus yang dialami oleh keluarga nelayan dan mempunyai efek domino pada kemiskinan dan aksesibilitas anak-anak terhadap perlindungan sosial. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan ruang publik di desa untuk mengadvokasi situasi anak-anak yang melaut ini di dalam proses Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Masyarakat (Musrenbang) Desa.

Musrenbang desa merupakan forum dialogis antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan di desa bertujuan membangun kesepahaman serta menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan desa dan diusulkan sebagai program pembangunan desa. Tidak hanya itu, Musrenbang desa juga merupakan forum pendidikan warga untuk berpartisipasi aktif dalam tata pemerintahan desa. Hal terpenting dalam pelaksanaan Musrenbang dari tingkat dusun sampai desa adalah bagaimana memasukkan usulan menjadi program prioritas yang didukung oleh pemerintah desa dan seluruh peserta Musrenbang.

Tentunya perlu beberapa trik agar usulan layanan pendidikan Kelas Perahu dapat diterima sebagai program pembangunan desa antara lain;

- Sekolah membangun koordinasi regular dengan pemerintah desa terkait pentingnya layanan pendidikan Kelas Perahu berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia di desa yang dibuktikan dengan fakta-fakta pendukung pelaksanaan Kelas Perahu.
- Mendorong pemerintah desa untuk aktif mendata warganya yang tidak sekolah.
- Melakukan negosiasi kepada Kepala Desa sebagai pengambil keputusan untuk menerbitkan kebijakan berupa peraturan dan program/anggaran yang mendukung layanan pendidikan Kelas Perahu dilakukan melalui tahapan Musrenbang.
- Pemerintah desa memfasilitasi ruang diskusi di antara guru dengan tokoh masyarakat untuk mengembangkan LKS kontekstual yang akan digunakan oleh guru Kelas Perahu.
- Guru kelas melaut membangun diskusi regular dengan tim panitia Musrenbang Desa yang disebut tim 11 untuk memastikan akses layanan pendidikan Kelas Perahu dapat diusulkan sebagai usulan prioritas sejak musyawarah dusun – desa – kecamatan dan kabupaten.

<sup>4</sup> Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 537 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

<sup>5</sup> Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

- Dalam proses Musrenbang desa perlu ditunjuk salah satu guru Kelas Perahu sebagai negosiator guna memperjuangkan layanan pendidikan Kelas Perahu.
- Memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat yang dapat membantu tugas guru Kelas Perahu sebagai tanggung jawab sosial desa untuk menurunkan angka putus sekolah
- Pemerintah desa dan sekolah dapat melaksanakan dukungan peningkatan kompetensi guru kelas melaut melalui pelatihan berkala serta pemberian insentif menggunakan skema anggaran Dana Desa

## BAGIAN 6

# MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN PENDIDIKAN KELAS PERAHU

## 6.1 Teori Perubahan Penerapan Kelas Perahu

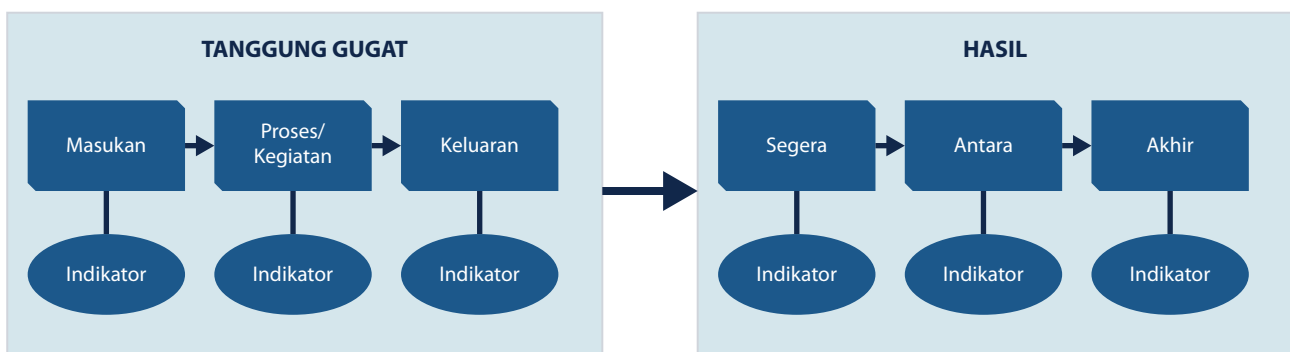
Layanan publik pada umumnya mengutamakan pendekatan penawaran (*supply*) dan berorientasi keluaran (*output*). Hal ini wajar karena salah satu indikasi kinerja adalah serapan dana. Namun, orientasi pada keluaran saja menciptakan kesenjangan pada kualitas (proses) dan hasil yang diharapkan (tujuan). Maka dalam konteks MONEV KP kerangka pengukuran kinerja tidak hanya mencakup masukan (serapan, atau input) dan keluaran saja, namun juga proses (kualitas) dan hasil belajar (*learning outcomes*).

Teori perubahan sebagaimana terlihat pada Gambar 15 dimulai oleh proses atau kegiatan yang membutuhkan masukan dan memproduksi keluaran. Keluaran diharapkan menyumbang pada hasil yang diharapkan. Hasil adalah perubahan yang terjadi setelah keluaran. Berdasarkan waktu, hasil yang diraih dapat diklasifikasikan menjadi tiga hasil yaitu:

- Hasil segera atau jangka pendek (*immediate outcomes*), sebagai contoh dalam kegiatan pelatihan kurikulum, setelah pelatihan usai, guru memahami konsep dan pelaksanaan kurikulum baru (misalnya K13).
- Hasil antara atau jangka menengah (*intermediate outcomes*), misalnya setelah 2 tahun semenjak pelatihan kurikulum K13 dilaksanakan, guru menerapkan K13 di ruang kelas. Perubahan perilaku guru tidak terjadi otomatis setelah pelatihan K13 dilaksanakan, karena membutuhkan seperangkat kebijakan penerapan termasuk anggaran.
- Hasil utama atau jangka panjang (*ultimate outcomes*), misalnya meningkatnya kinerja guru yang berdampak pada meningkatnya pengetahuan dan kecakapan siswa.

Hasil inilah yang disebut perubahan, perubahan memiliki beragam padanan atau istilah dalam manajemen antara lain tujuan (*objectives*), *aims*, *goals* dan *outcomes*. Pada intinya, hasil adalah sesuatu sesudah keluaran (*a thing beyond outputs*).

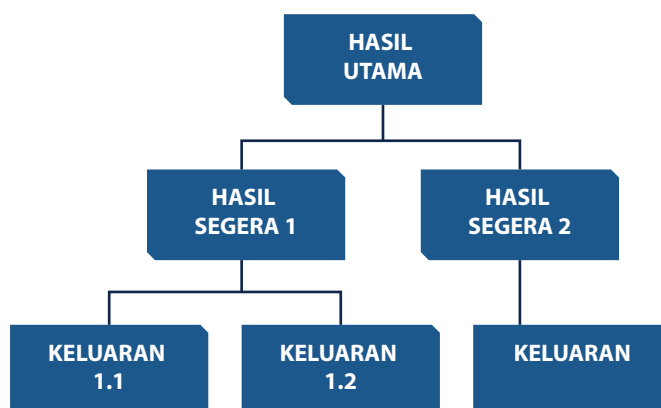
Gambar 15. Rangkaian Teori Perubahan



Kerangka MBH menyerupai bangunan piramida seperti pada Gambar 16. Hasil utama setidaknya memiliki satu atau lebih hasil antara, sedangkan satu hasil antara memiliki satu atau lebih hasil segera, dan pada akhirnya hasil segera memiliki satu atau lebih keluaran.

Pendekatan MBH memerlukan akurasi dalam mendefinisikan pernyataan keluaran dan hasil untuk dapat mengidentifikasi permasalahan (apa), penerima manfaat (siapa) dan lokasi (di mana). Mungkin terlihat sepele, tetapi akurasi pernyataan keluaran dan hasil berpengaruh pada saat pemilihan indikator dan bagaimana cara mengukurnya (metode).

Gambar 16. Hubungan Hasil dan Keluaran



## 6.2 Indikator Keberhasilan

Kerangka pengukuran kinerja Kelas Perahu menggunakan pendekatan MBH, sebagaimana diuraikan dalam sub bab 6.1. Sub bab ini menguraikan indikator keluaran dan hasil yang merupakan rangkaian kausalitas tercapainya tujuan utama diselenggarakannya Kelas Perahu. Untuk matrik pengukuran kinerja dapat dilihat pada lampiran IV.

### 6.2.1 Hasil Utama

Permasalahan utama yang melatarbelakangi LPKP adalah tingginya AnPS karena melaut. Dari rumusan masalah tersebut, pernyataan tujuannya adalah **menurunkan peluang anak putus sekolah**. Indikator kinerja yang mampu mengukur langsung perubahan tercapainya hasil utama ini adalah Menurunnya Angka Putus Sekolah berdasarkan wilayah dan gender. Penyebab putus sekolah tidak hanya karena siswa melaut tetapi ada faktor lain, dengan demikian indikator Angka Putus Sekolah perlu mendapatkan penjelasan dengan indikator kinerja lain yaitu Rasio Anak Putus Sekolah karena melaut.

Anak Putus Sekolah dirumuskan sebagai jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran baru dibagi dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran sebelumnya dan dirumuskan dalam rumus berikut:

$$PPS = \frac{APtS}{JS}$$



Di mana:

- PPS adalah Persentase Putus Sekolah pada jenjang pendidikan tertentu ditunjukkan dalam persen. 0% bermakna tidak ada anak putus sekolah, sedangkan 100% bermakna seluruh anak putus sekolah.
- APtS adalah jumlah anak putus sekolah pada tahun ajaran baru
- JS adalah jumlah siswa pada tahun ajaran sebelumnya

Agar indikator kinerja PPS ini mampu memperlihatkan kesenjangan pada beberapa aspek penting seperti wilayah dan gender, PPS dipilah berdasarkan wilayah (kecamatan, perkotaan/perdesaan) dan gender (jenis kelamin).

Indikator tambahan untuk menjelaskan PPS adalah Rasio Anak Putus Sekolah karena Melaut disingkat RAPS. RAPS merupakan hasil bagi jumlah siswa putus sekolah karena melaut dengan jumlah seluruh siswa putus sekolah yang dirumuskan sebagai berikut:

$$RAPS = \frac{APSM}{APtS}$$

Di mana:

- RAPS adalah Rasio Anak Putus Sekolah karena melaut. Sebagai sebuah rasio, nilai berada pada rentang 0 yang berarti tidak ada anak putus sekolah karena melaut dan 1 yang berarti seluruh anak putus sekolah adalah anak yang melaut. Rasio bisa pula ditunjukkan menggunakan persen dengan mengalikan konstan 100 seperti contoh pada gambar 4 dan gambar 5.
- APSM adalah jumlah Anak Putus Sekolah karena Melaut.
- APtS adalah jumlah anak putus sekolah

Selain PPS dan RAPS, keberhasilan menurunkan peluang anak putus sekolah karena melaut adalah menurunnya jumlah anak yang melaut.

## 6.2.2 Hasil Segera

Hasil segera yang diharapkan berdasarkan analisis kausalitas dari kondisi awal replikasi Kelas Perahu adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Kelas Perahu
2. Tersedianya data peserta didik Kelas Perahu di setiap satuan pendidikan
3. Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun LKS (lembar kerja siswa) yang memuat kearifan lokal
4. Terselenggaranya layanan Kelas Perahu yang berkualitas dan tepat sasaran dengan keterlibatan lintas sektor
5. Meningkatnya dukungan pemerintah kecamatan dan desa untuk pelaksanaan replikasi Kelas Perahu

Indikator dari capaian *outcome*/target dalam pelaksanaan Kelas Perahu terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Indikator Capaian *Outcome*/target Pelaksanaan Kelas Perahu

No	<i>Outcome</i> /Target	Indikator/Target Output
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan sKelas Perahu	1.1. Proporsi tenaga PTK penyelenggara Kelas Perahu mendapat insentif 1.2. Proporsi guru memberikan masukan/pendampingan terhadap LKS 1.3. Proporsi tingkat keamanan LKS dan bahan ajar lain
2	Tersedianya data peserta didik Kelas Perahu di setiap satuan pendidikan	2.1. Proporsi tersedianya data peserta didik Kelas Perahu di setiap satuan
3	Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun LKS (lembar kerja siswa) yang memuat kearifan lokal	3.1. Proporsi kandungan lokal bahan ajar 3.2. Proporsi Kejelasan langkah pembelajaran mandiri
4	Terselenggaranya layanan Kelas Perahu yang berkualitas dan tepat sasaran dengan keterlibatan lintas sektor	4.1. Adanya monev penyelenggaraan layanan Kelas Perahu 4.2. Proporsi siswa melaut yang mempunyai akta lahir dan Kartu Keluarga Anak) 4.3. Proporsi siswa melaut yang mendapat bantuan sosial dari dinas sosial 4.4. Proporsi keluarga dari siswa melaut yang mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) 4.5. Proporsi siswa melaut yang memiliki KIS
5	Meningkatnya dukungan Pemerintah Kecamatan dan desa untuk pelaksanaan replikasi Kelas Perahu	5.1. Proporsi tersedianya dukungan anggaran terhadap layanan kelas perahu 5.2. Proporsi adanya dukungan kebijakan terhadap layanan Kelas Perahu 5.3. Proporsi adanya kegiatan sosialisasi pelaksanaan Kelas Perahu

Berikut beberapa metode pengukuran berdasarkan *outcome*/target yang merupakan kerangka kinerja layanan Kelas Perahu:

1. *Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan Kelas Perahu*

Target dari indikator ini adalah penyediaan insentif bagi tenaga PTK penyelenggara Kelas Perahu. Insentif yang diterima harus dibuktikan dengan pendampingan guru kepada siswa melalui kunjungan langsung ke rumah untuk menyerahkan LKS kepada siswa melaut, dan/atau memeriksa LKS dan mendampingi siswa apabila mengalami kendala dalam menyelesaikan LKS yang diserahkan kepada guru.

Insentif bagi guru akan diberikan sesuai dengan laporan yang masuk dari Kepala Sekolah dan mendapat verifikasi dari Kabid. Dinas Pendidikan.

Selain insentif guru, pada target ini juga perlu mengukur sejauh apa guru mendampingi siswa Kelas Perahu. Siswa KP menggunakan bahan dan metode belajar yang berbeda, oleh karena itu dibutuhkan kompetensi guru mendampingi siswa KP. Setidaknya terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi pendampingan siswa KP yaitu:

- Tingkat kesiapan bahan ajar (LKS)
- Tingkat kejelasan langkah belajar tugas mandiri
- Tingkat kesiapan guru pendamping
- Tingkat keamanan LKS dan bahan ajar lain

Tabel 13 berikut menjelaskan operasional indikator lebih lanjut.

Tabel 13. Indikator Kompetensi Pendampingan Siswa KP

Indikator	Level descriptor	Penjelasan
Tingkat Kesiapan bahan ajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat Siap</li> <li>2. Cukup Siap</li> <li>3. Kurang Siap</li> <li>4. Tidak Siap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan ajar sudah dipersiapkan seminggu sebelumnya</li> <li>2. Bahan ajar sudah dipersiapkan 2 hingga 5 hari sebelumnya</li> <li>3. Bahan ajar baru disiapkan kurang dari 2 hari</li> <li>4. Tidak membuat bahan ajar</li> </ol>
Tingkat Kejelasan langkah belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat jelas</li> <li>2. Cukup jelas</li> <li>3. Kurang jelas</li> <li>4. Tidak jelas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langkah belajar sangat jelas ditandai dengan tambahan penjelasan secara visual dan verbal.</li> <li>2. Langkah belajar tertulis di dalam LKS dan dapat diikuti alurnya.</li> <li>3. Langkah belajar tertulis di dalam LKS tetapi tidak dapat diikuti alurnya</li> <li>4. Di dalam LKS tidak ada penjelasan langkah belajar</li> <li>5. tugas mandiri</li> </ol>
Tingkat kesiapan guru pendamping	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat siap</li> <li>2. Cukup siap</li> <li>3. Kurang siap</li> <li>4. Tidak siap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Guru pendamping sudah mempersiapkan bahan ajar dan LKS yang telah disusun pada awal tahun ajaran sesuai dengan kebutuhan dan siap kapan saja dibutuhkan oleh siswa KP</li> <li>2. Guru pendamping mempersiapkan bahan ajar dan LKS yang telah disusun setiap bulan sesuai dengan kebutuhan siswa KP</li> <li>3. Guru pendamping mempersiapkan bahan ajar dan LKS yang disusun pada saat siswa membutuhkan</li> <li>4. Guru pendamping tidak mempersiapkan bahan</li> <li>5. ajar dan LKS yang dibutuhkan oleh siswa KP</li> </ol>
Tingkat keamanan dokumen LKS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sangat aman</li> <li>2. Cukup aman</li> <li>3. Kurang aman</li> <li>4. Tidak aman</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKS dan bahan ajar terbuat dari bahan kedap atau tahan air.</li> <li>2. LKS dan bahan ajar terbuat dari kertas dan dilapisi bahan kedap atau tahan air</li> <li>3. LKS dan bahan ajar terbuat dari kertas dan ditempatkan pada tempat dari bahan kedap atau tahan air</li> <li>4. LKS dan bahan ajar terbuat dari kertas dan tidak dilengkapi dengan pengaman apapun</li> </ol>

2. Tersedianya data peserta didik Kelas Perahu di setiap satuan Pendidikan

Data siswa yang dikumpulkan setiap tahun adalah data siswa per sekolah dari satuan Pendidikan SD dan SMP. Data siswa berdasarkan pada nama sekolah, jumlah siswa per sekolah, jumlah siswa yang terdaftar sebagai siswa Kelas Perahu, jumlah siswa yang mengikuti ujian, dan jumlah siswa yang putus sekolah (Lihat Lampiran 2).

3. Meningkatnya Kompetensi Guru Menyusun LKS Kontekstual dan Berkearifan Lokal

Kompetensi guru menyusun LKS kontekstual dan berkearifan lokal dapat dilihat dari portofolio berupa LKS apakah mengandung konten bahan ajar lokal, konten ini dapat disepakati dengan menggunakan persentase dan jenjang penjelasan (level deskriptor), sebagai dalam tabel berikut:

Tabel 14. Indikator Kandungan Lokal Bahan Ajar

Persentase	Kelompok	Jenjang Penjelasan
$P \leq 25\%$	Pemula	Tidak ada konten lokal atau tersedia konten lokal namun hanya sedikit, mencapai 25% dari total bagian LKS sesuai kurikulum yang berlaku.
$25\% < P \leq 50\%$	Madya	Konten lokal mencapai lebih dari 25% hingga separuh dari bagian LKS sesuai kurikulum yang berlaku.
$50\% < P \leq 75\%$	Utama	Konten lokal tersedia pada hampir seluruh bagian LKS, yaitu paling sedikit separuh dan paling banyak 75% bagian LKS sesuai kurikulum yang berlaku.
$P > 75$	Pamungkas	Konten lokal tersedia pada seluruh bagian LKS, atau paling sedikit lebih dari 75% bagian LKS sesuai kurikulum yang berlaku.

Selain proporsi kandungan lokal dalam bahan ajar (LKS) kejelasan langkah belajar menjadi strategis mengingat waktu belajar siswa KP sangatlah terbatas. Sehingga perlu dipantau kejelasan langkah pembelajaran dalam LKS. Indikator kejelasan langkah pembelajaran mandiri disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 15. Indikator Kejelasan Langkah Pembelajaran Mandiri

Persentase	Kelompok	Jenjang Penjelasan
$P \leq 25\%$	Pemula	Tidak ada informasi langkah belajar sampai dengan tersedia penjelasan namun belum tersedia penjelasan secara runtut dan visual
$25\% < P \leq 50\%$	Madya	Langkah belajar tersedia termasuk visual namun belum runtut
$50\% < P \leq 75\%$	Utama	Langkah belajar tersedia termasuk visual dan runtut
$P > 75$	Pamungkas	Penjelasan cukup rinci tetapi singkat dan padat dilengkapi visual dan runtut (logik)

4. *Terselenggaranya layanan Kelas Perahu yang berkualitas dan tepat sasaran dengan keterlibatan lintas sektor*  
 Pada bagian ini, indikator monev penyelenggaraan layanan Kelas Perahu diukur melalui jumlah kegiatan monitoring yang dilakukan oleh pengawas kepada sekolah-sekolah yang menerapkan layanan pendidikan kelas perahu. Monitoring ini juga dapat melibatkan lintas sektor yang berkepentingan untuk melihat sejauh apa siswa melaut mendapat bantuan PKH (program keluarga harapan), mempunyai akte lahir/KIS (Kartu Identitas Anak) dan Kartu Indonesia Sehat.
5. *Meningkatnya dukungan Pemerintah Kecamatan dan desa untuk pelaksanaan replikasi Kelas Perahu*

#### 6.2.2.1. Meningkatkan Dukungan Pemerintahan Desa pada Kelas Perahu

Pemerintahan Desa merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang dan anggaran, sehingga dukungan dan keterlibatan Pemerintah Desa dalam KP menjadi hal yang strategis dan perlu diupayakan secara terencana dan sistematis.

Dukungan Pemerintah Desa dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan dana, bantuan teknis atau fasilitasi dan kebijakan. Dengan demikian untuk mengukur meningkatnya dukungan Pemerintahan Desa dapat dipergunakan beberapa indikator sebagaimana tersaji di dalam tabel 16:

Tabel 16. Indikator Meningkatnya Dukungan Pemerintah Desa

Hasil	Indikator	Metode
Meningkatkan dukungan pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya anggaran untuk mendukung KP</li> <li>▪ Meningkatnya proporsi serapan anggaran untuk mendukung KP</li> </ul>	Dokumentasi & Wawancara
Meningkatkan bantuan teknis atau fasilitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kegiatan dukungan kepada KP</li> </ul>	Dokumentasi & Wawancara
Meningkatkan dukungan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatnya kebijakan yang dikeluarkan Pemdes untuk KP</li> </ul>	Dokumentasi & Wawancara

Sebagaimana dibahas di Bagian 4: Tata Kelola Kelas Perahu, pembelajaran dari replikasi layanan KP terutama terkait struktur tim manajemen menunjukkan peran sentral pemerintah desa. Sehingga upaya mendorong indikator “Meningkatnya Dukungan Pemerintahan Desa pada Kelas Perahu” perlu mendapat perhatian khusus untuk menjamin keberlanjutan layanan KP. Struktur manajemen dan skema monitoring dan evaluasi KP juga mempersyaratkan tiap satuan pendidikan bertanggungjawab melakukan replikasi di sekitar sekolahnya. Dalam hal ini, peran aparat desa untuk mendata siswa yang layak masuk kategori penerima layanan Kelas Perahu, terutama pada pembelajaran tahun ajaran baru, sangat krusial.

### 6.2.3 Keluaran dan Kegiatan

Untuk meraih hasil segera sebagaimana telah diuraikan pada sub bab terdahulu, Dinas Pendidikan selaku sektor utama dan sekolah pelaksana layanan KP perlu menyusun rencana kegiatan yang menghasilkan keluaran setiap tahun ajaran/keuangan. Keluaran dan kegiatan tidak diuraikan di dalam buku panduan pelaksanaan karena akan sangat bergantung pada (i) apakah sekolah melaksanakan layanan KP atau tidak dan (ii) kondisi sosial, ekonomi dan budaya setempat. Hasil segera tersebut di atas dapat ditambahkan ke dalam rencana strategis setiap unit (sekolah dan Dinas Pendidikan) dan menjadi acuan dalam menyusun kegiatan.

## 6.3 Pelaksanaan MONEV

Lampiran IV menyajikan kerangka pengukuran kinerja dalam bentuk matriks yang terdiri dari hasil utama yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan KP dan hasil segera merupakan hasil yang menjadi perantara keluaran dan hasil utama.

Komponen penting dalam kerangka pengukuran kinerja adalah indikator, target dan data dasar. Ketiganya merupakan komponen utama monev yang tidak terpisah, karena tanpa ketiga komponen tersebut sebuah kinerja atau perubahan tidak dapat diukur.

Sekolah penyelenggara KP memasukkan kelima hasil segera dan satu hasil utama ke dalam RKJM dan selanjutnya mengacu pada kelima hasil segera untuk menyusun kegiatan dan anggaran. Begitu pula dengan Dinas Pendidikan dan OPD lain terkait mencantumkan hasil utama dan semua atau sebagian hasil segera yang relevan ke dalam Renstra. Berdasarkan hasil segera tersebut tiap OPD menyusun kegiatan dan anggaran tahunan.



*Perkenalkan nama saya Dharmawaty. MT, saya seorang tenaga Pengajar di SDN 23 Pulau Sakuala Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Sebelum Layanan Kelas Perahu muncul, Saya sebagai guru sempat trenyuh melihat kondisi siswa yang sering tidak hadir di kelas. Belum lagi harus berhadapan dengan orang tua siswa yang kurang ramah tiap kali saya datang ke rumah siswa untuk mengajaknya kembali ke sekolah. Mungkin dalam pikiran orang tuanya, saya seolah menghalangi anaknya untuk membantu pekerjaannya.*

*Dengan hadirnya program layanan Kelas Perahu ini telah memberikan jalan keluar untuk siswa supaya bisa mengikuti proses belajar dan tidak lagi ketinggalan pelajaran di sekolah.*

*Menurut saya, layanan Kelas Perahu dapat membantu siswa mendapatkan pendidikan seperti siswa lainnya, tanpa mengabaikan kewajiban membantu orang tuanya.*

*Harapan saya ke depan, siswa tersebut bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sukses terus buat Kelas Perahu. Semoga ke depan selalu ada inovasi untuk pendidikan anak bangsa yang membutuhkan.*

**(Dharmawaty, MT, S.Pd -40 tahun, Guru di SDN 23 Pulau Sakuala)**



## BAGIAN 7

# DAMPAK PELAKSANAAN KELAS PERAHU

Di Kabupaten Pangkep, strategi pencegahan ATS melalui inovasi Kelas Perahu, sesuai dengan tujuannya, berhasil menahan anak rentan ATS di dalam sistem persekolahan formal. Data pada tahun ajaran 2016/17 dan 2017/18 menunjukkan bahwa program ini berhasil menahan 7,7% dan 7,8%, siswa yang melaut dari putus sekolah (Tabel 17). Pada tahun ke- 3, Kelas Perahu berhasil mendorong perubahan perilaku orang tua dan siswa sehingga di tahun ajaran berikutnya, jumlah siswa SD dan SMP yang melaut di jam sekolah berkurang menjadi 1.8% hingga 1.9%.

Tabel 17. **Capaian Kelas Perahu Dalam Menahan Anak Rentan di Dalam Sistem Persekolahan**

Jenjang Pendidikan	Σ Pelajar				Pelajar Melaut (Kelas Perahu) (Σ dan %)			
	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
SD	1682	1665	1690	1678	93 (5.5%)	102 (6.1%)	31 (1.8%)	29 (1.7%)
SMP	621	634	694	652	86 (13.8%)	75 (11.8%)	15 (2.2%)	14 (2.1%)
Jumlah	2303	2299	2384	2330	179 (7.8%)	177 (7.7%)	46 (1.9%)	43 (1.8%)

Sumber: Hasil analisis dari presentasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam FGD 23 Oktober 2020

Secara keseluruhan, capaian yang diperoleh dari berbagai rangkaian skema replikasi layanan Kelas Perahu yang dilaksanakan oleh Pemda Pangkep dengan dukungan KOMPAK telah menunjukkan hasil yang memuaskan terkait akses pendidikan dasar khususnya untuk keberlanjutan dari layanan Pendidikan Kelas Perahu. Terutama, dalam kaitannya dengan strategi tata kelola penanganan anak tidak sekolah (ATS) di wilayah dukungan KOMPAK,<sup>6</sup> menunjukkan layanan pendidikan Kelas Perahu berkontribusi dalam memperkaya Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia,<sup>7</sup> dalam dua ranah sekaligus: penanganan dan pencegahan. Dokumen tersebut menemukan berbagai inovasi penanganan ATS yang didukung KOMPAK, termasuk Kelas Perahu, berhasil mengembalikan ATS ke sekolah melebihi target awal yang ditetapkan. Selain itu, praktik belajar mengajar yang disesuaikan dengan kondisi anak rentan putus sekolah menjadi praktik baik dalam strategi pencegahan ATS. Capaian penting lain adalah keberhasilan membangun desain model dengan pelembagaan berjenjang, dari tingkat kabupaten hingga desa. Pendekatan ini memastikan kepemimpinan Bappeda, keterlibatan pemerintahan desa dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya replikasi, perluasan sebaran dan cakupan, ketersediaan anggaran, dan keberlanjutan program.

<sup>6</sup> KOMPAK. 2020. Akses Pendidikan Dasar Bagi Semua Anak Indonesia Strategi Tata Kelola Penanganan Anak Tidak Sekolah di Wilayah Dukungan Kompak. Jakarta: KOMPAK.

<sup>7</sup> [https://www.bappenas.go.id/files/8415/9211/1143/Stranas\\_ATS\\_di\\_Indonesia\\_2019-2020\\_ALL.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/8415/9211/1143/Stranas_ATS_di_Indonesia_2019-2020_ALL.pdf)

Bagian di bawah ini menyajikan capaian dan dampak pelaksanaan Kelas Perahu mengikuti alur skema pelaksanaan layanan inovasi pendidikan pada Bagian 4, adalah sebagai berikut:

### 1. Telah disusun tiga regulasi kunci untuk mendukung perluasan Kelas Perahu

- Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Kelas Perahu.<sup>8</sup> Perbup No. 36 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan layanan Pendidikan Kelas Perahu telah mendorong proses promosi dan sosialisasi layanan KP untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat pulau yang menjadi lokasi replikasi. Regulasi ini menjadi landasan hukum pelaksanaan KP dan memastikan adanya dukungan penganggaran dari pemerintah kabupaten.
- SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep Nomor. 241/3119/Disdik Tahun 2018 tentang Tim Kerja Kelas Perahu.<sup>9</sup> SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pangkep Nomor. 241/3119/Disdik Tahun 2018 tentang Tim Kerja Kelas Perahu mendorong dukungan lebih sistematis dan terstruktur dalam memperluas layanan pendekatan Kelas Perahu.
- Peraturan Bupati Pangkep No 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Inklusif.<sup>10</sup>

### 2. Sosialisasi dan Edukasi Kelas Perahu

- Sosialisasi dan edukasi tentang KP di tingkat masyarakat penerima manfaat dan pemangku kepentingan lintas sektor di Kabupaten Pangkep telah berhasil menggali dukungan dalam upaya replikasi, dari 3 sekolah, menjadi 19 sekolah SD dan 7 SMP di Kec. Liukang Tupabbiring Utara.
- Di tingkat lebih luas, keberhasilan sosialisasi dan promosi KP terlihat antara lain dengan diberikannya penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi ini juga mengantarkan Kabupaten Pangkep masuk dalam 20 inovasi kelas dunia dan menerima penghargaan dari Unesco yang diserahkan di Azerbaijan pada Juni 2019.

### 3. Penyusunan Buku Panduan Pelaksanaan Kelas Perahu

- Buku Panduan Pelaksanaan Kelas Perahu versi awal yang disusun pada 2019 telah menjadi peta jalan bagi tim inovasi dalam upaya replikasi Kelas Perahu di satuan pendidikan, ataupun kegiatan pendukung yang berasal dari ekosistem pendidikan, selama dua tahun terakhir. Selanjutnya, buku panduan pelaksanaan versi revisi 2021 (yang sekarang) memuat pembelajaran dan praktik baik untuk proses replikasi lebih luas di wilayah lain di Indonesia yang memiliki karakteristik serupa. Tahun Ajaran 2019/20 sudah disiapkan 123 sekolah (SD dan SMP) di Kabupaten Pangkep untuk mengadopsi Kelas Perahu.
- Pelaksanaan Kelas Perahu untuk konteks anak pegunungan yang rentan putus sekolah karena bertani di jam sekolah.
- Buku panduan pelaksanaan juga menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kapasitas lewat ToT (Pelatihan Pelatih) bagi Fasilitator Tim Pelaksanaan Kelas Perahu.

### 4. Peningkatan Kapasitas Tim Fasilitator

- Selain membangun pemahaman ekosistem pendidikan tentang model layanan Kelas Perahu, peningkatan kapasitas telah membantu tim fasilitator/guru pendamping di 4 kecamatan (Liukang Tupabbiring Utara, Tupabbiring, Liukang Kalmas dan Liukang Tangaya) dari 81 SD dan 42 SMP untuk menyusun LKS dan RPP kontekstual, salah satu prasyarat kunci keberhasilan KP.
- LKS kontekstual ini telah menjadi inovasi pembelajaran yang membantu siswa Kelas Perahu belajar mandiri. Saat ini, sudah tersusun LKS semester ganjil untuk SD (kelas 3 sampai kelas 6) dan SMP (kelas 7 sampai kelas 9).

<sup>8</sup> Lihat di tautan ini: [https://drive.google.com/file/d/14zByInsh6Ze936\\_x2N9-BGf4R\\_R10DwZ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/14zByInsh6Ze936_x2N9-BGf4R_R10DwZ/view?usp=sharing)

<sup>9</sup> Lihat di tautan ini: <https://drive.google.com/file/d/1DpHavj2xuiBnDBHjcvjW7nqH-v-3VEZ5/view?usp=sharing>

<sup>10</sup> Lihat di tautan ini: [https://drive.google.com/file/d/1R0PC-qSWRMPcasPq4aC2Tsj7Ndl1xT\\_/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1R0PC-qSWRMPcasPq4aC2Tsj7Ndl1xT_/view?usp=sharing)



### 5. Advokasi Anggaran Kelas Perahu

- Penetapan nomenklatur dan kebutuhan insentif guru pendamping Kelas Perahu oleh BAPPEDA.
- Kebutuhan Kelas Perahu masuk dalam anggaran Dinas Pendidikan.
- Anggaran Kelas Perahu sudah masuk DID Kab. Pangkep selama dua tahun terakhir.
- Penyusunan daftar kebutuhan prioritas, terutama terkait insentif dan biaya pelatihan, yang menjadi dasar advokasi ke Tim Anggaran dan Tim Penyusun RPJMD.

### 6. Penyusunan Instrumen Monitoring KP Bersama Para Pihak

- Proses lokakarya lintas sektor dalam penyusunan instrumen monitoring KP telah mendorong keterlibatan berbagai pihak, di luar Dinas Pendidikan, dalam replikasi layanan Kelas Perahu langsung dilakukan di kepulauan. Baik dinas terkait di tingkat kabupaten (mis. Dispedmasdes, DPPA, Dinsos, Dinkes, dan Bappeda) maupun pihak kecamatan, kepala desa, dan tokoh agama atau masyarakat penerima manfaat.
- Penetapan 5 indikator kinerja pelaksanaan KP dan instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja tahun depan, dan perbaikan mekanisme pendataan siswa melaut.
- Dalam aspek Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial, sistem pendataan Kelas Perahu sudah mencakup pemilahan data berdasarkan gender.

### 7. Monitoring Layanan Kelas Perahu

- Pada tahap ini, monitoring bertujuan bukan saja untuk melihat perkembangan pelaksanaan Kelas Perahu di satuan Pendidikan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dari lintas sektor lainnya. Indikator kinerja Kelas Perahu tidak hanya mencakup rencana kerja Dinas Pendidikan, tetapi juga Dinas Sosial, Dukcapil, pemerintahan kecamatan dan desa. Kegiatan monitoring ini mengumpulkan masukan dari berbagai pihak seperti Bappeda, antar lintas OPD (DPMD, Dinas Sosial, Dindukcapil), camat, kepala desa, dan Ormas.

## Referensi

- Britto, P. R. (2012). *School readiness: A conceptual framework*. [https://www.unicef.org/education/files/Child2Child\\_ConceptualFramework\\_FINAL\(1\).pdf](https://www.unicef.org/education/files/Child2Child_ConceptualFramework_FINAL(1).pdf)
- Gardner, H. E. (2008). *Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice*. New York: Basic Books.
- International Labour Organization. (2018). *Child Labour Risk Identification Model*. ILO. [https://iniciativa2025alc.org/sites/default/files/child-labour-risk-identification-model\\_RI.pdf](https://iniciativa2025alc.org/sites/default/files/child-labour-risk-identification-model_RI.pdf)
- Jayaram, S., Munge, W., Adamson, B., Sorrell, D., & Jain, N. (Eds.). (2017). *Bridging the Skills Gap: Innovations in Africa and Asia* (Vol. 26). Springer.
- Lismawati. 2010. *Pengoptimalan Penggunaan Lembar Kerja Siswa*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Looi, C. K., & Teh, L. W. (Eds.). (2015). *Scaling educational innovations*. Singapore: Springer.
- Pohan, H. L. M., & Vitale, J. D. (2016). Overcoming the poverty trap through education: An intergenerational study on Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 6(1), 1-21.
- Srini, S., Siagian, N., Kia, D. O., and Dapamerang, D. (2018) *Panduan praktis penguatan pendidikan karakter kontekstual*. Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Jakarta. <http://repositori.kemdikbud.go.id/10093/1/Panduan%20Praktis%20Penguatan%20Pendidikan%20Karakter%20Kontekstual%20%5Buntuk%20Daerah%203T%5D.pdf>
- Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. *Third world quarterly*, 21(5), 795-814.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran I: Contoh LKS Siswa KP

# LEMBAR KEGIATAN SISWA

Nama Siswa : \_\_\_\_\_

Satuan Pendidikan : \_\_\_\_\_  
Kelas : V  
Semester : 2  
Tema : 8. Lingkungan Sahabat Kita  
Sub Tema : 1. Manusia dan Lingkungan

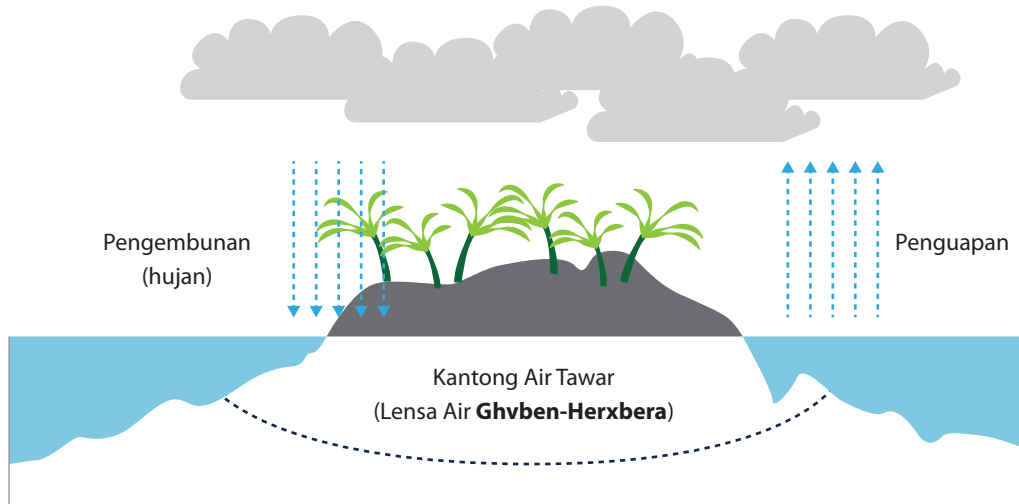
### PEMBELAJARAN 1

MUATAN PELAJARAN	KOMPETENSI DASAR
BAHASA INDONESIA	3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi 4.8 Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi
IPA	3.8 Menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup 4.8 Membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber
IPS	3.2 Menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia 4.2 Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia

### METODE DAN TUJUAN PEMBELAJARAN:

1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar.
2. Melalui kegiatan membaca, mengamati dan wawancara siswa mampu mengidentifikasi siklus air dan dampak ketersediaan air di kepulauan
3. Melalui membaca, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman.
4. Melalui kegiatan membaca, mengamati dan wawancara siswa mengelompokkan cara penangkapan dan ekstraksi hasil laut di kepulauan dan dampak negatif dan positif untuk masing-masing cara tersebut.
5. Melalui kegiatan nomor 4 setiap kelompok menyusun laporan berupa hasil analisis ke dalam tulisan secara runtut dari permasalahan hingga kesimpulan dan saran.

Perhatikan Gambar di bawah ini!



1. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut?

---

---

---

2. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa?

---

---

---

3. Apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan?

---

---

---

4. Apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan?

---

---

---

5. Bagaimanakah kondisi lingkungan di sekitarmu?

---

---

---



### Kelangkaan air di Kepulauan Spermonde: di masa lalu, saat ini dan masa datang

Pulau-pulau di gugusan kepulauan Spermonde berukuran kecil tidak melebihi ukuran diameter 3 km dan terbentuk dari gugusan karang. Sumber mata air alami di pulau kecil hanya berasal dari dua sumber utama yaitu (i) hujan dan (ii) air tanah.

Dari gambar siklus air di atas, terlihat bahwa persediaan air tawar di kepulauan dipengaruhi berbagai faktor seperti laju penguapan dan pengembunan. Namun demikian terdapat faktor lain yang tidak terlihat di gambar. Sementara persediaan air tawar di kepulauan semakin menurun baik secara kualitas dan kuantitas akibat masuknya air laut ke daratan (intrusi), rusaknya terumbu karang yang berfungsi menjadi penghalang erosi air laut; kebutuhan (permintaan) air tawar semakin meningkat dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di pulau.



Sumber: Defriatno Neke/Kompas.com

Seorang warga Pulau Sakuala, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara sedang mengambil air

Perubahan iklim (pemanasan global) juga semakin mempercepat kelangkaan air di kepulauan kecil karena meningkatkan laju penguapan dibandingkan pada masa lalu. Semakin tingginya permukaan air laut (es di kutub mencair) menyebabkan kantong air tawar semakin mengecil akibat laju erosi pantai yang semakin cepat. Perubahan iklim juga semakin membuat angin topan semakin kuat yang dalam kondisi tertentu membuat ombak besar dan air laut masuk mencemari kantong air tawar di kepulauan.

Pengelolaan air di kepulauan Spermonde juga belum ada, namun di kepulauan Banda misalnya terdapat aturan setempat yang membatasi jumlah sumur dan pemanfaatan air tawar. Ketiadaan pengelolaan air juga semakin mengancam ketersediaan air di kepulauan Spermonde.

Beberapa pulau sudah mengalami kekurangan air seperti di Sakuala, Bone Tambung dan Barrang Caddi. Menurut masyarakat setempat permasalahan kesulitan air mulai sangat terasa semenjak tahun 1960 di mana hampir di seluruh sumur di ketiga pulau terasa asin.

Memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan semakin langkanya ketersediaan air tawar di kepulauan spermonde akibat kerusakan lingkungan, upaya untuk mengurangi laju kerusakan lingkungan perlu diupayakan antara lain (i) menjaga kelestarian karang dengan menangkap hasil laut dengan menggunakan alat tangkap yang bersahabat dengan alam; (ii) melarang penggunaan bahan peledak dan racun –sianida-; (iii) mengelola penggunaan air tawar di pulau untuk kepentingan bersama; dan (iv) membangun fasilitas penyulingan air laut.

**TUGAS 1**

Setelah membaca bacaan "Kelangkaan air di kepulauan Spermonde? Wawancarilah tokoh yang dituakan di masyarakat untuk mengetahui ketersediaan air di masa lalu baik secara kuantitas dan kualitas menggunakan daftar pertanyaan berikut. Kamu bisa menambahkan pertanyaanmu sendiri. Orang yang diwawancarai (atau disebut juga responden) harus memenuhi persyaratan:

- Berusia sedikitnya 50 tahun
- Telah tinggal di pulau setidaknya 20 tahun
- Pilihlah paling sedikit dua responden, satu laki-laki dan satu perempuan.

No	Pertanyaan	Jawaban	Catatan
1	Bagaimana rasa air tawar di pulau (nama pulau) ini 50 tahun lalu?	a. Jernih, tawar dan tak berbau b. Jernih, tak berbau dan asin c. Jernih, tawar dan berbau d. Keruh, bau dan asin	
2	Mudahkah mendapatkan air tawar di pulau (nama pulau) ini 50 tahun lalu?	a. Sangat mudah b. Mudah c. Sangat sulit d. Tidak tahu	
3	.....		

**TUGAS 2**

Lakukan pengamatan ketersediaan air di lingkunganmu baik secara kuantitas maupun secara kualitas! Gunakan tabel berikut, tambahkan hal lain yang ingin kamu amati.

No	Pengamatan	Hasil Pengamatan
1	Sumber air / mata air di pulau	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
2	Bagaimana ketersediaan air tawar di masing-masing sumber air tersebut pada nomor 1?	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
3	Bagaimana rasa air tawar pada masing-masing sumber air tersebut pada nomor 1?	a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
4	_____	

### TUGAS 3

Berdasarkan hasil wawancara (tugas 1) dan pengamatan (tugas 3) susunlah laporan kegiatan yang terdiri dari empat bab sebagai berikut:

- Bab 1 Pendahuluan, berisi tulisan mengapa terjadi kelangkaan air di kepulauan Spermonde.
- Bab 2 Rangkuman hasil wawancara dan pengamatan.
- Bab 3 Kesimpulan hasil wawancara dan pengamatan.
- Bab 4 Penutup, berisi saran menurut kalian untuk mengatasi kelangkaan air di kepulauan Spermonde

**Selamat Bekerja**

### Penilaian

Hasil	Kategori	Paraf Guru

### Referensi

- Kurikulum K13 Revisi tahun 2018 (Permendikbud 37 tahun 2018), Kemdikbud, 2018.
- Kathleen Schwerdtner Manez, Sainab Husain, Sebastian CA Ferse, Maria Manez Costa, Water Scarcity in the Spermonde Archipelago, Sulawesi, Indonesia: Past, Present and Future, ScienceDirect, 2012.
- Wikipedia Water Lens [https://en.wikipedia.org/wiki/Lens\\_\(hydrology\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(hydrology)).





## LEMBAR KEGIATAN SISWA

Nama Siswa : \_\_\_\_\_

Satuan Pendidikan : \_\_\_\_\_  
Kelas : IV (empat)  
Tema : 8. Daerah Tempat Tinggalku  
Sub Tema : 1. Lingkungan Tempat Tinggalku  
Pembelajaran : 4

Tujuan LKS ini adalah untuk mencari tahu kegemaran anggota keluarga melalui kegiatan wawancara, mengetahui jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggal, dan mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam sebuah cerita.

### A. Alat dan Bahan

- Teks Bacaan
- Buku tulis atau kertas
- Pulpen atau pensil

### B. Langkah-Langkah Pembelajaran

1. Siswa ditugasi melakukan wawancara dengan anggota keluarga.
2. Siswa diminta melengkapi kolom yang tersedia berdasarkan hasil wawancara.
3. Siswa diminta mengamati kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan tempat tinggalnya.
4. Siswa membaca teks.
5. Selesai membaca, siswa diminta menjawab pertanyaan tentang tokoh.

#### TIPS

1. Orang tua diharapkan memberikan jawaban yang benar terhadap kegemaran setiap anggota keluarga
2. Orang tua diharapkan memberikan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya
3. Orang tua dapat berkomunikasi dengan guru apabila mengalami kesulitan

#### REFLEKSI

Setelah keseluruhan kegiatan pembelajaran selesai, diskusikanlah dengan anak hal-hal berikut:

*Adakah pengaruh lingkungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya?*

**C. Inspirasi**

1. Buku Pedoman Guru Tema 8 Kelas 4 dan Buku Siswa Tema 8 Kelas 4 (Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Gambar berbagai jenis kegiatan ekonomi
3. Cerita tentang Pulau Salemo ditemukan di Barry Kusuma Youtube Channel

**Kegiatan 1. Melakukan kegiatan wawancara**

1. Lakukan wawancara dengan anggota keluargamu.
2. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu.
3. Lengkapi kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kamu lakukan.

No	Nama Anggota Keluarga	Kegemaran/kesukaan
1.	Ayah	.....
2.	Ibu	.....
3.	Kakak	.....
4.	Adik	.....

**Kegiatan 2. Mengamati kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan tempat tinggalnya.**

		<p>Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen</p>
		<p>Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen.</p>
		<p>Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor.</p>

1. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu.
2. Identifikasilah kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu.
3. Identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu.
4. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut.

a. Contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku.

- 1) Produksi : .....
- 2) Distribusi : .....
- 3) Konsumsi : .....

b. Jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalku.

- 1) Produksi : .....
- 2) Distribusi : .....
- 3) Konsumsi : .....



### Kegiatan 3. Membaca teks dan menjawab pertanyaan



**Pulau Salemo, Tempatnya Penghapal Al Quran Cilik.**

Pulau Salemo adalah satu dari sekian pulau kecil yang berjejer di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Di bawah pemerintahan H. Syamsuddin A. Hamid sebagai Bupati dan H. Syahban Sammana sebagai Wakil Bupati. Pulau yang luasnya kurang lebih hanya 10 Km<sup>2</sup> ini sangat padat ditinggali oleh penduduk, dan mereka mayoritas muslim. Bahkan pulau ini kini sedang proses dicanangkan sebagai pulau santri Salemo oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dalam sejarah lisan, menurut orang tua yang hidup di pulau ini, sebelum Indonesia merdeka, pulau ini menjadi pelabuhan. Ratusan perahu dagang phinisi milik para saudagar kaya yang bermukim di situ. Armada phinisi ini melayani perdagangan antar pulau Sulawesi-Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Manila.

Pulau ini juga menjadi salah satu pusat pengajaran ilmu-ilmu Islam di Sulawesi Selatan. Banyak alim ulama yang memilih tinggal di sini dan menarik banyak murid dari berbagai penjuru, dari Mandar sampai Selayar, untuk belajar agama. pernah memiliki pesantren terbesar di Sulawesi Selatan, tempat pengajian para ulama besar seperti Kh. Jamalludin Assaggaf Puang Ramma dan KH. Rahman Matammeng.

Disini terdapat langgar yang mengajarkan anak-anak kecil berumur 2 sampai 3 tahun untuk belajar membaca Al Quran sekaligus menghafalnya, sehingga banyak anak-anak yang memasuki kelas 6 SD sudah menghafal ayat-ayat Al Quran. maka tidak salah jika pulau ini disebut sebagai Pulau penghasil penghapal Al Quran.

Sumber:

<http://instagram.com/barrykusuma> (Inspiring Photos through the Lens)

<https://www.youtube.com/barrykusuma> (Barry Kusuma Youtube Channel)

1. Bacalah teks tersebut!
2. Setelah membaca teks, Jawablah pertanyaan berdasarkan teks

a. Siapakah nama Bupati Pangkep pada cerita tersebut? .....
b. Siapakah nama Wakil Bupati Pangkep pada cerita tersebut? .....
c. Siapakah ulama besar yang pernah belajar di pulau Salemo? .....
d. Mengapa banyak alim ulama memilih tinggal di pulau Salemo? .....
e. Mengapa Pulau Salemo disebut sebagai pulau penghasil penghawal Al Quran? .....

**### Selamat Bekerja ###**

**Penilaian**

Hasil	Kategori	Paraf Guru	Paraf Orang Tua

Disusun Oleh : Irmawati (Fasilitator Kelas Perahu)

## Lampiran II: Format Identifikasi Siswa KP dan ABK

Terdiri dari dua bagian:

- Bagian pertama Format Identifikasi Siswa Kelas Perahu
- Bagian kedua Format Identifikasi Kebutuhan Khusus

### Format Identifikasi Siswa Kelas Perahu

#### 1. SEKOLAH

- a) NPSN : \_\_\_\_\_  
b) Alamat : \_\_\_\_\_

#### 2. SISWA

- a) NISN : \_\_\_\_\_  
b) NIK : \_\_\_\_\_  
c) Nama : \_\_\_\_\_  
d) Kelas: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 (Lingkari yang sesuai)  
e) Jenis Kelamin: L/K (Lingkari yang sesuai)  
f) Usia: \_\_\_\_ tahun  
g) Alamat : \_\_\_\_\_  
h) Jumlah jam/hari bekerja \_\_\_\_ jam/hari (coret yang tidak perlu)  
i. Anak Bekerja  
(1) Beberapa jam hingga maksimum 15 jam / minggu  
(2) Usia minimal 13 tahun  
ii. Pekerja Anak  
(1) Bekerja secara teratur melebihi 40 jam / minggu untuk anak usia 15-17  
(2) Bekerja secara teratur melebihi 15 jam / minggu untuk anak di bawah usia 15 tahun  
(3) Kasus anak melaut lebih sehari / semalam masuk kategori Pekerja Anak  
i) Anak bekerja pada  
i. Orang tua  
ii. Saudara  
iii. Pemberi kerja  
iv. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_  
j) Setelah pulang melaut (bekerja) apakah anak masih melakukan pekerjaan lain di rumah atau tempat lain?  
i. Ya  
ii. Tidak  
k) Jika i) sama dengan Ya, berapa jam \_\_\_\_ per hari / minggu (coret yang tidak perlu).  
l) Apakah memiliki kebutuhan khusus?  
i. Ya  
ii. Tidak  
Gunakan pendekatan model dalam lampiran ini (profil disabilitas siswa).  
m) Apakah direkam memiliki kebutuhan khusus di DAPODIK? (lingkari salah satu)  
i. Ya  
ii. Tidak  
n) Jika m) Tidak, Mengapa? \_\_\_\_\_

## 3. Orang tua

## a) Bapak

- i. NIK : \_\_\_\_\_
- ii. Nama : \_\_\_\_\_
- iii. Usia : \_\_\_\_\_
- iv. Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_

## b) Ibu

- i. NIK : \_\_\_\_\_
- ii. Nama : \_\_\_\_\_
- iii. Usia : \_\_\_\_\_
- iv. Pendidikan terakhir : \_\_\_\_\_

## c) Hubungan siswa dengan orang tua

- i. Kandung
- ii. Tiri
- iii. Wali
- iv. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

## 4. Jadwal kerja/melaut

Jenis Melaut	Berangkat*	Pulang**	Keterangan
Anak Bekerja			
Pekerja Anak			

Keterangan:

\*) dan \*\*) diisi jam untuk Anak Bekerja; sedangkan untuk Pekerja anak diisi tanggal dan jam

## Profil Disabilitas Siswa

Profil ini diisi oleh guru bersama orang tua atau pengasuh secara bersama-sama, dapat pula dibantu pihak ketiga (fasilitator).

Nama Siswa: \_\_\_\_\_  
NISN: \_\_\_\_\_  
Sekolah: \_\_\_\_\_  
NPSN: \_\_\_\_\_  
NIK: \_\_\_\_\_  
Tanggal Lahir: \_\_\_\_\_  
Usia: \_\_\_\_\_ Tahun/Kelas: \_\_\_\_\_  
Instrumen diisi pada tanggal: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_\_\_\_  
Nama guru: \_\_\_\_\_

Orang lain yang membantu mengisi instrumen

Orang Tua / Wali: Nama: \_\_\_\_\_

Hubungan dengan anak: Ibu / Ayah / Guardian Lainnya(sebutkan): \_\_\_\_\_

Orang lain yang membantu mengisi instrumen:

Nama: \_\_\_\_\_

Hubungan dengan anak: Guru Kelas / Guru BP / Guru Mapel / Lainnya (sebutkan): \_\_\_\_\_

Orang lain yang membantu mengisi instrumen:

Nama: \_\_\_\_\_

Hubungan dengan anak: Guru Kelas / Guru BP / Guru Mapel / Lainnya (sebutkan): \_\_\_\_\_

### Q1) Apakah siswa saat ini menggunakan alat bantu?

(Pilih sesuai kepemilikan alat bantu, isi 12 jika tidak memiliki)

1.  Kacamata (atau lensa kontak)
2.  Alat bantu dengar
3. Alat bantu gerak:
  - a)  Kursi Roda
  - b)  Kruk, tongkat atau kerangka
  - c)  alat bantu gerak lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
4.  Mesin Braille (anak dapat membaca dengan menyentuh tonjolan pada mesin atau permukaan kertas)
5.  Perangkat lunak untuk membaca teks (Program komputer yang dapat membaca teks dengan keras)
6.  Tongkat putih (untuk anak buta atau penglihatan terbatas – low vision)
7.  Alat Orthotic (untuk menyangga kaki, lengan dan tulang belakang)
8.  Anggota tubuh tiruan (prosthetics, kaki palsu, tangan palsu, dst)
9.  Furnitur modifikasi (misalnya meja kursi khusus, meja yang bisa diatur ketinggiannya)
10.  Papan komunikasi (misalnya papan dengan gambar, di mana anak dapat menunjuk dan mengekspresikan diri)
11.  Lainnya (Sebutkan) .....
12.  Tidak ada alat bantu



**Q2) Apakah siswa mendapatkan bantuan pada saat berjalan atau bergerak?**

Lingkari: Ya / Tidak

Jelaskan:

---



---



---

Pilih salah satu pada kolom jawaban yang sesuai dengan memberi tanda silang

<b>Q3) Bandingkan dengan teman sebaya, apakah (nama anak) mengalami kesulitan pada hal berikut:</b>		Tidak ada Kesulitan	Kesulitan*	Sangat Kesulitan*	Tidak bisa sama sekali*	Menolak untuk menjawab	Tidak tahu	*Jelaskan secara singkat dan rinci kesulitan dimaksud
		PENJELASAN						
3a	<b>Melihat</b>	Kesulitan melihat benda yang terlalu dekat atau terlalu jauh, seperti wajah atau gambar Jika anak menggunakan kacamata, apakah masih mengalami kesulitan untuk melihat?						
3b	<b>Mendengar</b>	Kesulitan mendengarkan percakapan atau musik. Jika anak menggunakan alat bantu dengar, apakah masih mengalami kesulitan mendengar?						
3c	<b>Gerakan Motorik Kasar</b>	Kesulitan berjalan atau menaiki tangga						
3d	<b>Gerakan Motorik Halus</b>	Kesulitan menggerakkan tangan atau jari, seperti mengambil benda ukuran kecil seperti pensil atau membuka dan menutup botol air atau kotak?						
3e	<b>Komunikasi</b>	Kesulitan untuk dimengerti saat berbicara (menggunakan bahasa percakapan anak)						
3f	<b>Belajar (Umum)</b>	Kesulitan dengan fungsi intelektual seperti konsentrasi dan mengingat. Termasuk beragam KBM di sekolah, permainan (games) dan tugas di rumah (PR), dsb.						
3g	<b>Belajar (Khusus)</b>	Kesulitan belajar yang khusus pada literasi dan numerasi, misalnya dyslexia atau dyscalculia Anak belajar hal lain sebagaimana umumnya atau di atas rata-rata <b>** Tidak ada kesulitan atau tidak berlaku</b>	**					
3h	<b>Perilaku/ Perhatian / Sosialisasi</b>	Kesulitan mengendalikan perilaku dan atau fokus / konsentrasi dan atau menerima perubahan dalam rutinitas dan atau berteman						
3i	<b>Emosi</b>	Berapa sering anak terlihat: sangat sedih dan depresi, dan / atau khawatir dan gugup? <sup>1</sup> Jarang = tidak pernah atau beberapa kali dalam satu tahun	Jarang <sup>1</sup>	Bulanan	Mingguan	Harian		

Sebagai tambahan, jika kesulitan yang dialami tidak tercantum pada tabel di atas atau terjadi perubahan, tuliskan di sini:

---

---

---

---

---

## Kebutuhan Dukungan Untuk KBM

**Bantuan Personal** (*bantuan dari manusia, bukan alat bantu*)

**Q4) Bandingkan dengan teman sebaya, apakah, Berapa banyak bantuan yang dibutuhkan anak untuk melakukan tugas berikut?** (*Jawab semua baris; untuk tiap baris beri tanda pada satu kolom saja.*)

	Tidak membutuhkan bantuan	Membutuhkan bantuan daripada teman sebaya lainya *	Membutuhkan banyak bantuan daripada teman sebaya lainya *	*Jelaskan secara singkat bantuan yang dibutuhkan.
4a. Bergerak di ruang kelas				
4b. Bergerak di luar kelas dalam lingkungan sekolah				
4c. Datang ke sekolah dan pulang ke rumah				
4d. Komunikasi				
4e. Kognitif / kegiatan belajar				
4f. Merawat diri (makan, toilet)				
4g. Sosialisasi dengan teman sebaya				
4h. Mengendalikan perilaku				

**Q5) Catat penyesuaian terhadap pembelajaran dan penilaian yang Anda gunakan saat ini untuk ABK? Beri tanda pada satu kolom saja untuk tiap pertanyaan.**

	Ya *	Tidak Perlu	Belum, mungkin ada kebutuhan *	*Berikan penjelasan singkat untuk setiap jawaban yang diberikan.
5a. Anak duduk dekat dengan papan tulis atau guru				
5b. Bahan ajar dicetak lebih besar				
5c. Bahan ajar tersedia dalam braille				
5d. Kegiatan/pelajaran olahraga dan permainan disesuaikan				
5e. Penyesuaian cara belajar atau mengurangi tingkat kesulitan untuk ABK				
5f. Terjemahan bahasa isyarat tersedia untuk KBM dan kegiatan sekolah lainnya				
5g. Penambahan waktu yang tersedia (Ulangan harian, Ujian semester)				
5h. Pendampingan saat Ujian Nasional dan UAS (penerjemah bahasa isyarat, asisten penulis jawaban)				
5i. Anak mendapatkan bantuan dari Guru Bantu (asisten guru)				
5j. Guru dan atau pendidik memberikan bantuan pembelajaran di rumah				
5k. Lainnya				
5l. Lainnya				

### Informasi Lain

**Q6) Apakah anak dibuatkan RPP tersendiri?**      Lingkari:      Ya / Tidak / Belum, tapi ada rencana membuat

**Q7) Adakah komentar lainnya, termasuk informasi tambahan terkait disabilitas anak, atau dukungan KBM yang dibutuhkan: Apabila kondisi atau kebutuhan anak belum tertangkap pada pertanyaan-pertanyaan di atas, tuliskan kondisi anak tersebut dan kebutuhan tambahan yang diperlukan.**

---

---

---

---

**Q8) Apa kelebihan/kapasitas dan ketertarikan (*interest*) siswa?**

---

---

---

---

### Rekomendasi dan Tindak Lanjut

**Q9) Tuliskan rekomendasi dan tindak lanjut yang dibutuhkan, termasuk pemangku kepentingan yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.**

---

---

---

---

## Bagian 6 (Q6) Aksesibilitas dan Penilaian Inklusifitas Sekolah

Instrumen ini diisi oleh dewan guru dan kepala sekolah, dan apabila memungkinkan melibatkan ABK dan orang tuanya. Keterlibatan organisasi penyanggah disabilitas bisa membantu melaksanakan penilaian aksesibilitas ini.

Sekolah: \_\_\_\_\_

Diisi oleh : \_\_\_\_\_ Tanggal: \_\_\_\_\_

### Aksesibilitas SARPRAS dan transportasi

UMUM	Ya atau Tidak	Jika tidak, apa rencana untuk meningkatkan akses?
Apakah jalan menuju sekolah dapat diakses oleh siswa yang menggunakan kursi roda, termasuk saat musim hujan?		
Adakah jalan tersedia untuk menuju pintu masuk utama sekolah?		
Jika ya, adakah ramp dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan oleh anak di kursi roda?		
Apakah jalan masuk ke sekolah cukup lebar untuk anak pengguna kursi roda?		
Apakah area berkumpul dapat diakses ABK?		
Apakah UKS dapat diakses ABK?		
Apakah perpustakaan dapat diakses ABK?		
Apakah tempat bermain dapat diakses ABK?		
Petunjuk (petunjuk taktil, simbol-simbol): Apakah ABK dengan kesulitan melihat dan mendengar dapat berkeliling sekolah dengan mandiri dan aman?		
Situasi darurat: Apakah ABK mendapatkan perhatian dalam kebijakan sekolah dan prosedur?		
<b>AIR, SANITASI DAN KEBERSIHAN</b>		
Apakah toilet dapat diakses anak laki-laki dan perempuan dengan kesulitan fisik ( <i>ramp</i> , pegangan tangan)		
Apakah fasilitas cuci tangan dapat diakses anak laki-laki dan perempuan dengan kesulitan fisik (kran dan sabun mudah diraih)		
Apakah fasilitas air minum dapat diakses ABK?		

GEDUNG	Jumlah	
Gedung Pertama – Nama: _____		
Jumlah ruang penyimpanan (gudang)		
Jumlah tempat menyimpan barang yang dapat diakses oleh ABK khususnya dengan kesulitan fisik ( <i>ramps</i> atau <i>elevators</i> )		
Jumlah ruang kelas		
Jumlah ruang kelas yang dapat diakses ABK dengan kesulitan fisik		
Gedung Kedua – Nama: _____		
Jumlah ruang penyimpanan (gudang)		
Jumlah tempat menyimpan barang yang dapat diakses oleh ABK khususnya dengan kesulitan fisik ( <i>ramps</i> atau <i>elevators</i> )		
Jumlah ruang kelas		
Jumlah ruang kelas yang dapat diakses ABK dengan kesulitan fisik		
Gedung Ketiga – Nama: _____		
Jumlah ruang penyimpanan (gudang)		
Jumlah tempat menyimpan barang yang dapat diakses oleh ABK khususnya dengan kesulitan fisik ( <i>ramps</i> atau <i>elevators</i> )		
Jumlah ruang kelas		
Jumlah ruang kelas yang dapat diakses ABK dengan kesulitan fisik		
Gedung Keempat – Nama: _____		
Jumlah ruang penyimpanan (gudang)		
Jumlah tempat menyimpan barang yang dapat diakses oleh ABK khususnya dengan kesulitan fisik ( <i>ramps</i> atau <i>elevators</i> )		
Jumlah ruang kelas		
Jumlah ruang kelas yang dapat diakses ABK dengan kesulitan fisik		

TRANSPORT		
Beri tanda dan atau jelaskan bagaimana ABK dengan kesulitan fisik dan sensori pergi ke sekolah dan pulang ke rumah?	<input type="checkbox"/> Antar jemput sekolah yang sudah diadaptasi <input type="checkbox"/> Antar jemput sekolah belum diadaptasi tetapi tenaga bantuan tersedia <input type="checkbox"/> Kendaraan pribadi atau sewa <input type="checkbox"/> Lainnya: _____	
BAHAN AJAR DAN PERALATAN KHUSUS	Ya / Tidak / Tidak dibutuhkan	Kualitas tinggi = 1, Kualitas sedang = 2, Kualitas rendah = 3
Apakah sekolah memiliki bahan ajar yang cukup untuk ABK yang membutuhkan?		
Buku-buku braile		
Buku audio (Anak mendengarkan melalui CD atau pemutar musik, dsb)		
<i>Hearing loop</i> (untuk ABK dengan alat bantu dengar, pemancar untuk menyiarkan dan dapat ditangkap oleh alat bantu dengar dalam <i>mode telecoil</i> )		
Furnitur yang dimodifikasi		
Alat bantu untuk mencengkeram (misalnya untuk pensil)		
Aplikasi pembaca layar ( <i>text to speech</i> )		
Simbol atau tanda yang berukuran besar dan mudah dibaca		



**KEGIATAN INKLUSI DISABILITAS**

Pilih dan tuliskan kegiatan identifikasi dan assessmen ABK yang dilaksanakan pihak dari luar sekolah selama 12 bulan terakhir.

Jenis identifikasi dan assessment	Terlaksana: Ya / Tidak	Tanggal	Siapa yang melaksanakan?	Pada kelas berapa?
<input type="checkbox"/> Penglihatan				
<input type="checkbox"/> Pendengaran				

Pilih dan tuliskan kegiatan disabilitas yang dilaksanakan dalam 12 bulan terakhir?

Jenis kegiatan	Tanggal	Penyelenggara?	Peserta (termasuk jumlah)
<input type="checkbox"/> Pendidikan orang tua menangani ABK			
<input type="checkbox"/> Kegiatan kepedulian ABK			
<input type="checkbox"/> Kegiatan kepedulian ABK di masyarakat / lingkungan			
<input type="checkbox"/> Pelatihan guru untuk menangani ABK			
<input type="checkbox"/> Lainnya:			
<input type="checkbox"/> Lainnya:			
<input type="checkbox"/> Lainnya:			

Pilih dan tuliskan ketersediaan tenaga ahli untuk mendukung pendidikan inklusi.

Jenis keahlian	Waktu ketersediaan (lingkari)
<input type="checkbox"/> Braille	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Bahasa isyarat	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Terapi fisik	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Terapi bicara	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Terapi okupasi	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Audiologi / audiometri	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Psikologi pendidikan	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Pendidikan khusus	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Kesehatan dan gisi anak (anak usia PAUD)	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan
<input type="checkbox"/> Lainnya:	Mingguan / Bulanan / Triwulan / Semester / Tahunan

**RPP INDIVIDUAL**

Apakah sekolah membuat RPP individual untuk ABK? Ya / Tidak

**PERAN SERTA ORANG TUA/PENGASUH ABK**

Apakah sekolah melibatkan setidaknya satu orang tua ABK sebagai anggota komite sekolah? Ya / Tidak

**KEBIJAKAN INKLUSI DISABILITAS SEKOLAH**

Apakah sekolah memiliki kebijakan inklusi disabilitas, atau rencana aksi untuk menerima ABK? Ya / Tidak  
 Pada tanggal berapa kebijakan tersebut ditetapkan? \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**KEGIATAN INKLUSI UNTUK ANAK DI LUAR SEKOLAH PENYANDANG DISABILITAS**

**ATS dan ABK yang tidak**

Rekam data ATS dan ABK dalam jarak jangkauan sekolah yang tidak dapat pergi ke sekolah karena faktor disabilitas. Batasi anak usia SD sederajat saja.

Nama anak	Alamat ()	Usia	Kelamin	Jenis Kesulitan / disabilitas **

\*\* Melihat, Mendengar, Berbicara, motorik kasar, motorik halus, intelektual, perilaku, emosional

Beri tanda dan jelaskan kegiatan apa yang dilaksanakan untuk melibatkan ATS dan ABK?

- Guru berkunjung ke rumah anak setidaknya sebulan sekali untuk memberikan bimbingan belajar dan tugas (mandiri) belajar.
- Guru menemui orang tua untuk mendiskusikan pilihan agar anak dapat bersekolah
- Lainnya: Jelaskan tindakan yang diambil: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Tuliskan hal lain yang sekolah akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk dapat menghadirkan ATS & ABK ke sekolah: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Lampiran III: Hasil Diskusi Kelompok Kegiatan Analisis Situasi Kelas Perahu dengan Metode PMI (*Plus Minus Interesting*) (November 2018)

#### Hasil Diskusi Orang Tua

<i>Plus</i>	<i>Minus</i>	<i>Interesting</i>
Murid tidak ketinggalan pelajaran	Mengizinkan anak bekerja: keadaan yang membuat anak harus ikut melaut. Melanggar UU Tenaga kerja	Bekerja sambil Belajar
Menambah penghasilan orang tua	Beban anak bertambah: tidak ada waktu anak bermain	
<p><b>Sosialisasi kepada orang tua/masyarakat dan siswa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah+Komite Sekolah+Kepala desa/Camat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk memfasilitasi transfer ilmu yang terjadi di masyarakat</li> <li>▪ Waktu melaut bisa dibatasi agar memastikan tidak mengganggu pelajaran</li> <li>▪ Mempunyai data yang baik untuk tracking anak yang melaut di SD dan SMP</li> <li>▪ Perubahan cara berfikir kepada orang tua perlu dilakukan: bahwa anak bukan menjadi sumber pencari pendapatan keluarga, anak diberikan kesempatan waktu belajar dan bermain</li> <li>▪ Tujuan Kelas Perahu: anak pulau tidak putus sekolah dan tetap bisa membantu orang tua, dan</li> </ul>		

#### Hasil Diskusi Anak

<i>Plus</i>	<i>Minus</i>	<i>Interesting</i>
<p>Saya senang karena saya bisa tetap belajar</p> <p>Bisa tetap bantu orang tua</p> <p>Ada LKS sehingga tidak ketinggalan Pelajaran</p> <p>Orang tua senang karena bisa tetap sekolah</p> <p>Orang tua menemani saya mengerjakan LKS saat di kapal</p> <p>Orang tua memberikan waktu kepada saya untuk mengerjakan LKS saat melaut</p>	<p>Kalau sedang hujan saat melaut saya tidak bisa mengerjakan LKS di Kapal walaupun ada terpal</p> <p>Karena LKS tidak sempat dikerjakan ada teman yang malu kembali ke sekolah</p>	<p>Saat melaut saya lebih dekat dengan orang tua saya Menambah pengetahuan tentang ciri-ciri alam saat melaut</p>
<p><b>Alternatif Solusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan alat yang bisa digunakan melindungi kertas LKS misalnya map plastik</li> <li>▪ Pada saat peningkatan kapasitas kepada guru perlu dibantu untuk mendampingi siswa</li> </ul>		

## Hasil Diskusi Guru

<i>Plus</i>	<i>Minus</i>	<i>Interesting</i>
<p>Mengurangi siswa yang Putus sekolah</p> <p>Membantu perluasan pengalaman siswa dalam hal belajar</p> <p>Membantu siswa untuk tetap aktif mengikuti pelajaran</p> <p>Dapat meringankan beban orang tua dalam hal ekonomi dan pendidikan</p> <p>Menambah .. (<i>image</i>) masyarakat kepulauan terhadap hadirnya inovasi Kelas Perahu</p> <p>Dengan adanya Kelas Perahu maka orang tua mengerti bahwa pendidikan itu sangat penting</p>	<p>Melemahkan tata tertib sekolah</p> <p>Proses tatap muka antara guru dan siswa menjadi berkurang</p> <p>Menambah beban kerja guru</p> <p>Proses belajar mengajar tidak Maksimal</p> <p>Sistemnya tidak bisa berkelanjutan Masih perlu peningkatan keterampilan/pengetahuan tentang Kelas Perahu semua pihak</p> <p>Bahan belajar anti air</p> <p>Kecemburuan antar guru apabila dalam prakteknya dia membantu Kelas Perahu tapi tidak terdaftar mengajar di kelas (4-6) yang menjadi prioritas Kelas Perahu</p>	<p>Dengan adanya Kelas Perahu siswa dapat belajar sambil bekerja</p> <p>Siswa lebih rileks dalam belajar</p> <p>Adanya perhatian khusus pemerintah terhadap inovasi ini</p> <p>Belajar dialam terbuka</p> <p>Siswa tidak perlu mendapat sanksi atau hukuman</p>
<p><b>Alternatif Solusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tinjauan memberikan insentif bagi guru</li> <li>▪ Tinjauan terhadap peraturan sekolah yang ada saat ini, untuk siswa yang melaut dan mengikuti pelajaran dengan normal</li> <li>▪ Memastikan ada pendampingan guru ke siswa setelah LKS diserahkan</li> </ul>		

## Hasil Diskusi Pemda

<i>Plus</i>	<i>Minus</i>	<i>Interesting</i>
<p>Siswa mendapat perlakuan khusus dari gurunya (layanan khusus)</p> <p>Terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan.</p> <p>Pemda terbantu dengan adanya kelas Perahu</p> <p>Mengurangi angka putus sekolah secara bertahap</p>	<p>Proses pembelajaran anak kurang maksimal</p> <p>Beban tugas guru bertambah</p> <p>Adanya kekhawatiran banyak anak yang akan meninggalkan kelas</p> <p>Belum ada penganggaran dari Pemda untuk Kelas Perahu</p> <p>Belum ada regulasi Kelas Perahu</p>	<p>Anak bisa bekerja sambil belajar</p> <p>Siswa bisa belajar dimana saja</p> <p>Siswa bisa memanfaatkan waktu luang</p>
<p><b>Alternatif solusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sudah tersedia anggaran Pendidikan 2019 untuk replikasi Kelas Perahu</li> <li>▪ Sedang disusun Perbup Tentang Kelas Perahu dan SK Bupati untuk tim implementasi Kelas Perahu</li> <li>▪ Pendampingan guru kepada siswa harus dipastikan saat LKS diberikan dan diserahkan</li> </ul>		

## Lampiran IV: Format Penilaian K13

## CONTOH PENGISIAN FORMAT PENGOLAHAN CAPAIAN KOMPETENSI SIKAP

MATA PELAJARAN : \_\_\_\_\_

KELAS/SEMESTER : \_\_\_\_\_

No.	Nama Peserta Didik	Hasil Observasi Sikap			Profil Sikap secara Umum Hasil Observasi	Sikap Berdasarkan			Lapor Sikap Spritual dan Sosial
		Religius	Disiplin	Tanggung Jawab		P. Diri	P.Antar Teman	Jurnal	
1	Ahmad	B	B	C	B	B	B	B	B
2	Dhani								
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

## CONTOH PENGISIAN FORMAT PENGOLAHAN CAPAIAN KOMPETENSI PENGETAHUAN

MATA PELAJARAN : \_\_\_\_\_

KELAS/SEMESTER : \_\_\_\_\_

No.	Nama Peserta Didik	PH.1			PH.2			JMLH	RT	PTS	PAS	PA	LCK (Lapor)	
		KD 3.1	KD 3.2	KD 3.3	KD 3.4	KD 3.5	KD 3.5						Angka	Predikat
1	Ahmad	78	80	80	78	89	67	472	59	78	73	76	76	C
2	Dhani													
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														

## CONTOH PENGISIAN FORMAT PENGOLAHAN CAPAIAN KOMPETENSI KETERAMPILAN

MATA PELAJARAN : \_\_\_\_\_

KELAS/SEMESTER : \_\_\_\_\_

No.	Nama Peserta Didik	KD	Nilai Keterampilan						NA	LCK (Lapor)	
			Praktik		Proyek		Portofolio			Angka	Predikat
			1	2	1	2	1	2			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

## Lampiran V: Kerangka Pengukuran Kinerja

ID	Hasil		Indikator	Sumber data	Metode	Frekuensi pendataan	Penanggung jawab	Baseline*	Target*	Endline*
<b>Hasil Utama</b>										
1	Menurunkan peluang anak putus sekolah	1.1	Menurunnya proporsi APtS	Satuan pendidikan / DAPODIK / EMIS	Sensus	Tahun Ajaran Baru	Kepala Bidang Diknas, Pengawas	SD: 1,3%; SMP: 4,4%; DIKDAS 2,2%	DK	DK
		1.2	Menurunnya proporsi anak melaut sebagai penyebab APtS	Satuan pendidikan / DAPODIK / EMIS	Sensus	Tahun Ajaran Baru		DK	DK	DK
		1.3	Menurunnya jumlah siswa melaut	Satuan pendidikan / DAPODIK / EMIS	Sensus	Tahun Ajaran Baru		DK	DK	DK
<b>Hasil Antara</b>										
<b>Hasil Segera</b>										
1	Meningkatkan Kompetensi guru menyusun LKS kontekstual dan berkearifan lokal	1.1	Proporsi kandungan lokal bahan ajar	Guru	Portofolio dan wawancara	Per semester	PSDKP Kecamatan	0	25% per tahun	0,5
		1.2	Proporsi Kejelasan langkah pembelajaran mandiri	Guru	Portofolio dan wawancara	Per semester	PSDKP Kecamatan	0	25% per tahun	0,5
2	Meningkatkan Kompetensi pendampingan siswa kelas perahu	2.1	Tingkat kesiapan bahan ajar	Guru	Portofolio dan wawancara	Per semester	PSDKP Kecamatan	4	DK	1
		2.2	Tingkat kejelasan langkah belajar tugas mandiri	Guru	Portofolio dan wawancara	Per semester	PSDKP Kecamatan	4	DK	1
3	Meningkatkan Pemahaman KP Orangtua dan Masyarakat	3.1	Proporsi orang tua yang mendapatkan skor 6 dari skala 10 tentang KP	Satuan Pendidikan	Sensus	Tahun ajaran baru	PSDKP Kecamatan	0%	DK	DK
		3.2	Tingkat pemahaman tokoh agama dan masyarakat yang memperoleh skor 6 dari skala 10 tentang KP	PSDKP Kecamatan	Wawancara dan hasil test setelah sosialisasi	Tahun ajaran baru	PSDKP Kabupaten	0%	DK	DK
		3.3	Proporsi tokoh agama dan masyarakat yang berperan aktif dalam sosialisasi	PSDKP Kecamatan	Sensus dan Dokumentasi	Tahun ajaran baru	PSDKP Kabupaten	0%	DK	DK



ID	Hasil		Indikator	Sumber data	Metode	Frekuensi pendataan	Penanggung jawab	Baseline*	Target*	Endline*
		3.4	Proporsi tokoh agama dan masyarakat yang berperan aktif dalam penyusunan LKSS berkearifan lokal	PSDKP Kecamatan	Sensus dan Dokumentasi	Tahun ajaran baru	PSDKP Kabupaten	0%	DK	DK
		3.5	Kontribusi tokoh agama dan masyarakat dalam penyusunan LKSS berkearifan lokal	PSDKP Kecamatan	Wawancara dan dokumentasi	Tahun ajaran baru	PSDKP Kabupaten	0%	DK	DK
4	Meningkatkan dukungan Pemerintahan Desa pada Kelas Perahu	4.1	Meningkatnya dukungan Pemerintahan Desa pada Kelas Perahu	PSDKP Kecamatan	Wawancara dan dokumentasi	Semester	PSDKP Kecamatan	0	DK	DK
		4.2	Meningkatnya proporsi serapan anggaran untuk mendukung KP	PSDKP Kecamatan	Wawancara dan dokumentasi	Semester	PSDKP Kecamatan	0	DK	DK
		4.3	Meningkatnya kegiatan dukungan kepada KP	PSDKP Kecamatan	Wawancara dan dokumentasi	Semester	PSDKP Kecamatan	0	DK	DK
		4.4	Meningkatnya kebijakan yang dikeluarkan Pemdes untuk KP	PSDKP Kecamatan	Wawancara dan dokumentasi	Semester	PSDKP Kecamatan	0	DK	DK

**Keterangan**

DK = Ditentukan Kemudian

\* = Diagregasi per kecamatan dan gender

## Lampiran VI: Komponen Pembiayaan Kelas Perahu Kegiatan dalam Permendagri 90/2019 jo Kepmendagri 050/3708/2020

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan Kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya	Sumber Pembiayaan			
									Dinas Pendidikan	Sekolah	APBDesa	
	APBD											
	01.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan										
	01.01.02.2.01/ 01.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar/Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
	01.01.02.2.01.28/ 01.01.02.2.02.41	Sub-Kegiatan: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										
1		Penyusunan Peraturan, Kebijakan dan SOP (Pembuatan regulasi tingkat kabupaten seperti peraturan bupati dan sejenisnya untuk mendukung pelaksanaan kelas perahu)										
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	paket	2 kali	227.000	454.000	454.000		454.000		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	orang	7 kali	39.410	2.758.700	2.758.700		2.758.700		
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5	orang	7 kali	400.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000		
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1	Tim	1 kali	2.350.000	2.350.000	19.562.700		2.350.000		
2		Pembinaan kapasitas pengawas, kepala sekolah, dan guru dalam mendukung pelaksanaan kelas perahu										
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50	paket	1 kali	27.000	1.350.000	1.350.000		1.350.000		
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	50	paket	1 kali	15.000	750.000	750.000		750.000		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	55	orang	1 kali	39.410	2.167.550	2.167.550		2.167.550		
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2	orang	1 kali	400.000	800.000	800.000		800.000		

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan Kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya	Sumber Pembiayaan		
									Dinas Pendidikan	Sekolah	APBDesa
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan									
		- Honorarium Tim Pelaksana	1	Tim	1 Kali	2.350.000	2.350.000		2.350.000		
		- Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	50	Orang	1 kali	100.000	5.000.000	12.417.550	5.000.000		
3		<b>Sosialisasi model layanan pendidikan kelas perahu kepada Pemerintah Desa, dan sekolah lain di wilayah kabupaten</b>							-		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60	paket	1 kali	25.000	1.500.000		1.500.000		
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	60	paket	1 kali	10.000	600.000		600.000		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65	orang	1 kali	25.000	1.625.000		1.625.000		
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2	orang	1 kali	500.000	1.000.000		1.000.000		
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan									
		- Honorarium Tim Pelaksana	1	Tim	1 Kali	2.350.000	2.350.000		2.350.000		
		- Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	60	Orang	1 kali	100.000	6.000.000	13.075.000	6.000.000		
4		<b>Pelatihan Guru/Fasilitator</b>							-		
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40	paket	1 kali	27.000	1.080.000		1.080.000		
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40	paket	1 kali	15.000	600.000		600.000		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	45	orang	1 kali	39.410	1.773.450		1.773.450		
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	2	orang	1 kali	400.000	800.000		800.000		

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan Kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya	Sumber Pembiayaan			
									Dinas Pendidikan	Sekolah	APBDesa	
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan										
		- Honorarium Tim Pelaksana	1	Tim	1 Kali	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000			
		- Jasa Peserta Pelatihan dan Sosialisasi	40	Orang	1 kali	100.000	4.000.000	10.603.450	4.000.000			
5		<b>Pendataan (Penyediaan Data) Anak Usia Sekolah melaut</b>										
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	40	paket	1 kali	103.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000			
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	40	paket	10 kali	39.410	15.764.000	15.764.000	15.764.000			
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan										
		- Honorarium Tim Pelaksana (40 Sekolah)	40	paket	1 kali	600.000	24.000.000	43.884.000	24.000.000			
	<b>1.01.02.2.01.23/ 1.01.02.2.02.36</b>	<b>Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</b>										
6		<b>Pelaksanaan Kelas Perahu</b>										
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	447	paket	2 kali	79.560	71.126.640	71.126.640	71.126.640			
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	447	paket	2 kali	105.000	93.870.000	93.870.000	93.870.000			
	5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	28	orang	4 kali	11.260	1.261.120	1.261.120	1.261.120			
	5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	28	orang	12 bulan	1.100.000	369.600.000	535.857.760	369.600.000			
	<b>1.01.03.</b>	<b>Program Pengembangan Kurikulum</b>										
	<b>1.01.03.2.01</b>	<b>Kegiatan: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>										
	<b>1.01.03.2.01.02</b>	<b>Sub Kegiatan: Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>										
7		<b>Desain Kurikulum Kelas Perahu</b>										
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	paket	2 kali	227.000	454.000	454.000	454.000			

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan Kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya	Sumber Pembiayaan		
									Dinas Pendidikan	Sekolah	APBDesa
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	orang	6 kali	39.410	2.364.600		2.364.600		
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5	orang	6 kali	400.000	12.000.000		12.000.000		
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1	Tim	1 kali	2.350.000	2.350.000	17.168.600	2.350.000		
8		<b>Penyusunan RPP dan LKS</b>							-		
	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1	paket	2 kali	227.000	454.000		454.000		
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10	orang	6 kali	39.410	2.364.600		2.364.600		
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	5	orang	6 kali	400.000	12.000.000		12.000.000		
	5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1	Tim	1 Kali	2.350.000	2.350.000	17.168.600	2.350.000		
	<b>APBDESA</b>										
	<b>Permendagri 20/2018</b>										
9	2.1.03	<b>Sosialisasi ke Masyarakat dan Orang Tua Murid (Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat)</b>									
	5.2.1.01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	28	Desa	1 kali	227.000	6.356.000				6.356.000
	5.2.1.05	Belanja Perlengkapan Cetak/ Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	28	Desa	1 kali	200.000	5.600.000				5.600.000
	5.2.1.06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi	28	Desa	20 orang	39.410	22.069.600				22.069.600
	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan	28	Desa	4 Orang	100.000	11.200.000				11.200.000
	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1	Orang	28 Desa	400.000	11.200.000	56.425.600			11.200.000

No	Kode Rekening	Komponen Pembiayaan	Jumlah	Item	Keterangan Kegiatan	Biaya/Harga	Biaya/Total (Rp)	Total Biaya	Sumber Pembiayaan			
									Dinas Pendidikan	Sekolah	APBDesa	
10	2.1.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar										
	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	28	Orang	12 Bulan	500.000	168.000.000	168.000.000				168.000.000
11	2.1.10	Beasiswa Murid										
	5.2.2.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin	44	Orang	12 Bulan	100.000	52.800.000	52.800.000				52.800.000
	<b>TOTAL</b>							<b>946.963.260</b>	<b>503.479.900</b>	<b>166.257.760</b>	<b>277.225.600</b>	

## Lampiran VII: Biaya per Paket SBU Pangkep

### BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER

No.	Komponen	Satuan	Spesifikasi	Harga	Kebutuhan	Total
1	Kertas Folio/F4	Rim	70 gram	62.000	2	124.000
2	Tinta Printer Hitam	Buah	Canon	62.000	1	62.000
3	Ballpoint Biasa	Dos		41.000	1	41.000
						227.000
4	Foto Copy	lembar		300	50	15.000
Cetak LKS						
4	Foto Copy	lembar		300	350	105.000

### BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR

No.	Komponen	Satuan	Spesifikasi	Harga	Kebutuhan	Total
1	Ballpoint Biasa	buah		4.000	1	4.000
2	Block note	Buah		6.000	1	6.000
3	Map Plastik	buah		17.000	1	17.000
						27.000
Alat tulis siswa						
1	Buku tulis	buah	Tebal isi 38	4.504	10	45.040
2	Ballpoint Biasa	buah		4.000	3	12.000
3	Map Plastik Resleting	buah		22.520	1	22.520
						79.560

**BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT**

No.	Komponen	Satuan	Spesifikasi	Harga	Kebutuhan	Total
1	Snack	dos		11.260	1	11.260
2	Nasi	Dos		28.150	1	28.150
						39.410
Honorarium						
Honorarium Narasumber						
No.	Komponen	Satuan	Spesifikasi	Harga	Kebutuhan	Total
1	Pengajar	Orang/ Jam		200.000	2	400.000
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan						
No.	Komponen	Satuan	Spesifikasi	Harga	Kebutuhan	Total
1	Penanggung jawab	OK		450.000	1	450.000
	Ketua/Wakil Ketua	OK		400.000	1	400.000
	Sekretaris	OK		300.000	1	300.000
	Anggota	OK		300.000	4	1.200.000
						2.350.000
No.	Komponen	Satuan	Spesifikasi	Harga	Kebutuhan	Total
1	Jasa Peserta pelatihan dan Sosialisasi	orang		100.000	1	100.000
Honorarium THL						
1	THL tenaga kependidikan	Orang/ Bulan	Sarjana	1.100.000	1	1.100.000
Insentif						
	Honor Guru PAUD/ Sanggar belajar	Orang/ Bulan		500.000	1	500.000





